

ANALISIS INFORMASI  
STATISTIK PEMBANGUNAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**2016**

# Tim Penyusun

- Pengarah : Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si (Kepala Bappeda DIY)  
Dra. Wrih Puji Rarasati (Sekretaris Bappeda DIY)  
Cahyo Widayat, SH, M.Si (Kepala BSD Bappeda DIY)
- Penanggung Jawab : Y. Bambang Kristianto, MA, M.Sc (Kepala BPS Provinsi DIY)
- Editor : Dr. Evi Noor Afifah (Dosen FEB, UGM)  
Y. Sri Susilo, SE, M.Si (Dosen FE, UAJ Yogyakarta)
- Koordinator Penulis : Mainil Asni, SE, M.E. (Kepala Bidang NWA, BPS Provinsi DIY)
- Penulis : Mutijo, S.Si, M.Si (BPS Provinsi DIY)  
Dr. Ir. Kusriatmi, MP (BPS Provinsi DIY)  
Suryono, S.Si (BPS Provinsi DIY)  
Gita Oktavia, S.Si, MA (BPS Provinsi DIY)  
Waluyo, S.ST, SE, M.Si (BPS Provinsi DIY)  
Fitri Puji Astuti, S.ST, MM (BPS Provinsi DIY)  
Nurita (BPS Provinsi DIY)
- Desain : Mutijo, S.Si, M.Si  
Waluyo, S.ST, SE, M.Si (BPS Provinsi DIY)
- Dicetak Oleh :
- Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pusat Statistik  
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016
- Jumlah halaman : ... + ... halaman
- Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Pembangunan baik secara ekonomi maupun secara sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun terkadang tidak jarang memberikan efek negatif bagi sebagian masyarakat lainnya. Pembangunan akan berdampak positif jika mampu mengangkat taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dan memberikan benefit atau mamfaat dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Namun pembangunan akan berdampak negatif jika merugikan sebagian besar masyarakat. Pembangunan tidak selalu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, kadang hanya sebagian kecil yang memperoleh manfaat. Pada kondisi inilah peran regulasi sebagai pengendali yang lebih memikirkan seluruh masyarakat harus diutamakan.

Pembangunan yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi dibanyak sisi telah menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat dalam kepemilikan /penguasaan sumber daya baik sumber daya alam, finansial maupun pendidikan.. Secara teori ketimpangan dapat menjadi pemicu terjadinya keresahan sosial yang berdampak dalam tatanana kehidupan masyarakat.

Publikasi ini merupakan kompilasi dari hasil-hasil pembangunan baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, sosial maupun dari sisi pemerintahannya sendiri. Sebagain data yang digunakan untuk penulisan analisis ini adalah data DI Yogyakarta dalam angka yang diperkuat dengan data sektoral lainnya untuk menunjang data yang tidak tersedia dalam publikasi tersebut. Dengan demikian, amalisis ini merupakan pendekatan analisis diskriptif, komprehensif dan integratif yang dikompilasi dengan berbagai isu dan peristiwa pembangunan yang terukur dan didukung oleh isu kualitatifnya.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak atas sumbang saran, tenaga, data dan informasi sehingga publikasi ini bisa tersusun dan bisa disajikan. Hasil kajian analisis ini diharapkan menjadi input tambahan dalam memperjelas secara narasi indikator –indikator yang terdapat dalam DI Yogyakarta dalam angka. Saran dan kritik perbaikan untuk penyempurnaan publikasi ini dimasa yang akan datang sangat diharapkan.

Jogjakarta, Oktober 2016  
Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta  
Kepala

Y.Bambang Kristianto, MA

# Kata Sambutan

**P**ublikasi Analisis Informasi Statistik Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015, merupakan publikasi yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan dari pembuatan publikasi ini adalah informasi yang lengkap secara angka dan deskriptif mengenai berbagai hal terkait kegiatan perekonomian, sosial dan kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana serta informasi terkait pemerintahan.

Analisis komprehensif yang mengaitkan antara potensi pemilikan sumber daya, proses pembangunan ekonomi serta dampaknya terhadap tatanan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi suatu kebutuhan bagi perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Komprehensif karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, perkembangan serta aksesibilitasnya terhadap hasil-hail pembangunan. Hasil kajian ini akan dijadikan sebagai rujukan bagi perencanaan pembangunan diberbagai segi dan sebagai pedoman arah penentuan kebijakan daerah.

Kami berharap publikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak terkait. Bagi para pengusaha publikasi ini diharapkan bisa menjadi bahan pijakan dalam menentukan strategi bisnis mereka. Bagi masyarakat umum, informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai kinerja dan peranan pemerintah dalam melaksanakan social control.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas kerjasamanya dalam penyusunan publikasi ini. Semoga kerjasama yang terjalin secara baik selama ini semakin erat dan dapat memberikan sumbangsihnya dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jogjakarta, Oktober 2016  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala

Drs.Tavip Agus Rayanto, MSi

Memasuki tahun 2016 masih sangat banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu tugas berat adalah dampak dari adanya krisis global yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membatasi kemampuan para pelaku ekonomi yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Tidak satupun negara didunia yang tidak terkena dampak krisis yang berawal dari negara adidaya dan negara-negara maju lainnya tersebut, meskipun kadar guncangan yang dirasa setiap negara tidak selalu sama, tergantung keterkaitan masing-masing negara.

Dampak bagi Indonesia antara lain terlihat dari melemahnya rupiah, melambatnya ekspor, penurunan berbagai harga komoditi Indonesia ditingkat dunia yang pada akhirnya menghambat perkembangan sektor riil. Dampak pelemahan ekonomi global terhadap ekspor ditunjukkan melalui penurunan kinerja ekspor yang disebabkan menurunnya permintaan pasar global terhadap produk-produk lokal. Beberapa industri mengalami penurunan permintaan dan beberapa berujung pada pengurangan tenaga kerja yang dampaknya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelemahan harga komoditas sebagai andalam ekspor indonesia juga berdampak pada sektor industri manufaktur, sementara harga komoditas impor masih relatif baik.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian komoditas ekspor dikirim kenegara Amerika Serikat dan negara-negara dikawasan Tiongkok juga ikut merasakan dampak pelemahan ini, meskipun disisi lain sektor pariwisata masih relatif stabil sehingga pelemahan tersebut masih sedikit diimbangi oleh sektor pariwisata.

Jogjakarta sebagai daerah yang mempunyai wilayah sangat terbatas sangat sulit meningkatkan perekonomian dari sektor primer baik dari sektor pertanian, pertambangan maupun industri. Keterbatasan wilayah menyebabkan Jogjakarta tidak memungkinkan membuka lahan sawah baru secara masif begitu juga dengan perkebunan, hal yang sama juga terjadi pada sektor pertambangan dimana jogja tidak mempunyai hasil tambang yang mumpunio sebagai sumber pendapatan daerahnya. Sektor primer lainnya juga membutuhkan area yang relatif besar yaitu industri. Industri yang sangat mungkin dikembangkan adalah industri kecil dan menengah yang bisa dilakukan di wilayah terbatas. Karena keterbatasan tersebut dan karena potensi disektor sekunder dan tersier cukup besar maka sudah selayaknya Yogyakarta melaju menjadi daerah dengan kategori fourth wave economc atau ekonomi gelombang keempat dimana pada tahap ini perekonomian lebih berorientasi pada kreativitas (creativity), Kebudayaan (Cultural), Warisan budaya (Herritage) dan Lingkungan (Environment).

Semakin tingginya tingkat kemajuan menyebabkan semakin beragamnya kegiatan ekonomi yang tercipta., Hal ini membutuhkan evaluasi, pemantauan dan kontrol dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan disemua sektor ekonomi yang melibatkan berbagai kalangan ini.

Analisis dalam bentuk uraian ringkas ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi dilapangan dengan pemerintah daerah sebagai regulator dan terkadang juga sebagai pelaksana perekonomian. Perlunya memahami makna data statistik secara agregat

untuk mengetahui gejala, penyebab serta arah pembangunan yang berlangsung. Bahkan data direstrukturisasi sedemikian rupa agar dapat diketahui hubungan antar peristiwa pembangunan.

Diawali dengan identifikasi ragam statistik, penjelasan konsep, kualitas dan ketersediaan data, sampai dengan inventarisasi data yang mempunyai keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan peristiwa penting yang terjadi tetap disajikan meskipun tidak sepenuhnya didukung lengkap oleh data kuantitatif. Pembangunan sosial dan ekonomi saling berpengaruh yang pada gilirannya akan membentuk kemakmuran (welfare).

Sebagian data yang disajikan dalam publikasi ini dikutip dari DI.Yogyakarta Dalam Angka yang bersumber dari berbagai departemen/instansi/lembaga selain juga data dari Badan Pusat Statistik. Urutan penulisan tidak sepenuhnya mengikuti urutan tabel DDA, karena disesuaikan dengan tema yang dibahas. Data yang dicantumkan sangat bervariasi (kondisi data tahun yang terakhir), namun beberapa data yang menggambarkan kondisi yang tengah berlangsung (current year) juga dibahas, di antaranya adalah data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan ekspor- impor. Untuk memperkuat analisis informasi lain yang bersifat kualitatif dihimpun dari berbagai sumber data termasuk media masa. Satu data dimungkinkan akan tercatat di beberapa bab isu, tergantung pada konsentrasi kajian yang dipilih.

Urutan analisis disusun menurut tatanan/struktur dari sumber daya alam, sumber daya manusia, pemerintah sebagai penyelenggara negara, proses ekonomi, dan digambarkan dampak yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Struktur analisis diklasifikasikan menurut lingkup aspek pada bab:

1. Pendahuluan
2. Pemerintahan
3. Sarana dan prasarana
4. Kesejahteraan Rakyat
5. Perekonomian
6. Kewilayahan

Analisis ekonomi secara makro mempunyai peran penting dalam kajian ini. Sebagai perluasan dari cabang ilmu sosial, ilmu ekonomi mempunyai spektrum yang sangat luas dengan berpijak pada 3 (tiga) pilar utama kegiatannya yang meliputi : proses produksi, konsumsi dan akumulasi (investasi) yang kegiatannya saling terkait yang membentuk suatu sistem terintegrasi. Oleh karena itu berbagai variabel atau indikator akan disajikan untuk melihat keterkaitan diantara peristiwa ekonomi maupun bidang lainnya seperti sosial dan pemerintah.

Ekonomi sudah dikenali dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dari hal-hal yang bersifat sederhana seperti mengenal produk/komoditas dan uang. Kemudian berkembang dan berdampak pada sisi sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan.

Ekonomi mempunyai daya dorong yang sangat kuat. Lazimnya uang digunakan sebagai alat

tukar atas suatu produk yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Uang merupakan salah satu bentuk instrumen finansial yang tidak habis dipakai, karena berputar terus dalam proses ekonomi. Dalam perputarannya uang akan menurunkan pendapatan (income). Kebijakan yang berkaitan dengan uang atau dikenal sebagai kebijakan moneter merupakan kebijakan sentral

yang tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bahkan krisis global yang terjadi belakangan ini selalu dikaitkan dengan masalah uang (finansial).

Dari proses pembangunan di bidang ekonomi dan dengan melibatkan berbagai instrumen finansial seperti uang, tabungan, dan modal inilah yang pada akhirnya akan membentuk aliran kekayaan dan kemakmuran bagi masyarakat (wealth). Distribusi pendapatan primer dan sekunder merupakan bentuk alokasi kekayaan ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam proses produksi. Dari sumber pendapatan tersebut maka rumah tangga akan membiayai seluruh kebutuhan dan pengeluarannya. Apabila pendapatan lebih besar dari pengeluaran maka akan terbentuk tabungan (saving), sebaliknya apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan maka terjadi dissaving.

Kemudian pada akhir uraian disetiap bab utama akan ditutup oleh tabel indikator yang berisikan perpaduan statistik yang tersedia. Agregasi data ringkas ini dimaksudkan untuk melihat ukuran pembangunan, hasil pembangunan serta dampaknya baik di bidang ekonomi maupun sosial yang diartikulasikan dalam bentuk indikator-indikator yang terintegrasi.

Semua indikator yang diturunkan dari proses seleksi ini akan menjadi dasar pembentukan indikator pembangunan, analisis komprehensif, dan pengembangan model-model statistik. Koherensi dan konsistensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan mutu statistik yang disajikan.

# DAFTAR ISI

# DAFTAR TABEL

# DAFTAR GAMBAR



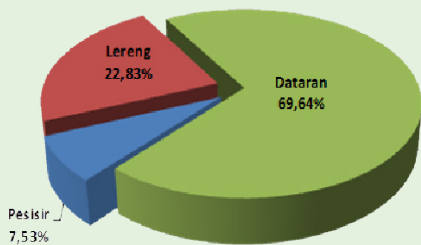
# PENDAHULUAN



# Bab 1 PENDAHULUAN



Gambar 1.1.  
Peta Wilayah Administrasi D.I. Yogyakarta



Gambar 1.2.  
Jumlah Desa menurut Tipologi Wilayah

### 1.1. KEADAAN GEOGRAFIS

**D**aerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak pada posisi antara 7o.33'-8o.12' Lintang Selatan dan 110o.00'-110o.50' Bujur Timur. Secara administratif, DIY memiliki luas wilayah terkecil kedua di Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah daratan DIY hanya 3.185,80 km<sup>2</sup>, atau 0,17 persen dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah yang sangat kecil ini menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan perekonomian daerah, karena keterbatasan sumber daya alam.

Posisi geostrategis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, dimana wilayah daratan DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Purworejo di sisi barat, Kabupaten Magelang dan Boyolali di sisi utara; serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri di sisi timur. Wilayah selatan DIY berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Posisi DIY yang berada ditengah-tengah pulau jawa ini menjadi keuntungan buat DI.Yogyakarta karena menjadi pintu masuk wisatawan untuk menuju obyek wisata di daerah Jawa Tengah.

Mayoritas desa di DIY berada di daerah dataran dengan jumlah 305 desa (69,64 persen), berikutnya adalah desa di punggung/lereng bukit dengan jumlah 100 desa (22,83 persen). Sementara, desa yang terletak di daerah pesisir terdiri dari 33 desa atau 7,53 persen dari seluruh desa.

Komposisi luas wilayah DIY menurut kabupaten/kota sebagian besar relatif seimbang dimana 3 kabupaten yaitu Kulonprogo, Bantul dan Sleman memiliki luas yang hampir sama yaitu 15 hingga 18 persen. Luas wilayah terkecil adalah Yogyakarta sebesar 1 (satu) persen namun memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 12 ribu jiwa per km, sementara Gunung kidul dengan luas 46,6

persen hanya memiliki kepadatan 470 jiwa per km. Disini terjadi ketidakmerataan yang sangat tinggi yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perekonomian di daerah tersebut karena penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam mengoptimal perekonomian.

Bentang alam wilayah DIY merupakan kombinasi antara daerah pesisir, dataran dan perbukitan/pegunungan yang dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi. Pertama, satuan fisiografi Gunung Merapi dengan ketinggian 80-2.911 m di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul.

Kedua, satuan fisiografi Pegunungan Selatan (ketinggian 150-700 m) terletak di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Ketiga, satuan fisiografi Pegunungan Kulonprogo, terletak di bagian utara Kulonprogo dan menjadi bentang lahan dengan topografi berbukit. Keempat, satuan fisiografi Dataran Rendah (ketinggian 0-80m) membentang di bagian selatan wilayah DIY mulai dari Kulonprogo sampai wilayah Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu.

Kawasan ini sangat subur dan cukup potensial untuk kegiatan pertanian.

DI.Yogyakarta juga memiliki pulau-pulau yang cukup banyak yaitu 28 buah yang hanya berada di kabupaten Gunung Kidul dan yang terbanyak berada di kecamatan GiriSubo.

## 1.2. IKLIM

Sebagai daerah dengan bentang iklim dari laut hingga pegunungan, Kondisi iklim DI.Yogyakarta sangat bervariasi antar daerah. Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya kabupaten yang mempunyai wilayah dengan ketinggian diatas 1000 m memiliki suhu yang relatif lebih rendah dibanding daerah lain. Kondisi yang seperti menyebabkan daerah Sleman menjadi daerah kantong air bersih untuk daerah-daerah lain di Jogjakarta.

Suhu udara minimum pada tahun 2015 sebesar .... dan maksimum .... dengan curah hujan ang relatif rendah pada tahun 2015 yaitu .....

Bab  
2

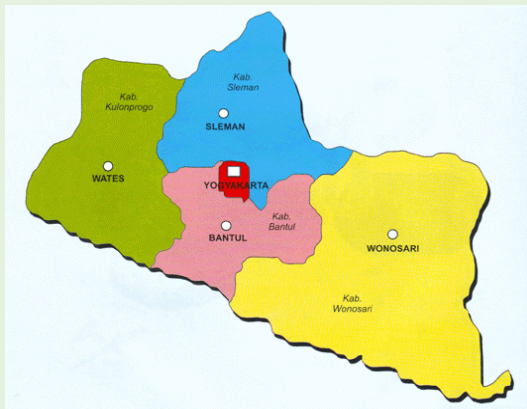
# PEMERINTAHAN



# Bab PEMERINTAHAN

## 2

Gambar 2.1.  
Wilayah Administrasi D.I. Yogyakarta



Sumber : Google Search

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi wilayah yang memiliki keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Keistimewaan yang dimaksud tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang kedudukan hukum DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintah daerah; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Penyelenggara pemerintahan di DIY terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah berfungsi sebagai eksekutif yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbeda dengan provinsi lainnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, namun melalui proses penetapan Sultan Yogyakarta yang bertahta menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Wakil Gubernur sebagai salah satu wujud keistimewaan DIY.

Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur juga dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretaris Daerah membawahi tiga asisten yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra :
  - a. Biro Tata Pemerintahan
  - b. Biro Hukum
  - c. Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

## 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

- a. Biro Adm. Perekonomian & SDA
- b. Biro Administrasi Pembangunan

## 3. Asisten Administrasi Umum :

- a. Biro Organisasi
- b. Biro Umum Humas dan Protokol

## 2.1. WILAYAH ADMINISTRASI

Secara administratif, wilayah DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota yakni Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan DIY berada di Kota Yogyakarta. Berbeda dengan provinsi lain yang banyak mengalami pemekaran sejak pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, jumlah kabupaten/kota di DIY tidak mengalami perubahan. Demikian pula dengan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan juga tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.1.

Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Daerah menurut Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta, 2015

Kode	Kabupaten/ Kota	Kec.	Kelurahan/Desa			Dusun/ Dukuh	RW	RT	Luas (km <sup>2</sup> )
			Kota	Desa	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.	Kulon Progo	12	13	75	88	930	1 884	4 462	586,27
02.	Bantul	17	47	28	75	934	-	5 681	506,85
03.	Gunungkidul	18	5	139	144	1 432	1 671	6 864	1 485,36
04.	Sleman	17	59	27	86	1 212	2 933	7 364	574,82
71.	Yogyakarta	14	45	-	45	-	614	2 525	32,5
34.	D.I.Yogyakarta	78	169	269	438	4 508	7 102	26 896	3 185,80

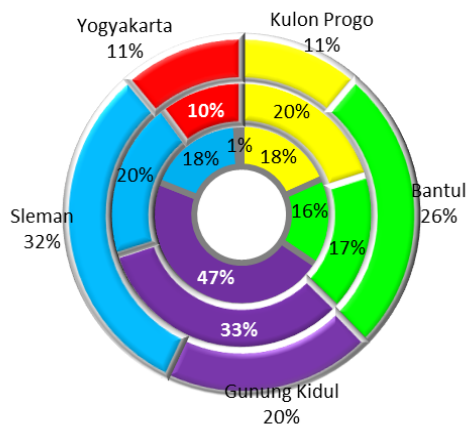
Sumber:

Master File Desa, Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta BPS DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa yaitu:

- Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/ desa
- Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa
- Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa
- Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan

Gambar 2.2.  
Persentase Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah



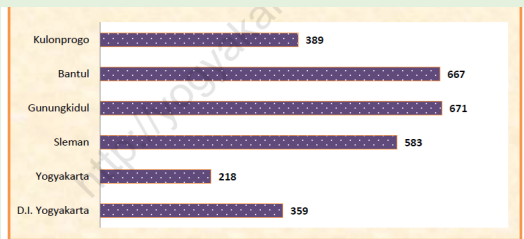
Sumber: BPS DIY

Tabel 2.2.  
Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di D.I.  
Yogyakarta, 2014

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi		Laki-laki + Perempuan	Rasio Penduduk per Polisi
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Kulon Progo	1.000	41	1.041	1 : 389
02.	Bantul	1.384	68	1.452	1 : 667
03.	Gunungkidul	1.001	41	1.042	1 : 671
04.	Sleman	1.893	105	1.998	1 : 583
05.	Yogyakarta	1.740	93	1.833	1 : 218
06.	MAPOLDA DIY	2.560	216	2.776	-
34.	D.I. Yogyakarta	9.578	564	10.142	1 : 359

Sumber:  
Polres/Polresta D.I. Yogyakarta

Gambar 2.3.  
Rasio Penduduk per Polisi di D.I. Yogyakarta,  
Tahun 2014



Sumber: Polres/Polresta/Polda di D.I. Yogyakarta

86 kelurahan/desa

- Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

Jumlah kecamatan pada tahun 2015 sebanyak 78 kecamatan dan terbagi menjadi 438 desa/kelurahan. Daerah yang memiliki luas administrasi terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,4 km<sup>2</sup> atau 46,6 persen dari luas DIY. Sementara, Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan luas wilayah terkecil sebesar 32,5 km<sup>2</sup> atau 0,01 persen dari luas wilayah DIY.

Dari grafik terlihat Kota Yogyakarta dengan luas wilayah yang hanya 1 persen menampung 11 persen penduduk DI Yogyakarta, sedangkan Gunung Kidul yang mempunyai hampir setengah Provinsi DI Yogyakarta (47 persen) hanya ditempati oleh 20 persen penduduk.

## 2.2. HUKUM DAN POLITIK

### 2.2.1. Kriminalitas

#### Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Keamanan suatu wilayah tak lepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam upaya penanggulangan masalah keamanan di D.I. Yogyakarta didukung oleh berbagai prasarana keamanan antara lain 80 Polsek/Polsekta, 5 Polres/Polresta, serta 1 Polda.

Polisi merupakan satuan organisasi keamanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada tahun 2014 di D.I. Yogyakarta rasio penduduk per polisi 359, artinya setiap 1 polisi melayani 359 penduduk.

Polisi di D.I. Yogyakarta mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Perbandingan polisi perempuan dengan laki-laki adalah 1:17. Ini disebabkan masih rendahnya minat perempuan untuk bekerja di pelayanan masyarakat bidang keamanan. Pos polisi dan poskamling merupakan salah satu prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat.

mempunyai pos polisi, sedangkan 83,33 persen desa/ kelurahan mempunyai poskamling. Jumlah hansip yang ada di D.I. Yogyakarta mencapai 26.164 orang dengan rasio hansip per desa/kelurahan mencapai 1:60 artinya setiap 1 desa/kelurahan dilayani 60 hansip. Rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling kecil berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1:31 artinya setiap 1 desa dilayani oleh 31 orang hansip, sedangkan rasio hansip terhadap desa/ kelurahan paling besar berada di Kabupaten Bantul yaitu 1:86 artinya setiap desa dilayani oleh sekitar 86 orang hansip.

Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

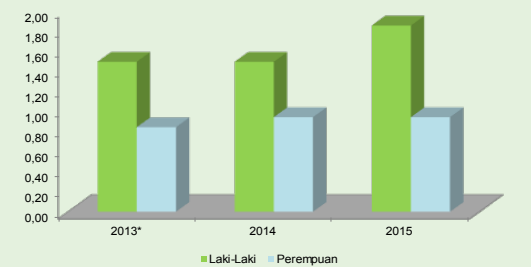
Tabel 2.3. memperlihatkan bahwa penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013 penduduk yang menjadi korban kejahatan sebanyak 1,16 persen, naik menjadi 1,21 persen pada tahun 2014 dan naik kembali menjadi 1,39 persen pada tahun 2015.

Bila ditinjau menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak menjadi korban kejahatan dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2015, penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,85 persen, sedangkan penduduk perempuan hanya sebesar 0,94 persen.

Jika diliat dari jenis kejahatan yang di alami oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, kejahatan terbanyak adalah tindakan pencurian, selain itu tindak kejahatan penganiayaan juga relatif masih banyak dialami masyarakat. Lebih jelasnya untuk kondisi jenis kejahatan yang dialami masyarakat pada tahun 2015 seperti terlihat dalam Gambar 2.4.

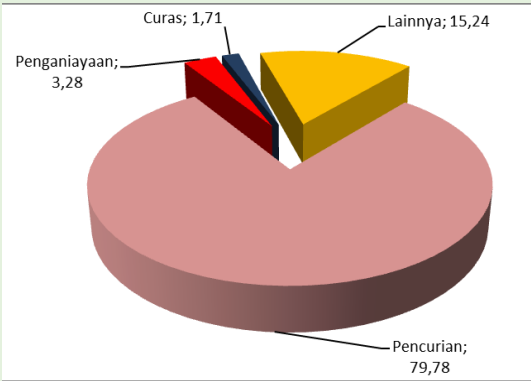
Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di D.I. Yogyakarta selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 5,44 persen. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sangat tajam sebesar 193,98 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tindak kejahatan, juga adanya perubahan

Gambar 2.3. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di DIY, 2013-2015



Ket./Note : \*Data Tahun 2013 Backcast  
Sumber:  
Polres/Polresta D.I. Yogyakarta

Gambar 2.4. Persentase Penduduk yang pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015



Sumber:  
Polres/Polresta D.I. Yogyakarta

Tabel 2.3. Jumlah Tindak Kejahatan yang dilaporkan (Crime Total) di D.I. Yogyakarta, 2012-2014

Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	629	306	859
Bantul	580	617	2.570
Gunungkidul	402	344	303
Sleman	2.009	2.002	1.843
Yogyakarta	1.913	1.911	1.778
MAPOLDA DIY	1.194	1.181	11.347
D.I. Yogyakarta	6.727	6.361	18.700

Keterangan: \*) Gunungkidul dan Sleman Angka sementara  
Sumber:  
Polres/Polresta/Polda D.I. Yogyakarta

Tabel 2.4.

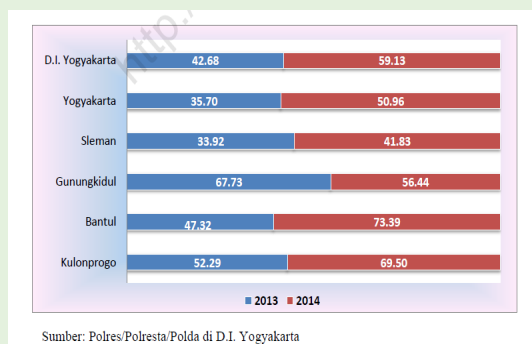
Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) di D.I. Yogyakarta, 2012-2014

Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	475	160	509
Bantul	314	292	540
Gunungkidul	231	233	171
Sleman	820	679	771
Yogyakarta	640	644	906
MAPOLDA DIY	857	664	538
<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>3.337</b>	<b>2.672</b>	<b>3.435</b>

Keterangan: \*) Gunungkidul dan Sleman Angka sementara  
Sumber:  
Polres/Polresta/Polda D.I. Yogyakarta

Gambar 2.5.

Persentase Tindak Kejahatan yang dapat diselesaikan di D.I. Yogyakarta, 2013 – 2014



Tabel 2.5.

Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pencurian	63	39	67	72	42	283
2. Pencurian dengan Kekerasan	-	5	1	7	7	20
3. Penipuan/Penggelapan	15	15	13	23	30	96
4. Penganiayaan	8	13	5	15	13	54
5. Pembakaran	1	-	1	2	1	5
6. Perkosaan Tindak Asusila	1	3	2	4	1	11
7. Penyalahgunaan/Peredaran Narkoba	1	8	2	20	6	37
8. Perjudian	10	13	15	13	8	59
9. Pembunuhan	1	2	1	9	3	16
10. Perdagangan Orang	-	-	-	-	-	-

Sumber:  
Podes 2014, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

bentuk pencatatan laporan tindak kejahatan yang lebih rinci. Bila dilihat menurut kabupaten/kota tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2014 terbanyak di Kabupaten Bantul yakni sebesar 2.570 kasus, disusul oleh Kabupaten Sleman (1.843 kasus) dan Kota Yogyakarta (1.778 kasus). Kondisi ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya.

Kabupaten Gunungkidul termasuk daerah yang relatif lebih aman jika dibandingkan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk tahun 2015 jumlah penduduk yang mengalami tindak kejahatan pada hanya sebesar 0,21 persen. Persentase penduduk yang mengalami tindakan kejahatan terbesar berada di kabupaten Sleman sebesar 2,05 persen.

Dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi pada tahun 2014 sebesar 59,13 persen dapat diselesaikan, mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2013 yang mencapai 42,68 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2013, persentase tindak kejahatan yang dapat diselesaikan di semua kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang bervariasi.

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki masyarakat menggambarkan semakin tidak amannya suatu wilayah. Bila dibandingkan dengan tahun 2013, resiko penduduk terkena tindak kejahatan tahun 2014 di semua kabupaten/kota mengalami peningkatan, sebanding dengan meningkatnya jumlah tindak kejahatan di masing-masing kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.

Menurut hasil Podes 2014, 64,61 persen desa/kelurahan di D.I. Yogyakarta terdapat kejadian tindak kejahatan pencurian, 21,92 persen ada kejadian tindak kejahatan penipuan/penggelapan dan 13,47 persen ada kejadian tindak kejahatan perjudian. Perhatian pemerintah maupun masyarakat perlu ditingkatkan, karena di D.I. Yogyakarta terdapat 8,45 persen desa/kelurahan ada kejadian tindak kejahatan “penyalahgunaan/pengedaran narkoba”. Jika diamati berdasarkan jenis kejahatan, Kabupaten Sleman memiliki jumlah desa terbanyak dengan

berbagai jenis tindak kejahatan dibanding kabupaten/kota lain.

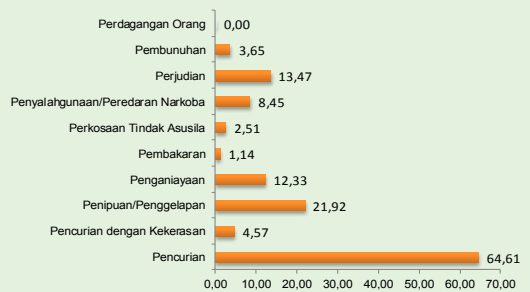
Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah adanya perkelahian massal. Menurut hasil Podes 2014 di D.I.Yogyakarta perkelahian massal terjadi di 12 desa/kelurahan. Angka perkelahian massal tertinggi pada jenis perkelahian antar kelompok warga. Kasus tersebut terjadi di 5 desa/kelurahan. Peringkat selanjutnya adalah perkelahian antar desa/kelurahan yang terjadi di 4 desa/kelurahan, dan perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa terjadi di 2 desa/kelurahan.

Bila dilihat menurut penggolongan kejahatan, padatahun2014kasuskejahatanyangmenonjoldiD.I. Yogyakarta adalah kejahatan konvensional. Jumlah tindak kejahatan konvensional selama periode 2013 sampai dengan 2014 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 kejahatan konvensional mencapai 6.513 kasus, tahun 2014 meningkat menjadi 18.700 kasus. Golongan kejahatan terbanyak kedua adalah Kejahatan Kekayaan Negara, pada tahun 2014 mencapai 3.760 kasus. Jumlah penyelesaian tindak kejahatan pada tahun 2014 di D.I.Yogyakarta tercatat sebesar 11.047 kasus. Empat jenis kejahatan dengan persentase terbesar masing-masing adalah kasus gangguan (98,87%), kasus kejahatan kekayaan negara (89,28%), bencana (77,62%), dan kejahatan kontijensi (70,74%).

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul mempunyai selang waktu tindak kejahatan paling lama yaitu lebih dari 28 jam, sedang Kabupaten Bantul paling cepat yaitu kurang dari 4 jam. Selang waktu tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul lebih cepat dibandingkan tahun 2013, sedangkan di Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih lama. Dari beberapa jenis kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2014 di berbagai wilayah di D.I. Yogyakarta, salah satu jenis kejahatan yang mendapat perhatian khusus adalah kejadian kejahatan narkoba

Seperti yang disajikan pada tabel 2.7. kejadian kejahatan narkoba telah merambah di berbagai kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Tahun

Gambar 2.6.  
Persentase Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta 2014



Sumber:  
Podes 2014, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Tabel 2.6.  
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta, 2014

Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					MAPOLDA DIY	Total
	Kulon Progo	Bantul	Gunung- kidul	Sleman	Yogya- karta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kejahatan Konvensional	66,02	71,59	51,19	41,77	49,28	40,82	48,66
2. Kejahatan Trans Nasional	-	-	-	-	-	62,50	65,50
3. Kejahatan Kekayaan Negara	-	100,00	-	-	-	89,33	89,28
4. Kejahatan Kontijensi	100,00	84,81	25,00	-	51,96	100,00	70,74
5. Pelanggaran Hukum	-	-	-	-	18,00	54,40	53,03
6. Gangguan	100,00	97,00	-	100,00	96,67	100,00	98,87
7. Bencana Alam/non Alam	100,00	71,34	-	-	-	100,00	77,62
Jumlah	69,50	73,39	52,81	41,83	50,96	59,28	59,07

Sumber:  
Polres/Polresta/Polda D.I. Yogyakarta

Tabel 2.7.  
Jenis Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di D.I. Yogyakarta, 2014

Kabupaten/ Kota		Narkotika		Minuman keras	
		2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kulonprogo		5	8	15	14
02. Bantul		21	21	34	88
03. Gunungkidul		3	7	5	-
04. Sleman		33	-	2	-
05. Yogyakarta		-	-	-	-
06. MAPOLDA DIY		117 *)	104	-	8

Keterangan: \*) merupakan gabungan narkotika dan miras  
- data tidak tersedia

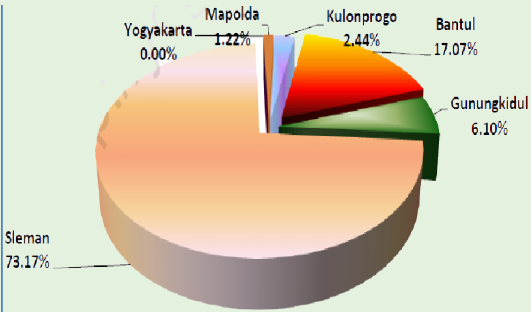
Sumber:  
Polres/Polresta/Polda D.I. Yogyakarta

Tabel 2.8.  
Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di D.I.  
Yogyakarta Tahun 2012 – 2014

Jenis Kejahatan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pencurian dengan Pemberatan	945	885	628
2. Pencurian Kendaraan Bermotor	535	745	529
3. Pencurian dengan Kekerasan	220	161	185
4. Penganiayaan Berat	40	53	65
5. Kebakaran	92	60	44
6. Pembunuhan	12	15	7
7. Perkosaan	9	18	8
8. Kenakalan Remaja	50	59	19
9. Uang Palsu	4	2	1
10. Narkotika	189	144	104
11. Penjudian	116	111	66
12. Pemerasan/Ancaman	30	40	26
Jumlah	2.242	2.293	1.682

Sumber:  
Polres/Polresta/Polda D.I. Yogyakarta

Gambar 2.7.  
Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di D.I.  
Yogyakarta Tahun 2012 – 2014



Sumber:  
Polres/Polresta/Polda D.I. Yogyakarta

2014, di D.I. Yogyakarta terdapat 140 kasus tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba. Jenis tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2014 terbanyak ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta sejumlah 104 kasus.

Pada tabel 2.8. tampak bahwa selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, terdapat 3 jenis kejahatan yang selalu menonjol di D.I. Yogyakarta yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan kekerasan. Persentase jumlah kejahatan tahun 2013 untuk ketiga jenis tindak kejahatan tersebut hampir 80 persen dari total kejahatan.

### Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan

Selain informasi perkembangan jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat setiap tahun secara berkesinambungan, penanganan kejahatan juga perlu memperhatikan secara serius tentang pelaku tindak kejahatan. Pelaku tindak kejahatan pada tahun 2014 sebanyak 1. 915 orang. Tercatat 4,23 persen pelaku kejahatan dilakukan oleh anak-anak, 5 pelaku anak (0,26 %) di antaranya berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 74,07 persen pelaku tindak kejahatan oleh anak-anak pada tahun 2014 berasal dari Kabupaten Sleman, sementara dari Kota Yogyakarta nihil.

Secara umum pelaku tindak kejahatan sebagian besar berasal dari Kabupaten Bantul (28,51%). Disusul secara berurutan pelaku dari Kabupaten Sleman (26,74%), Kota Yogyakarta (19,9%), Kabupaten Gunungkidul (7,31%) serta Kabupaten Kulonprogo (6,58 %).

Berbagai cara telah dilakukan warga untuk menjaga keamanan, antara lain membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Menurut hasil Podes 2014, desa/kelurahan yang menjaga keamanan warga dengan cara membangun poskamling 83,33 persen, membentuk regu keamanan lingkungan 70,78 persen, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan

75,11 persen, menambah jumlah anggota hansip/ linmas 44,52 persen, dan menggunakan cara-cara lainnya sebanyak 85,62 persen.

2.3. PEMILIHAN UMUM

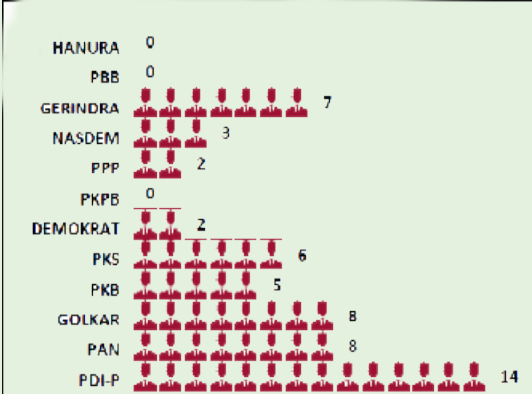
Perubahan sistem politik di Indonesia juga dirasakan di D.I. Yogyakarta. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang mendapat kursi di DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat D.I. Yogyakarta. . Kalau pada pemilu sebelum tahun 2009 ada 15 partai, pada pemilu 2014 hanya terdapat 10 partai yang mendapat kursi di DPRD, walaupun perolehan suara sah di D.I. Yogyakarta masih didominasi oleh partai-partai lama. Hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014 sesuai urutan dari terbanyak adalah sebagai berikut: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Komposisi anggota DPRD DIY periode 2014-2019 berdasarkan parpol pengusung didominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menempatkan wakil sebanyak 14 orang (25 persen anggota). Berikutnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar yang menempatkan wakil masing-masing sebanyak 8 orang, diikuti oleh Partai Gerindra dan Partai keadilan Sejahtera (PKS) dengan wakil sebanyak 7 dan 6 orang.

Kemudian PKB 5 orang, Partai Nasdem 3 orang dan PPP 2 orang. Wakil Partai Demokrat mengalami penurunan tajam dari 10 orang di periode 2009-2014 menjadi 2 orang di periode 2014-2019.

Keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD provinsi/ kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta sebanyak 277 orang; terdiri dari fraksi PDI-P 25,63 persen, PAN 14,44 persen, Golkar dan Gerakan Indonesia Raya masing-masing 11,91 persen dan 17,33 persen, PKS 10,47 persen, PKB 8,30 persen, dan partai

Gambar 2.8. Komposisi Anggota DPRD DIY Priode 2014-2019 menurut Partai Politik



Sumber: Sekretariat DPRD DIY

Tabel 2.9. Komposisi Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2015

Uraian	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya-karta	
-1	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Partai	40	45	45	50	40	55
1. PDI-P	7	12	11	12	15	14
2. P A N	8	6	7	6	5	8
3. Golongan Karya	5	5	6	4	5	8
4. P K B	6	4	3	5	0	5
5. P K S	4	4	5	6	4	6
6. Partai Demokrat	5	1	4	1	1	2
7. P K P B	1	0	-	0	0	0
8. P P P	1	4	0	4	4	2
9. NasDem	1	2	2	5	1	3
10. Partai Gerakan Indonesia Raya	2	6	6	7	5	7
11. P B B	0	1	0	0	0	0
12. Partai HaNuRa	0	0	1	0	0	0
Komisi	40	45	45	50	40	55
1. A (Pemerintahan)	8	11	10	10	8	11
2. B (Ekonomi/Keuangan)	10	11	10	12	10	12
3. C (Pembangunan)	10	10	11	13	9	15
4. D (Kesra)	9	9	10	11	10	13
5. Pimpinan Dewan	3	4	4	4	3	4

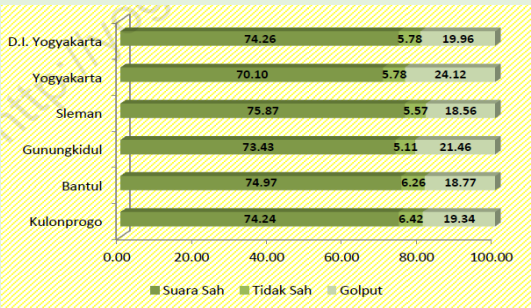
Sumber: Sekretariat DPRD DIY

Tabel 2.10. Jumlah Anggota DPRD menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2014

Kabupaten/ Kota	Pendidikan Terakhir								Jumlah		
	≤ SLTA		D1-D3		D4/S1		S2-S3		L	P	Total
	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01. Kulonprogo	14	1	0	0	17	6	2	0	33	7	40
02. Bantul	18	0	3	1	19	2	2	0	42	3	45
03. Gunungkidul	6	1	3	1	24	3	5	2	38	7	45
04. Sleman	12	2	0	1	23	8	2	2	37	13	50
05. Yogyakarta	8	1	2	0	19	6	1	3	30	10	40
DPRD Provinsi	4	1	0	0	37	4	8	1	49	6	55

Sumber: KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Gambar 2.9.  
 Persentase Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014  
 menurut Hasil Perolehan Suara



Sumber:  
 KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 2.11.  
 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu  
 Presiden 2014 dan Perolehan Suara Sah  
 di D.I. Yogyakarta

Jenis Kejahatan	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kulonprogo	335.897	264.026	4.127	69.888
2. Bantul	732.124	584.918	10.352	136.854
3. Gunungkidul	601.556	456.911	5.623	139.022
4. Sleman	818.960	659.395	9.883	149.682
5. Yogyakarta	321.425	246.341	3.588	71.494
Jumlah	2.812.144	2.211.591	33.573	566.980

Sumber:  
 KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 2.12.  
 Jumlah Keputusan DPRD se-D.I.Yogyakarta, 2015

Jenis Keputusan	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon Progo	Bantul	Gunung- kidul	Sleman	Yogya- karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Peraturan Daerah	21	22	13	16	6	n.a.
2. Keputusan DPRD	18	36	22	26	20	n.a.
3. Peraturan DPRD	0	0	1	0	0	n.a.
4. Keputusan Pimpinan Dewan	3	27	19	16	9	n.a.
5. Kesepakatan Bersama	0	8	3	12	13	n.a.
Jumlah	42	93	58	70	48	n.a.

Keterangan: n.a. = data tidak tersedia  
 Sumber:  
 Sekretariat DPRD DIY

lainnya sebesar 14,3 persen.

Dari segi pendidikan, anggota DPRD DIY periode 2014-2019 adalah sebagai berikut; pendidikan S2/S3 sejumlah 9 orang, pendidikan S1 sejumlah 41 orang dan pendidikan SMU/ sederajat sejumlah 5 orang. Dari sisi jenis kelamin, perempuan sejumlah 6 orang, sedangkan laki-laki sejumlah 49 orang. Komposisi ini mengindikasikan proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen yang cenderung menurun dibandingkan dengan hasil pemilu periode 2009-2014.

Menurut data KPUD D.I. Yogyakarta jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif DPRD DIY 2014 sebanyak 2.771.964 jiwa. Dari jumlah tersebut 80,04 persen menggunakan hak pilih dan 19,96 persen golput. Sedangkan perolehan suara dari jumlah tersebut 92,78 persen suara dinyatakan sah dan 7,22 persen suara tidak sah.

Pada Pemilu Presiden 2014, jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 2.812.144 jiwa. Dari jumlah tersebut 76,84 persen menggunakan hak pilih dan 23,06 persen golput. Perolehan suara dari jumlah tersebut 98,50 persen suara dinyatakan sah dan 1,50 persen suara tidak sah.

Pada tahun 2015, tercatat jumlah keputusan yang ditetapkan DPRD sebanyak 454 jenis keputusan, terdiri dari 143 jenis hasil keputusan DPRD provinsi dan 311 jenis keputusan DPRD Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Tabel 2.12 menunjukkan rekapitulasi kegiatan DPRD se-D.I.Yogyakarta tahun 2015.

## 2.4. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur.

Indeks Demokrasi Indonesia DI Yogyakarta tahun 2015 sebesar 83,19 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 0,48 poin dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 82,71. Hasil IDI 2014 dan 2015 menunjukkan nilai perubahan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan tersebut membawa DIY masuk kategori “baik”. Sementara itu tingkat demokrasi di DIY berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 masih berada pada kategori “sedang”.

Perkembangan IDI DIY dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (tahun 2009 sebesar 67,55; 2010 sebesar 74,33; 2011 sebesar 71,67; 2012 sebesar 72,96; 2013 sebesar 72,36; 2014 sebesar 82,71 dan 2015 sebesar 83,19). Hal ini menggambarkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, menunjukkan sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

### 2.4.1. Perkembangan Indeks Aspek IDI

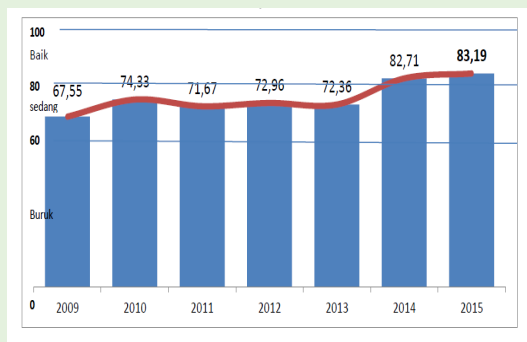
Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2015 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 90,41; aspek Hak-hak Politik sebesar 77,98; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 82,38.

Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, atau “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Kebebasan Sipil merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 aspek kebebasan sipil tetap pada kategori “baik”. Sementara indeks aspek Hak-hak Politik merupakan aspek yang paling rendah dibandingkan aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi. Sejak pengukuran dari 2009 hingga 2013 aspek Hak-Hak Politik berada pada kategori “buruk”, selanjutnya pada tahun 2014 terjadi perubahan dan menembus kategori “sedang” dan bertahan hingga 2015.

Aspek Lembaga Demokrasi pada pengukuran

Gambar 2.10.

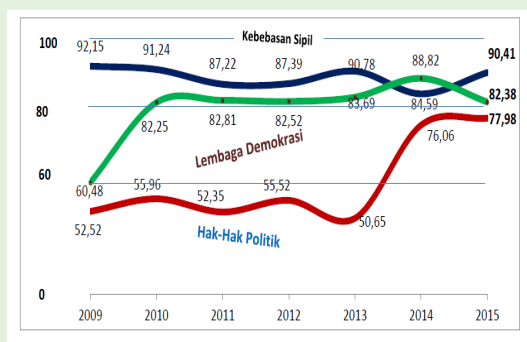
Grafik Perkembangan IDI DIY, 2009-2015



Sumber: BPS

Gambar 2.11.

Grafik Perkembangan Indeks Aspek IDI D.I. Yogyakarta, 2009-2015



Sumber: BPS

2009 berada sedikit di atas ambang batas kategori “sedang”. Sejak 2010 terjadi perubahan dan menembus kategori “baik”. Setelah itu terus bergerak dengan kecenderungan meningkat hingga 2015. Selama kurun waktu 6 tahun IDI dihitung, nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya. Pada tahun 2014 merupakan waktu di mana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 76,07-88,82. Pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2015 rentang nilainya lebih lebar. Ini terjadi karena adanya peningkatan indeks aspek Hak-hak Politik yang cukup bermakna. Pada tahun 2015 indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik mengalami peningkatan masing-masing 5,82 dan 1,64 poin. Sementara indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 6,44 poin.

## 2.4.2. Perkembangan Indeks Variabel IDI

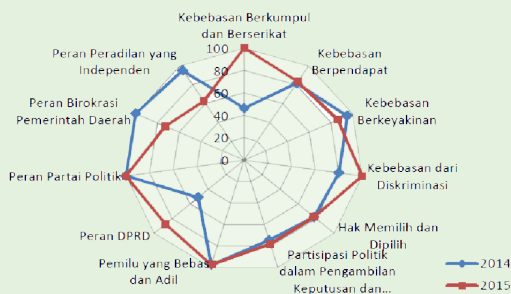
Menurut nilai indeks variabel IDI pada tahun 2015 terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan indeks dan tiga variabel mengalami penurunan. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, tiga di antaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.17. berikut.

Pada Gambar 2.12. terlihat lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, memperlihatkan variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat meningkat paling besar, dari kategori “buruk” tembus menjadi “baik”, yaitu dari 46,25 pada 2014 menjadi 100,00 pada 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Peran DPRD yang meningkat dari 50,96 pada 2014 menjadi 87,33 pada 2015. Selebihnya indeks meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap.

Gambar 2.12. juga menunjukkan indeks variabel Peran peradilan yang independen menurun sangat tajam dari 95,00 pada 2014 menjadi 62,50 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks variabel Peran peradilan yang independen merosot dari kategori “baik” menjadi “sedang”. Penurunan

Gambar 2.12.

Perkembangan Indeks Variabel IDI D.I. Yogyakarta, 2014-2015



Sumber: BPS

nilai indeks juga terjadi pada variabel Kebebasan berkeyakinan (dari 95,13 pada tahun 2014 menjadi 86,28 pada tahun 2015). Variabel peran birokrasi pemerintah daerah juga ada sedikit penurunan nilai indeks, meskipun harus dilihat secara berhati-hati. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran birokrasi pemerintah daerah berubah.

## 2.5. APARATUR NEGARA

### 2.5.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintahan DIY terdiri dari pegawai daerah dan pegawai pusat. Pegawai daerah mencakup semua PNS yang sistem penggajiannya dicakup oleh dana APBD, sementara pegawai pusat mencakup semua PNS yang bekerja di institusi vertikal (perwakilan pemerintah pusat) dan sistem penggajiannya dicakup oleh dana APBN. Jumlah PNS daerah di DIY pada akhir tahun 2014 tercatat sebanyak 57.292 orang yang terdiri dari 28.259 pegawai laki laki (49,3 persen) dan 29.033 pegawai perempuan (50,7 persen). Fakta ini menggambarkan tingkat kesetaraan gender dalam partisipasi di birokrasi/pemerintahan DIY sudah tercapai. Dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah pegawai daerah meningkat sebesar 1,6 persen dan peningkatan yang terbesar terjadi pada pegawai perempuan.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di DIY pada tahun 2015 didukung oleh 55.412 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai pemerintahan tersebar pada lima kabupaten/kota di DIY. Menurut golongan, dari total PNS di DIY, yang menduduki golongan I sebesar 2,07 persen, golongan II sebesar 15,05 persen, golongan III sebesar 47,44 persen, dan selebihnya golongan IV sebesar 35,43 persen.

Berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas PNS daerah DIY merupakan pegawai

Tabel 2.13.

Jumlah PNS Daerah menurut Daerah Penempatan dan Jenis Kelamin di DIY, 2009-2015

Daerah Penempatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	(%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kulonprogo	3.847	49,09	3.989	50,91	7.836	100
2. Bantul	5.022	45,49	6.019	54,51	11.041	100
3. Gunungkidul	5.755	55,93	4.534	44,07	10.289	100
4. Sleman	4.931	42,55	6.658	57,45	11.589	100
5. Yogyakarta	3.465	45,51	4.148	54,49	7.613	100
6. DIY	4.135	58,70	2.909	41,30	7.044	100
Jumlah	27.155	49,01	28.257	50,99	55.412	100
2014	28.259	49,32	29.033	50,68	57.292	100
2013	28.118	49,88	28.251	50,12	56.369	100
2012	31.103	50,88	30.027	49,12	61.130	100
2011	47.646	54,53	39.735	45,47	87.381	100
2010	51.875	52,80	46.377	47,20	98.252	100
2009	52.586	56,02	41.278	43,98	93.864	100

Sumber:

Badan Kepegawaian Negara Regional I, Jawa Tengah & DIY

Tabel 2.14.

Jumlah PNS Daerah menurut Daerah Penempatan dan Golongan di DIY, 2009-2015

Daerah Penempatan	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kulonprogo	165	1.216	3.267	3.188	7.836
2. Bantul	183	1.507	4.947	4.404	11.041
3. Gunungkidul	281	1.695	4.741	3.572	10.289
4. Sleman	149	1.522	5.218	4.700	11.589
5. Yogyakarta	204	1.255	3.668	2.486	7.613
6. DIY	166	1.145	4.449	1.284	7.044
Jumlah	1.148	8.340	26.290	19.634	55.412
2014	1.546	8.706	25.815	21.225	57.292
2013	1.624	9.109	24.292	21.344	56.369
2012	2.104	15.700	38.562	25.618	81.984
2011	2.332	18.189	40.461	26.399	87.381
2010	2.503	20.524	43.545	26.835	93.407
2009	2.650	21.299	44.706	25.209	93.864

Sumber:

Badan Kepegawaian Negara Regional I, Jawa Tengah & DIY

Tabel 2.15.

Jumlah PNS Daerah menurut Daerah Penempatan dan Pendidikan di DIY, Kuartal I 2016

Tingkat Pendidikan	Daerah Penempatan						Jumlah
	Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. SD	87	97	111	80	165	155	695
2. SLTP Umum	198	226	274	213	242	232	1.385
3. SLTP Kejuruan	5	7	12	13	13	37	87
4. SLTA Umum	2.074	2.523	2.301	2.566	1.720	2.277	13.461
5. D-1	68	89	54	93	32	17	353
6. D-II	1.103	1.313	1.363	1.407	558	54	5.798
7. D-III/Sarjana Muda	848	1.295	969	1.304	888	666	5.970
8. D-IV	76	107	85	87	75	117	547
9. Sarjana	3.121	4.949	4.773	5.345	3.642	2.985	24.815
10. Pasca Sarjana	256	435	346	480	278	502	2.297
11. Doktor	0	0	1	1	0	2	4
Jumlah	7.836	11.041	10.289	11.589	7.613	7.044	55.412

Sumber:

Badan Kepegawaian Negara Regional I, Jawa Tengah & DIY

golongan III dengan proporsi 47,44 persen. Komposisi selanjutnya adalah pegawai golongan IV dan II dengan proporsi masing-masing sebesar 35,43 persen dan 15,05 persen. Jumlah pegawai pada golongan I juga masih cukup banyak dengan porsi sebesar 2,07 persen.

Berdasarkan daerah penempatan, proporsi pegawai yang terbanyak ditempatkan di Pemda kabupaten Sleman dan Bantul dengan jumlah masing-masing 20,91 persen dan 19,93 persen. Struktur kepegawaian di lingkungan pemerintahan DIY didominasi oleh pegawai yang berpendidikan tertinggi sarjana dan mayoritas memiliki kepangkatan pada golongan III.

Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, struktur keseluruhan PNS daerah baik Provinsi maupun Kab./Kota didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana/S1 (44,56 persen). Komposisi berikutnya adalah pegawai yang berpendidikan SLTA sederajat dan Diploma I/II/III/IV dengan porsi masing-masing sebesar 24,79 persen dan 22,27 persen. Sementara, jumlah pegawai yang berpendidikan SLTP ke bawah memiliki proporsi sebesar 4,12 persen.

Tabel 2.16.

Jumlah PNS Daerah menurut Daerah Penempatan dan Pendidikan di DIY, Kuartal I 2016

Tingkat Pendidikan	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>1)</sup>	2010 <sup>1)</sup>	2011 <sup>1)</sup>	2012 <sup>1)</sup>	2013 <sup>2)</sup>	2014	2015 <sup>1)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Struktural	704	754	743	780	604	3.317	3.446	3.310
- Eselon I	1	1	1	1	1	1	1	-
- Eselon II	31	36	36	39	30	124	132	121
- Eselon III	160	193	192	194	157	701	692	655
- Eselon IV	512	524	514	546	415	2.414	2.545	3.455
- Eselon V	-	-	-	-	1	77	75	79
Fungsional	1.495	1.442	1.423	1.950	1.833	35.425	33.900	31.940
Pensiunan PNS	321	389	457	386	400	3.706	1.391	1.402

Sumber:

Badan Kepegawaian Negara Regional I, Jawa Tengah & DIY

Berdasarkan daerah penempatannya, maka proporsi pegawai yang terbanyak ditempatkan di Pemda kabupaten Sleman dan Bantul dengan jumlah masing-masing sebesar 20,91 persen dan 19,93 persen. Struktur kepegawaian di lingkungan pemerintahan DIY didominasi oleh pegawai yang berpendidikan tertinggi sarjana dan mayoritas memiliki kepangkatan pada golongan III.

2.5.2. Organisasi Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta

Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/ Walikota dibantu oleh perangkat daerah untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan

Tabel 2.17.  
Jumlah Organisasi Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta, 2008-2015

Tingkat Pendidikan	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>1)</sup>	2010 <sup>1)</sup>	2011 <sup>1)</sup>	2012 <sup>1)</sup>	2013 <sup>2)</sup>	2014	2015 <sup>1)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jumlah Biro	7	7	7	7	7	7	7	7
2. Jumlah Dinas	13	13	13	13	13	13	13	13
3. Jumlah Kantor	1	3	3	3	-	-	-	-
4. Jumlah Badan	11	9	9	9	9	9	10	13
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)	46	46	46	46	62	63	63	63

Sumber:  
Badan Kepegawaian Negara Regional I, Jawa Tengah & DIY

terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat, Dinas dan Badan. Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.



Bab  
3

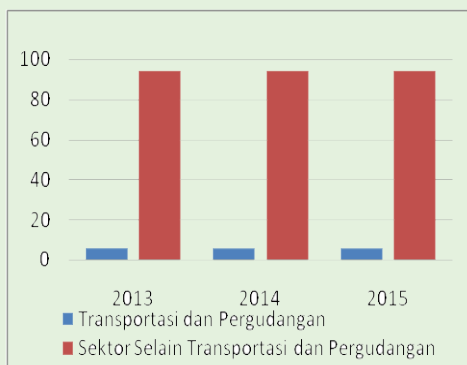
# SARANA DAN PRASARANA



# Bab SARANA DAN PRASARANA

## 3

Gambar 3.1.  
Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha DIY,  
2013-2015



Sumber:  
PDRB DIY menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

Tabel 3.1.  
Kontribusi Lapangan Usaha Transportasi dan  
Pergudangan terhadap PDRB DIY, 2013-2015

Lapangan Usaha	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkutan Rel	0,07	0,09	0,1
Angkutan Darat	3,5	3,52	3,44
Angkutan Laut	-	-	-
Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	-	-	-
Angkutan Udara	0,92	0,96	0,97
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	1,14	1,16	1,17
Transportasi dan Pergudangan	5,63	5,72	5,68

Sumber:  
PDRB DIY menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

### 3.1. PERHUBUNGAN

**P**erhubungan adalah upaya untuk memperpendek waktu tempuh jarak untuk meningkatkan mobilitas atau gerak manusia, barang, dan informasi. Perhubungan tersebut meliputi perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan pos telekomunikasi. Sektor perhubungan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan daerah yaitu untuk mendukung aktivitas perekonomian dan pendistribusian barang dan jasa ke seluruh wilayah.

Kontribusi sektor perhubungan (transportasi dan komunikasi) terhadap total PDRB DIY selama periode 2013-2015 berkisar antara 5 hingga 6 persen. Dalam kurun waktu tersebut kontribusi angkutan dan komunikasi cenderung tetap. Peran angkutan darat terhadap pembangunan ekonomi DIY merupakan yang terbesar dibandingkan angkutan lain, yaitu 3,5 persen pada tahun 2013 menjadi 3,44 persen pada tahun 2015. Sementara itu pergudangan dan jasa angkutan; pos dan kurir memberikan kontribusi sekitar 1 hingga 2 persen selama periode yang sama.

#### Ketersediaan dan Kualitas Jalan

Angkutan jalan raya sebagai bagian terbesar dari sistim transportasi membutuhkan perhatian lebih dalam desain tatakelola. Kelemahan dalam desain tatakelola akan menyebabkan kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, dan kerawanan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan angkutan jalan raya adalah adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak didukung dengan ketersediaan jalan yang memadai. Kondisi lahan yang terbatas

mengakibatkan sebagian badan jalan digunakan sebagai tempat parkir sementara volume kendaraan semakin bertambah merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh kota-kota besar.

Secara administrasi, jalan yang berada di wilayah DIY terbagi menjadi tiga jenis yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Sedangkan secara fungsi, jalanan tersebut dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Panjang jalan negara yang ada di DIY pada tahun 2015 tercatat sepanjang 247,9 km yang terdapat di empat kabupaten. Seluruh permukaan jalan negara tersebut sudah diaspal dan merupakan jalan kelas I serta sekitar 89 persen kondisi yang baik. Sebagian besar jalan negara yang berkondisi baik tersebut berada di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu mencapai sekitar 33,25 persen. Sementara itu sekitar 60,88 persen jalan negara yang dalam kondisi sedang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Dari keseluruhan jalan negara tersebut ada yang berkondisi rusak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Sementara itu kondisi jalan provinsi yang berada di wilayah DIY mencapai panjang hingga 619,44 km. Sama dengan jalan negara yang seluruh permukaannya sudah diaspal, jalan provinsi tersebut juga 100 persen berpermukaan aspal dan merupakan jalan kelas II. Kualitas jalan provinsi tidak sebaik kualitas jalan negara, sekitar 37,37 persen dalam kondisi baik, 6,58 persen dalam kondisi sedang/tidak terlalu baik, dan masih ada 22,87 persen jalan provinsi yang berada di wilayah DIY yang dalam kondisi rusak. Kondisi jalan yang tidak terlalu baik ini tentu saja berdampak pada keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan, disamping juga mengurangi kelancaran arus kendaraan.

Dilihat secara kewilayahan, sebagian besar jalan provinsi tersebut berada di Gunungkidul (34,29 persen), diikuti Kulon Progo (23,51 persen), Sleman (22,35 persen), dan Bantul (19,85 persen). Meskipun sebagian besar jalan provinsi berada di wilayah Gunungkidul namun sekitar 71 persen dalam kondisi sedang dan rusak, hanya 26,12

Tabel 3.2.  
Kondisi Jalan Negara menurut Keadaan Jalan dan Kabupaten/Kota di DIY, 2015 (km)

Kondisi	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Baik	27,45	73,4	56,54	63,33		220,72
Sedang	0,87	4,69	4,54	15,72		25,82
Rusak		0,28		1,1		1,38
Jumlah	28,32	78,37	61,08	80,15	0	247,92

Sumber:  
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY

Tabel 3.3.  
Kondisi Jalan Provinsi menurut Keadaan Jalan dan Kabupaten/Kota di DIY, 2015 (km)

Kondisi	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Baik	48,84	60,6	55,47	66,6		231,51
Sedang	57,1	21,1	94,68	53,7		226,58
Rusak	26,24	41,28	56,04	18,13		141,69
Tidak Dirinci	13,46		6,2			19,66
Jumlah	145,64	122,98	212,39	138,43	0	619,44

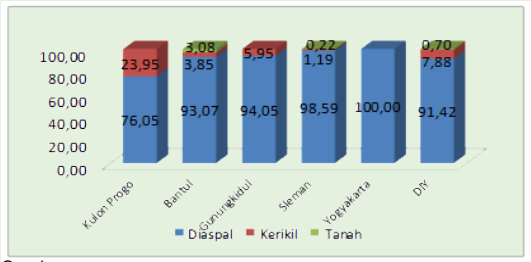
Sumber:  
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY

Tabel 3.4.  
 Persentase Kondisi Jalan menurut Keadaan dan Panjang Jalan Kabupaten/Kota di DIY, 2015

Kondisi dan Panjang Jalan	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kondisi Jalan (%)						
- Baik	80	54,27	69,85	54,26	58,54	64,1
- Sedang	9,79	32,35	7,45	30,81	28,76	20,7
- Rusak	9,22	13,38	9,26	10,3	12,7	10,67
- Tidak Dirinci	1	-	13,44	4,63	-	4,53
Panjang Jalan (km)	647,8	609,44	686	699,5	248,09	2.890,83

Sumber:  
 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY

Gambar 3.2.  
 Jenis Permukaan Jalan Kabupaten/Kota menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015 (persen)



Sumber:  
 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY

Gambar 3.3.  
 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teraftar di DIY, 2006-2015 (unit)



Sumber:  
 Kantor Ditlantas Polda DIY

persen yang kondisinya baik. Di Kabupaten Kulon Progo, jalan provinsi yang kondisinya baik sebesar 33,53 persen dan lebih dari separuh (57,12 persen) dalam kondisi sedang/rusak. Di Kabupaten Bantul, meskipun hampir separuh jalan provinsi tersebut dalam kondisi baik tapi sepertiganya dalam kondisi rusak. Hanya di Kabupaten Sleman yang sebagian kecil jalan provinsinya dalam kondisi rusak.

Sebagai jalan yang berfungsi strategis menghubungkan ibu kota kabupaten/kota dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah maupun antarwilayah, jalan kabupaten juga harus mendapat perhatian dalam hal kenyamanan dan keamanan. Pada tahun 2015 panjang jalan kabupaten/kota yang melintas wilayah DIY mencapai 2.890,83 km, sekitar 64,10 persen jalan tersebut dalam kondisi baik dan 91,42 persen diantaranya sudah dalam kondisi diaspal. Kondisi jalan kabupaten/kota yang cukup baik itu dapat memperlancar arus pendistribusian barang sehingga dapat memperlancar kegiatan ekonomi wilayah.

Selain berdasarkan administrasi, jalan juga dibedakan menurut fungsi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas PUP & ESDM tahun 2015, panjang jalan arteri di DIY mencapai 114,8 km dan panjang jalan kolektor sekitar 727,7 km. Sementara untuk data panjang lokal dan lingkungan sampai tahun 2015 belum tersedia.

### Angkutan Jalan Raya

Populasi kendaraan bermotor terus bertambah secara signifikan. Meningkatnya populasi jumlah kendaraan tersebut dapat menjadi indikasi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin menuntut keberadaan dan peran sektor angkutan.

Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di DIY meningkat sekitar 123,61 persen. Pada tahun 2015, populasi kendaraan bermotor mencapai 2,196 juta unit kendaraan, di mana sekitar 87,26 persen di antaranya berupa sepeda motor. Sepeda motor dipandang sebagai alat transportasi yang relatif murah

yang mampu dijangkau oleh penduduk dengan pendapatan relatif rendah. Dengan menggunakan sepeda motor dapat memudahkan mobilitas hingga wilayah yang tidak dijangkau oleh kendaraan umum. Selain itu mampu mengatasi problem kemacetan yang semakin parah terutama pada jam-jam tertentu. Kemacetan ini juga sebagai imbas semakin meningkatnya jumlah mobil penumpang, yang mencapai 9,41 persen. Peningkatan populasi kendaraan bermotor berakibat juga peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas.

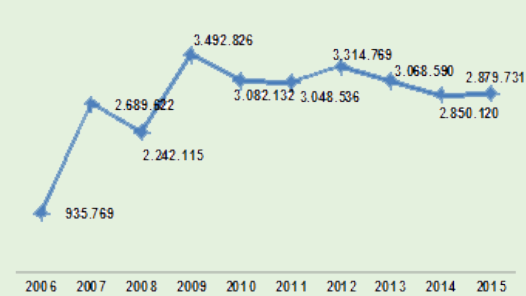
Meningkatnya jumlah penggunaan sepeda motor berimbas pada semakin berkurangnya pengguna angkutan umum sehingga juga berakibat pada berkurangnya jenis angkutan umum. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien, disamping karena jenis layanan angkutan umum yang terbatas. Jumlah angkutan umum pada tahun 2015 sebanyak 984 unit atau turun dari tahun 2014 yang mencapai 1.103 unit. Demikian pula untuk ijin trayek yang dikeluarkan juga menurun dari 33 unit pada 2014 menjadi 26 unit pada tahun 2015.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja operasional angkutan umum adalah load factor (faktor muat). Load factor merupakan rasio perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas tempat duduk penumpang di dalam kendaraan pada periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam persen, jika load factor melebihi angka 1 berarti kinerja operasi angkutan umum semakin buruk. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika DIY diketahui bahwa load factor mencapai sebesar 34,49 persen pada tahun 2013 dan terus meningkat hingga menjadi 39,05 persen pada tahun 2015. Angka load factor yang meningkat menunjukkan penumpang yang terangkut lebih banyak. Dengan demikian pada tahun 2015 pelayanan angkutan umum menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2013.

Angkutan Rel

Tahun 2015 tercatat penumpang moda kereta

Gambar 3.4. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2006-2015



Sumber: Kantor Ditlantas Polda DIY

Tabel 3.5. Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api di DIY, 2013-2015 (orang)

Variabel	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Penumpang (orang)	2.629.513	2.740.104	3.543.139
Barang (ton)	226.921	208.969	199.550

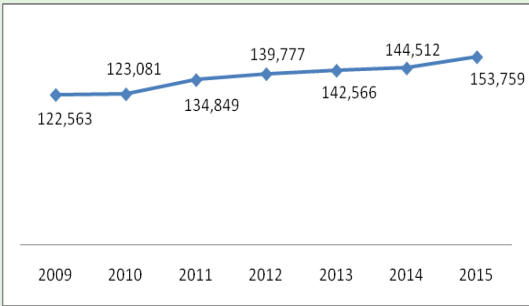
Sumber: PT KAI DAOP IV DIY

Tabel 3.6.  
Arus Lalu Lintas Udara Melalui Bandar Udara  
Adisutjipto di DIY, 2013-2015

Variabel	Dalam Negeri		Luar Negeri	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pesawat				
2013	31.221	31.100	1.301	1.307
2014	21.728	21.739	1.474	1.473
2015	23.171	22.976	1.431	1.428
Penumpang				
2013	2.739.113	2.965.166	165.820	146.561
2014	2.953.337	2.916.673	170.407	170.407
2015	3.019.474	2.966.790	181.772	163.443

Sumber:  
Bandara Adisutjipto Yogyakarta

Gambar 3.5.  
Jumlah Sambungan Telepon Wireline di DIY, 2009-2015



Sumber:  
PT Telkom Wilayah DIY

api sebanyak 3,54 juta orang atau meningkat sebesar 29,31 persen dari tahun sebelumnya. Penumpang tersebut terdiri dari penumpang eksekutif sebanyak 27,69 persen, penumpang bisnis 18,46 persen, dan penumpang ekonomi yang mendominasi hingga mencapai 53,85 persen. Selain penumpang, kereta api juga digunakan untuk angkutan barang terutama BBM dan barang hantaran lainnya. Untuk angkutan barang pada tahun 2015 mencapai 199,6 ribu ton dimana 95,53 persen diantaranya merupakan angkutan BBM. Dengan kepastian waktu tempuh, aman, dan ramah lingkungan, angkutan BBM dengan kereta api bermanfaat untuk mengurangi kemacetan dan polusi.

Jika dilihat pendapatan dari PT Kereta Api DAOP IV DIY tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 35,84 atau tercatat mencapai 700,14 milyar rupiah. Sebagian besar pendapatan tersebut bersumber dari penjualan tiket penumpang sekitar 92,08 persen dan pengiriman barang sebesar 7,92 persen.

### Angkutan Udara

Pada tahun 2015, lalu lintas udara yang melalui Bandar Udara Adisutjipto dipadati oleh 3,02 juta penumpang yang melakukan penerbangan dalam negeri dan 181,77 ribu penumpang yang berangkat melakukan penerbangan luar negeri. Sementara itu penumpang yang datang dari dalam negeri mencapai 2,97 juta penumpang dan yang datang dari luar negeri mencapai 163,44 ribu penumpang. Sebagian besar penumpang dalam negeri tersebut berangkat dan datang dari kota-kota seperti Jakarta, Denpasar, Balikpapan, dan Banjarmasin.

Jumlah pesawat yang melayani rute dalam negeri sempat mengalami penurunan hingga mencapai 30 persen pada tahun 2014 baik itu rute yang berangkat maupun yang datang di Bandar Udara Adisutjipto berangkat ke dalam negeri. Namun kemudian mengalami peningkatan hingga 6,64 persen untuk pesawat yang berangkat dan 5,69 persen untuk pesawat yang datang ke bandara satu-satunya di DIY tersebut. Sementara itu, untuk rute penerbangan luar negeri baik yang berangkat maupun yang datang di Bandar Udara Adisutjipto

pada tahun 2015 ini mengalami penurunan sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

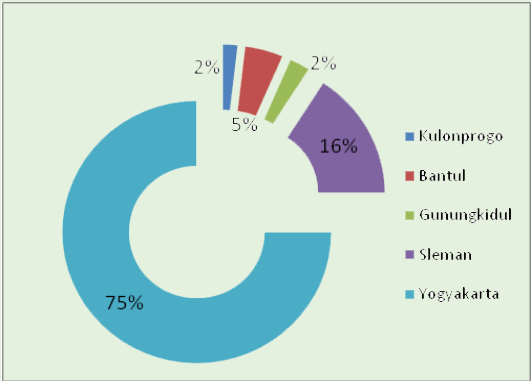
Komunikasi

Transportasi dan komunikasi akan terus berubah seiring perkembangan teknologi. Transformasi di bidang komunikasi telah dilalui dari tahapan penduduk berkomunikasi melalui surat, telegram, telepon tetap, dan sekarang komunikasi lebih banyak dilakukan melalui telepon seluler dan juga internet. Selama kurun waktu 2009-2015, jumlah sambungan telepon tetap (wireline) di DIY mengalami kenaikan dari 122.563 sambungan telepon pada tahun 2009 menjadi 153.759 sambungan telepon pada tahun 2015. Meskipun saat ini penggunaan telepon seluler sudah sangat berkembang dengan pesat namun ternyata penggunaan telepon tetap juga masih diminati. Jika dilihat sebarannya, sekitar 75 persen penggunaan telepon tetap ini berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Kegiatan komunikasi dan penyampaian informasi selain menggunakan media telepon, sekarang ini juga sudah banyak yang memanfaatkan teknologi internet. Dengan media internet, semua informasi tentang apapun dari jaman dahulu hingga kini termuat cukup lengkap di internet. Sebelum maraknya jenis telepon pintar, keberadaan warung internet (warnet) sangat membantu masyarakat dalam mencari informasi. Namun demikian, hingga kini keberadaan warnet masih cukup banyak walaupun sudah mengalami perubahan fungsi. Meskipun masih ada yang memanfaatkan warnet sebagai tempat mencari informasi, tidak sedikit yang menggunakan warnet sebagai tempat untuk bermain game online.

Perkembangan jumlah sarana komunikasi di DIY dari tahun 2013 hingga tahun 2015 tidak mengalami perubahan jumlah, kecuali untuk stasiun TV jejaring yang baru mulai berkembang pada tahun 2015. Sarana komunikasi yang ada di DIY berupa media cetak, stasiun radio, dan stasiun TV. Untuk stasiun TV sendiri sekarang berkembang menjadi stasiun TV lokal yang memancarkan siaran untuk wilayah tertentu, stasiun TV komunitas yang

Gambar 3.6. Distribusi Sambungan Telepon Wireline di DIY, 2015 (persen)



Sumber: PT Telkom Wilayah DIY

Tabel 3.7. Jumlah Warnet di DIY, 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Warnet	168	322	500	416	577

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informatika DIY

Tabel 3.8. Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY, 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Media Cetak	10	10	11
Jumlah Stasiun Radio	65	65	65
Jumlah Stasiun TV	4	4	4
Jumlah Stasiun TV Komunitas	6	6	6
Jumlah Stasiun TV Jejaring	-	-	12

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informatika DIY

Tabel 3.9.  
Target dan Realisasi Tata Ruang di DIY, 2013-2015

Uraian	2013		2014		2015	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan RTRW pada kawasan strategis provinsi	12	12	14	-	16	-
Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan RTRW provinsi	50%	63,93%	60%	64,21%	60%	-
Persentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan dan kawasan lindung bawahan	20%	20%	40%	-	60%	-

Sumber:  
LKPJ DIY, 2012-2014

menampilkan siaran yang spesifik sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut, dan stasiun TV jejaring yang merupakan pengembangan dari sistim televisi kabel berbayar.

### 3.2. TATA RUANG

Tabel 3.10.  
Tata Ruang di DIY, 2013-2015

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Luas Kawasan Pemukiman	Ha	13.722	64.988	64.988
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	n/a	56.686	56.686
Luas Rencana Peruntukan Lahan	Ha	134.087	134.087	134.087
Realisasi RTRW	Ha	n/a	204.572	204.572
Ketaatan Terhadap RTRW	%	n/a	64	64
Luas wilayah perkotaan	Ha	13.722	59.931	59.931
Luas wilayah perdesaan	Ha	n/a	258.649	258.649
Luas Lahan Produktif	Ha	n/a	n/a	n/a
Luas Lahan Kritis	Ha	n/a	n/a	n/a
Luas Lahan Hutan Rakyat	Ha	n/a	n/a	n/a
Luas Wilayah Budidaya	Ha	n/a	n/a	n/a
Luas Kawasan (Hutan dan Bukan Hutan)	Ha	n/a	n/a	n/a
Luas Kawasan Industri	Ha	n/a	n/a	n/a

Keterangan:  
n/a = data tidak tersedia  
Sumber:  
DInas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Pemanfaatan ruang di DIY harus dilakukan sejalan dengan peraturan RTRW dengan harapan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan khususnya lahan pertanian produktif untuk mendukung LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi. RTRW di DIY yang ditetapkan telah merumuskan beberapa penetapan kawasan lindung (lindung bawahan dan lindung setempat), kawasan suaka alam, kawasan suaka margasatwa, serta kawasan rawan bencana.

3.3. Perumahan

Untuk dapat mencapai kesejahteraan, seseorang harus terlebih dahulu terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu berupa kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan papan di sini diartikan sebagai kebutuhan rumah/tempat tinggal. Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf hidup. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Suatu rumah tangga yang berpenghasilan relatif tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan rendah dalam hal kepemilikan rumah sendiri dengan kondisi rumah yang baik dan permanen.

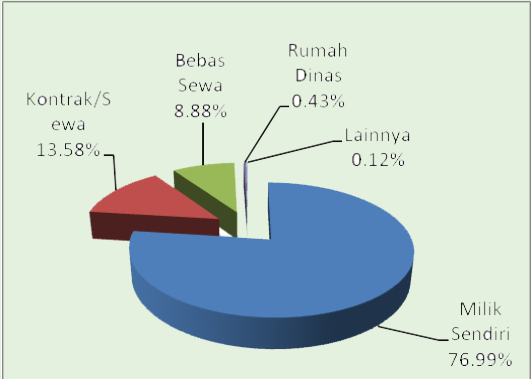
Pada tahun 2015, sekitar 76,99 persen rumah tangga di DIY sudah menempati rumah milik sendiri sedangkan sisanya menempati rumah kontrak/sewa, rumah bebas sewa, rumah dinas, dan lainnya.

Kondisi yang hampir serupa juga terjadi pada periode dua tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa dilihat dari sisi kepemilikan rumah, sebagian besar rumah tangga di DIY sudah cukup sejahtera.

Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, rumah memiliki syarat-syarat kelayakan sebagai tempat hunian. Rumah dikategorikan tidak layak huni jika memiliki kriteria:

- 1. Luas lantai perkapita < 4m2 (perkotaan) dan < 10 m2 (perdesaan).
- 2. Jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya.
- 3. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu atau lainnya

Gambar 3.7.  
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di DIY, 2015



Sumber:  
BPS, Susenas 2015

Tabel 3.11.  
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Rumah dan Sanitasi di DIY, 2013-2015

Karakteristik Rumah	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Atap layak	96,79	97,85	96,84
Dinding permanen	89,73	91,61	92,26
Lantai bukan tanah	93,67	93,00	94,68
Jamban	92,63	92,47	94,16
Penerangan listrik	99,58	99,58	99,82
Sumber Air Minum	90,67	90,61	92,22
Air bersih	74,83	71,9	73,46

Sumber:  
BPS, Susenas 2013-2015

4. Jenis lantai tanah
5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (WC) sendiri
6. Sumber penerangan bukan listrik
7. Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan kotoran/tinja kurang dari 10 meter.

Di samping kepemilikan rumah, kelayakan rumah juga masih menjadi permasalahan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Berdasarkan karakteristik rumah layak huni, dapat dikatakan bahwa sebagian besar rumah tangga di DIY sudah memiliki rumah tinggal yang termasuk kategori layak huni. Sebagian besar rumah tangga tersebut telah memiliki rumah beratap beton dan genteng, berdinding tembok, dan lantai bukan tanah. Selain itu sebagian besar rumah tangga di DIY juga telah menggunakan penerangan listrik dan memanfaatkan air kemasan, ledeng, pompa, dan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air minum. Dalam hal sanitasi, warga sudah semakin sadar untuk berperilaku hidup sehat sehingga sebagian besar sudah menyediakan fasilitas buang air besar sendiri dengan menggunakan kloset leher angsa dan menggunakan tangki septik sebagai pembuangan akhir kotoran/tinja yang dibuat dengan jarak lebih dari 10 meter dari sumber air minum. Jarak yang cukup jauh tersebut untuk menjaga kelayakan kualitas air untuk keperluan rumah tangga.

Secara kewilayahan, sebagian besar rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di DIY pada tahun 2015 sudah menghuni rumah tinggal yang memenuhi kriteria layak huni. Pada tahun tersebut persentase rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman sudah mencapai lebih dari 99,0 persen yang menggunakan beton dan genteng untuk jenis atap terluas, sedangkan sisanya menggunakan asbes. Untuk Kabupaten Bantul dan Gunungkidul, sekitar 96,6 persen rumah tangga menempati rumah dengan atap terluasnya menggunakan beton dan genteng, sisanya menggunakan seng dan asbes. Sementara itu, persentase rumah tangga yang jenis atap terluasnya memenuhi kriteria layak untuk Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan empat kabupaten di DIY yaitu sekitar 92,8 persen. Rumah

tangga pengguna atap terluas dari asbes di wilayah Kota Yogyakarta paling tinggi dibandingkan wilayah lain yaitu mencapai 4,7 persen.

Rumah tinggal dikatakan layak huni salah satunya jika mempunyai dinding permanen terbuat dari tembok atau diplester dengan kontruksi yang baik. Kondisi rumah yang baik dan permanen memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penghuninya. Meskipun saat ini ada juga rumah tangga yang membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bambu kualitas terbaik demi alasan keindahan dan keartistikan namun jumlahnya relatif sedikit. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga terbanyak yang telah menempati rumah dengan dinding tembok adalah Kabupaten Sleman yaitu mencapai 99,16 persen, kemudian diikuti rumah tangga di Kota Yogyakarta (96,53 persen) dan Kabupaten Bantul (95,46 persen). Sementara itu rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih berkisar antara 79 hingga 80 persen yang menghuni rumah berdinding tembok. Masyarakat di kedua kabupaten tersebut hingga kini masih cukup banyak yang bertahan untuk menggunakan bambu sebagai dinding rumah. Selain karena prinsip hidup, faktor geografis tempat tinggal yang jauh dari keramaian dan faktor ekonomi juga mempengaruhi lambatnya arus modernisasi dalam pembangunan perumahan yang diidentikkan dengan rumah dinding tembok.

Jenis lantai rumah selain merupakan kriteria kelayakan, juga menentukan kondisi kesehatan rumah tangga. Lantai bukan tanah dianggap lebih baik daripada lantai tanah. Namun demikian, selain kesadaran dan pengetahuan yang baik akan pentingnya rumah sehat, kondisi fisik rumah tinggal juga ditentukan oleh perekonomian rumah tangga. Oleh karena itu, semakin baik keadaan ekonomi rumah tangga maka kondisi rumah yang ditempati juga semakin baik kualitasnya.

Pada tahun 2015, rumah tangga di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta yang menempati rumah tinggal dengan lantai terluas bukan tanah mencapai lebih dari 94,9 persen. Sementara untuk Kabupaten Kulon Progo

Tabel 3.12.  
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Rumah di DIY, 2015

Karakteristik Rumah	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Atap layak	99,11	96,62	99	96,66	92,78	96,84
Dinding permanen	80,22	95,46	79,45	99,16	96,53	92,26
Lantai bukan tanah	86,08	94,96	87,93	99,15	99,44	94,68

Sumber:  
BPS, Susenas 2015

Tabel 3.13.  
Luas Wilayah Kumuh Menurut Kabupaten/Kota di DIY,  
2014

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
(1)	(2)
Kulon Progo	32,61
Bantul	27,29
Gunungkidul	32,61
Sleman	41,41
Yogyakarta	278,7
Jumlah	412,62

Sumber:  
Kabupaten/Kota di DIY dan DPU-P, dan ESDM DIY, 2014

Tabel 3.14.  
Sebaran Rusunawa di DIY, 2013

Kabupaten/ Kota	Twin Blok	Unit
(1)	(2)	(3)
Kulon Progo	2	192
Bantul	7	672
Sleman	13	1.228
Yogyakarta	6	524
Jumlah	28	2.616

Sumber:  
Dinas PU-P, dan ESDM DIY, 2014

dan Kabupaten Gunungkidul masih berkisar antara 86 hingga 87 persen rumah tangga yang menghuni rumah dengan lantai terluasnya bukan tanah. Jika dikaitkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing wilayah di DIY, dapat dikatakan kondisi tersebut cukup relevan dimana PDRB Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga wilayah lain di DIY.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Pertumbuhan penduduk terutama di wilayah perkotaan dan urbanisasi yang kian meningkat menimbulkan pertambahan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal yang cukup besar pula sehingga membuat harga tanah juga ikut melambung. Harga tanah di perkotaan yang tinggi akan membuat kebutuhan rumah menjadi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Akibatnya mereka akan mendirikan rumah-rumah liar di lahan kosong yang pada akhirnya justru menimbulkan masalah baru yaitu munculnya kawasan kumuh. Sebagian besar wilayah kumuh berada di Kota Yogyakarta dan biasanya berada di sepanjang bantaran sungai yang membelah kota Yogyakarta tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan demi menyediakan rumah sehat dan layak huni, pemerintah menyadari pentingnya pembangunan perumahan vertikal khususnya di daerah perkotaan yang pada umumnya mempunyai keterbatasan lahan. Pembangunan rumah susun tersebut untuk menggantikan pemukiman kumuh yang biasanya terjadi di pusat-pusat kota. Sampai dengan tahun 2013 pemerintah DIY telah berhasil membangun 28 twin blok rusunawa dengan kapasitas sekitar 2.616 unit. Sejumlah rusunawa tersebut tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sebagian besar unit rusunawa tersebut berada di wilayah Sleman yang mencapai hingga 46,94 persen dari keseluruhan unit yang ada di DIY.

### 3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang energi dan sumber daya mineral memegang peranan penting dalam pembangunan.

Energi dan sumber daya mineral berperan sebagai penyedia sumber energi, sumber bahan baku industri, penerimaan daerah, pendukung pengembangan wilayah, dan pendorong pertumbuhan sektor lain.

Listrik

Saat ini DIY belum memiliki sistim pembangkit listrik berskala besar dan masih berada dalam sistim interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali sehingga listrik yang didistribusikan dari DIY berasal dari pembangkit listrik dari provinsi lain. Pada tahun 2015, jumlah pelanggan listrik mencapai 1.034 ribu unit atau meningkat sebesar 6,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pelanggan listrik tersebut didominasi oleh rumah tangga yang mencapai 92,03 persen dan hanya sebagian kecil pelanggan dari pelaku industri (0,06 persen), sedangkan sisanya merupakan pelaku usaha dan umum.

Jumlah produksi listrik yang terpasang dan terjual pada tahun 2015 mencapai 1.448,87 juta KWH dan 2.484,15 juta KWH. Jumlah listrik yang terjual tersebut meningkat sebesar 4,83 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Energi listrik yang terjual tersebut dikonsumsi oleh rumah tangga sekitar 55,41 persen, unit usaha sebesar 22,89 persen, industri 9,57 persen, dan sekitar 12,12 persen diserap oleh pelanggan umum yang terdiri dari pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

Selain dari PLN, data penggunaan listrik oleh rumah tangga juga diperoleh dari data Susenas. Selama kurun waktu 2013-2015 persentase rumah tangga pengguna listrik menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2013 tercatat sekitar 99,62 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Persentase tersebut sedikit menurun menjadi 99,58 persen pada tahun 2014 dan kembali meningkat menjadi 99,70 persen pada tahun 2015. Sementara itu jika dilihat dari besaran rasio ketersediaan daya listrik semakin meningkat, dari 80,6 persen pada tahun 2013 menjadi 82,7 persen pada tahun 2015.

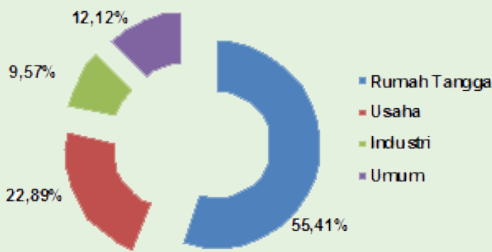
Mengingat kebutuhan akan listrik yang semakin meningkat, sekarang ini mulai

Tabel 3.15.  
Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terpasang, dan Terjual di DIY, 2013-2015

Tahun	Pelanggan (unit)	Produksi (KWH)	Terpasang (KWH)	Terjual (KWH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	935.821	2.391.821.388	1.234.927.074	2.205.797.164
2014	972.327	2.551.650.008	1.320.489.674	2.369.612.713
2015	1.033.966	2.655.966.471	1.448.866.374	2.484.153.383

Sumber:  
PLN Yogyakarta

Gambar 3.8.  
Persentase Listrik yang Terjual Menurut Jenis Pelanggan dan Unit Pelayanan di DIY, 2015



Sumber:  
PLN Yogyakarta

Tabel 3.16.

Jenis Sumber Energi Terbarukan dan Kapasitas yang Dihasilkan di DIY, 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PLTS			
Jumlah (unit)	926	926	926
Kapasitas (Kva/Kwh)	204	204	204
2. PLTMH			
Jumlah (unit)	7	7	7
Kapasitas (Kva/Kwh)	101	111	111

Sumber:

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY

Tabel 3.17.

Produksi dan Jumlah Perusahaan Pertambangan di DIY, 2013-2015

Jenis Bahan Galian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Gamping			
Produksi Kapur (ton)	5.400	3.389	13.543
Jumlah Perusahaan (unit)	1	2	2
Andesit			
Produksi Andesit (ton)	83.270	6.000	45.072
Jumlah Perusahaan (unit)	14	20	11
Pasir			
Produksi Pasir (ton)	1.320.704	100.000	520.495
Jumlah Perusahaan (unit)	0	35	3

Sumber:

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY

dikembangkan sumber energi yang dapat diperoleh ulang atau terbarukan. Sumber energi terbarukan, atau yang lebih dikenal dengan istilah EBT, adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global seperti pada sumber-sumber tradisional lain. EBT tersebut bisa bersumber antara lain dari aliran air dan air terjun, bioenergi, panas bumi, radiasi sinar matahari, gerakan angin, dan perubahan suhu lapisan laut. Sampai tahun 2015 DIY juga sudah mulai mengembangkan dan memanfaatkan EBT yang di antaranya diperoleh dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

## Pertambangan

Sumber daya mineral atau tambang yang ada di DIY adalah termasuk dalam Bahan Galian C antara lain pasir, kerikil, batu gamping, dan andesit. Sementara itu untuk sektor migas, DIY tidak mempunyai deposit sumber daya energi fosil sehingga pasokan migas berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian DIY juga relatif kecil. Berdasarkan data PDRB harga berlaku pada tahun 2013 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa pertambangan dan penggalian berkontribusi rata-rata sekitar 0,57 persen.

Potensi sumber daya mineral yang banyak terdapat di DIY adalah pasir yang berasal dari erupsi Gunung Merapi. Pada tahun 2013 produksi pasir mencapai hingga 1.321 ribu ton, menjadi hanya 100 ribu ton pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi 520 ribu ton pada tahun 2015. Selain pasir, ada juga penggalian batu andesit yang produksinya mencapai 45 ribu ton pada tahun 2015 dengan jumlah perusahaan mencapai 11 unit dan penggalian batu gamping dengan produksi mencapai 13,5 ribu ton dengan 2 unit perusahaan pada tahun 2015. Jika lokasi penggalian pasir ini berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi, maka untuk batu andesit banyak terdapat di Kabupaten Kulon Progo sementara batu gamping di Kabupaten Gunungkidul.

3.5. Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan dasar utama bagi kehidupan sehingga sumber daya air harus memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Sumber daya air bisa dilihat dari tiga unsur, yaitu ketersediaan air bersih, kemudahan akses, dan distribusi.

Pada tahun 2015 jumlah perusahaan air bersih di DIY sebanyak enam perusahaan, terdiri dari lima perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan satu perusahaan lainnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Air bersih yang dihasilkan mencapai 46,24 juta m3 pada tahun 2015. Air bersih yang dihasilkan tersebut sumber utamanya mengambil dari air tanah sekitar 64,28 persen. Selain itu perusahaan juga memanfaatkan mata air (22,48 persen), air sungai (11,18 persen) dan air waduk (2,05 persen) untuk diolah sebagai air bersih.

Jumlah pelanggan dari perusahaan air selama kurun waktu 2013 hingga 2015 terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih. Pada tahun 2013 jumlah pelanggan mencapai 133,12 ribu dan pada tahun 2015 menjadi 150,21 ribu atau rata-rata meningkat 6,22 persen per tahun. Berdasarkan kelompok pelanggan, selama periode tersebut kelompok non niaga (rumah tangga dan instansi) merupakan pelanggan terbesar, yaitu sekitar 95,08 persen dengan penyerapan air yang disalurkan mencapai 92,36 persen.

Air selain sebagai sumber kehidupan, ketersediaannya dalam suatu perumahan juga merupakan aspek penunjang kesehatan. Menurut data Susenas, air minum bersih merupakan air minum yang bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Pada tahun 2015 tercatat sekitar 92,23 persen rumah tangga di DIY telah menggunakan sumber air minum bersih. Sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah sumur/mata air terlindung.

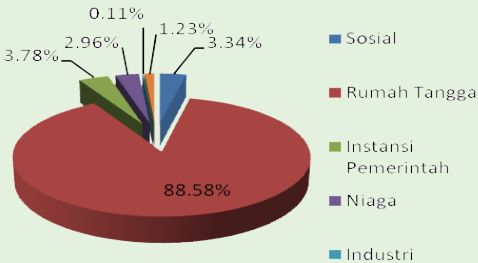
Kualitas sumber air bersih rumah tangga

Tabel 3.18. Banyaknya Pelanggan Perusahaan Air Bersih Menurut Kategori Pelanggan di DIY, 2013-2015

Kategori Pelanggan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial	2.856	3.054	2.822
Rumah Tangga	124.500	131.582	140.663
Instansi Pemerintah	2.042	2.101	2.153
Niaga	2.737	3.032	3.127
Industri	42	39	40
Khusus	944	983	1.406
Jumlah	133.121	140.791	150.211

Sumber:  
Statistik Air Bersih DIY, 2015

Gambar 3.9. Persentase Air Bersih yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan di DIY, 2015



Sumber:  
Statistik Air Bersih DIY, 2015

Tabel 3.19. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di DIY, 2013-2015

Tahun	Sumber Air Minum					
	Air Kemasan	Ledeng	Pompa	Sumur/Mata Air Terlindung	Sumur/Mata Air Tidak Terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	17,99	8,93	6,68	57,07	5,98	3,35
2014	21,29	8,76	7,42	53,14	5,81	3,58
2015	22,31	11,45	8,55	49,93	3,35	4,43

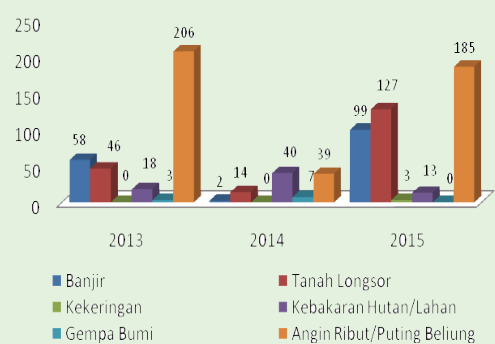
Sumber:  
BPS, Susenas 2013-2015

Tabel 3.20.  
 Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran di DIY, 2013-2015

Kategori Pelanggan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial	2.856	3.054	2.822
Rumah Tangga	124.500	131.582	140.663
Instansi Pemerintah	2.042	2.101	2.153
Niaga	2.737	3.032	3.127
Industri	42	39	40
Khusus	944	983	1.406
Jumlah	133.121	140.791	150.211

Sumber:  
 BPS, Susenas 2013-2015

Gambar 3.10.  
 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Jenis Bencana di DIY, 2013-2015



Sumber:

salah satunya dipengaruhi oleh jarak sumber air minum dengan tempat penampungan kotoran. Sumber air minum dikatakan layak jika sumber air tersebut berjarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan kotoran. Jarak yang cukup jauh tersebut untuk menghindari terjadinya perembesan yang dapat mengakibatkan tercemarnya sumber air minum. Selama periode 2013 hingga 2015 ada lebih dari 70 persen rumah tangga menggunakan sumber air minum dengan jarak lebih dari 10 meter dari penampungan kotoran. Meskipun demikian persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dengan jarak kurang dari 10 meter mengalami peningkatan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perumahan sehingga jarak penampungan dengan sumber air minum semakin dekat.

### Bencana Alam

Kondisi alam DIY yang variatif mengakibatkan wilayah ini mempunyai potensi yang bervariasi pula, baik potensi sumber daya maupun potensi bencana. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kesalahan dalam memanfaatkan sumber daya alam justru akan mengakibatkan bencana, meskipun bencana juga bisa timbul akibat faktor alam itu sendiri. Bencana yang terjadi dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian material, maupun dampak psikologis. Bencana alam yang sering terjadi di DIY antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, dan angin ribut.

Terkait dengan potensi bencana alam, penanggulangan bencana memegang peranan yang sangat penting, baik pada saat sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, bencana dapat dilihat sebagai interaksi antara ancaman bahaya dengan kerentanan masyarakat, dan kurangnya kapasitas untuk menangkalnya. Penanggulangan bencana diarahkan pada bagaimana

mengelola risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Selama kurun waktu 2013 hingga 2015 telah terjadi banyak bencana alam yang mengakibatkan kerugian baik korban jiwa maupun kerugian material yang tidak sedikit jumlahnya. Bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah bencana angin ribut/puting beliung, selain itu juga bencana banjir dan tanah longsor. Pada tahun 2013 sebanyak 331 kejadian bencana alam terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2014 kejadian bencana tidak sebanyak tahun sebelumnya (102 kejadian) tetapi tahun 2015 bencana justru lebih sering terjadi (427 kejadian).

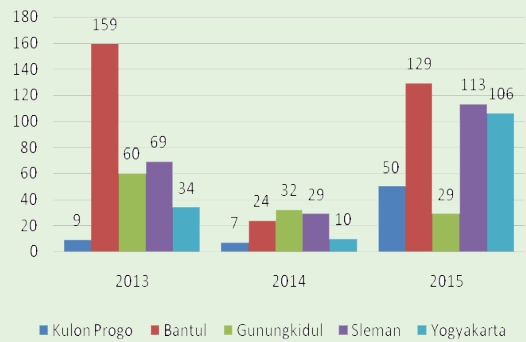
Bencana alam yang terjadi tersebut selain menimbulkan kerugian material juga ada yang menimbulkan korban jiwa baik korban menderita maupun korban meninggal. Pada tahun 2013, estimasi kerugian material yang ditimbulkan akibat bencana alam tersebut mencapai hingga 233,8 juta rupiah terutama akibat bencana angin ribut/puting beliung. Sementara korban menderita sebanyak 88 kepala keluarga akibat bencana banjir dan satu orang meninggal akibat angin ribut/puting beliung.

Pada tahun 2014 estimasi kerugian material akibat bencana mencapai 42,46 miliar rupiah terutama akibat kebakaran hutan/lahan, selain juga karena tanah longsor dan angin ribut/puting beliung. Korban menderita sebanyak 8 kepala keluarga, sedangkan korban meninggal sebanyak 6 orang. Sementara bencana alam yang terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan kerugian mencapai 559,5 juta rupiah dan korban menderita sebanyak 19 kepala keluarga sedangkan korban meninggal mencapai 9 orang.

Dilihat secara kewilayahan, bencana alam terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2013 sebagian bencana alam di DIY terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, demikian juga pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2014 bencana alam lebih sering terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

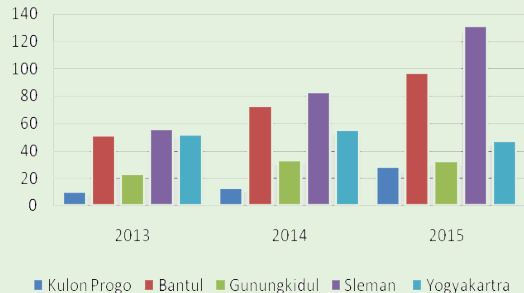
Selain bencana kebakaran hutan/lahan,

Gambar 3.11.  
Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013-2015



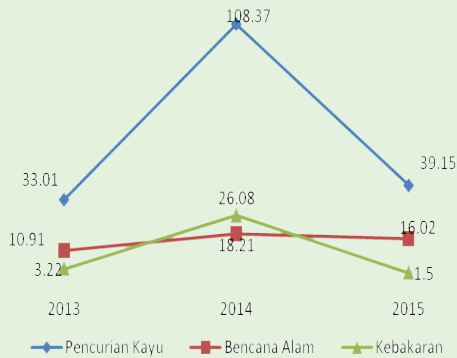
Sumber:

Gambar 3.12.  
Jumlah Kebakaran di DIY, 2013-2015



Sumber: Kantor Dinas Kebakaran Kabupaten/Kota di DIY

Gambar 3.13.  
Jumlah Kerugian Menurut Jenis Kerusakan Hutan di  
DIY, 2013-2015 (juta Rp)



Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

kebakaran juga bisa menimpa rumah rakyat/dinas, perusahaan/toko, kendaraan, dan lainnya. Selama periode 2013-2015, kejadian kebakaran di DIY semakin meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya terjadi sebanyak 192 kejadian, maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 257 kejadian dan 335 kejadian pada akhir 2015. Kerugian harta terbanyak terjadi pada tahun 2014 mencapai 57,87 milyar rupiah dan korban meninggal terbanyak pada tahun 2013 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Sebagian besar kejadian kebakaran tersebut menimpa rumah rakyat yaitu sekitar 36-43 persen.

### Pencemaran Lingkungan

Selain bencana alam, pencemaran juga menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan berasal dari berbagai sumber, baik sebagai akibat dari aktivitas atau proses alam maupun akibat dari kegiatan manusia. Bencana alam seperti banjir dan letusan gunung berapi yang mengeluarkan partikel debu dapat mencemari air, udara, dan tanah/lahan. Selain bencana alam, kegiatan rumah tangga dan perorangan, kegiatan industri, pertanian, dan transportasi juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran akibat aktivitas manusia tersebut berlangsung terus menerus dan berdampak luas.

Salah satu pencemaran lingkungan yang terjadi di DIY adalah kerusakan hutan yang terjadi akibat bencana alam, kebakaran, dan juga pencurian kayu hutan. Luas kawasan hutan di DIY mencapai 18.715 hektar yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Sekitar 80 persen kawasan hutan tersebut berada di Kabupaten Gunungkidul, yang sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan di Gunungkidul tersebut selain berfungsi untuk keseimbangan alam juga mempunyai potensi pariwisata. Namun demikian, kerusakan hutan juga banyak terjadi di wilayah tersebut. Selama periode 2013-2015, kerusakan hutan terus terjadi di Gunungkidul baik akibat bencana alam, kebakaran, maupun akibat pencurian kayu. Kasus pencurian kayu

merupakan kasus memberikan kerugian material cukup besar. Pada tahun 2013 sebanyak 181 pohon telah dicuri di kawasan ini, meningkat menjadi 344 pohon pada tahun 2014 dan menurun menjadi 222 pohon pada tahun 2015. Akibat pencurian tersebut, Kabupaten Gunungkidul mengalami kerugian hingga 105,3 juta rupiah. Sementara itu kebakaran hutan di Gunungkidul pada tahun 2014 memberikan dampak kerusakan hutan hingga mencapai 95 hektar dengan kerugian material sebanyak 25,68 juta rupiah.

Bab

4

# SOSIAL DAN BUDAYA



# Bab SOSIAL DAN BUDAYA

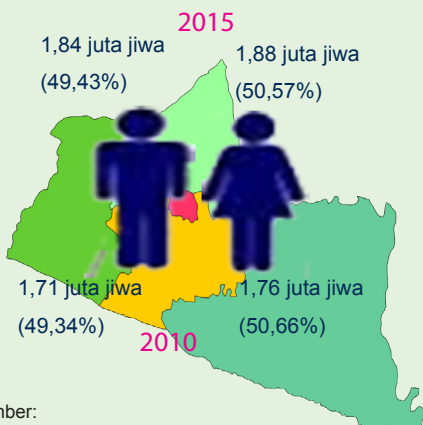
## 4

Tabel 4.1.  
Jumlah Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta menurut  
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2010

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	132.469	125.057	257.526
5-9	131.755	125.178	256.933
10-14	129.046	124.261	253.307
15-19	145.159	141.482	286.641
20-24	152.326	145.167	297.493
25-29	140.362	137.084	277.446
30-34	131.620	132.589	264.209
35-39	129.685	133.387	263.072
40-44	126.486	133.661	260.147
45-49	115.195	124.080	239.275
50-54	99.926	104.780	204.706
55-59	78.702	81.485	160.187
60-64	58.154	65.707	123.861
65-69	47.418	57.139	104.557
70-74	41.511	51.206	92.717
75+	51.120	74.292	125.412
Jumlah	1.710.934	1.756.555	3.467.489

Sumber:  
BPS, Sensus Penduduk 2010

Gambar 4.1.  
Penduduk D.I. Yogyakarta menurut Jenis Kelamin,  
2010 dan 2015



Sumber:  
BPS D.I.Yogyakarta

### 4.1. KEPENDUDUKAN DAN KB

Pembahasan analisis sosial merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 yaitu suatu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kawasan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan analisis sosial meliputi beberapa bidang pendukungnya, yaitu bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, pendapatan, kesejahteraan, dan lainnya. Bidang kesejahteraan dan pendapatan tidak diulas dalam bab ini karena akan dikaitkan dengan dimensi kewilayahan. Analisis kependudukan adalah analisis yang dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi, kondisi serta komposisi penduduk yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan penyebaran penduduk dan untuk memperoleh gambaran situasi dan kondisi objektif dari berbagai perencanaan pengembangan/pemberdayaan masyarakat.

Gambaran potensi kependudukan dari sisi kuantitas dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu: komposisi penduduk, rasio ketergantungan, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan persebaran penduduk, serta rasio jenis kelamin. Potensi penduduk dari sisi kualitas dapat dilihat melalui indikator-indikator kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, sosial lainnya.

#### Komposisi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Definisi penduduk berdasarkan konsep yang sudah dibakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dalam Sensus Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi

bertujuan menetap. Penduduk D.I. Yogyakarta adalah semua orang yang berdomisili di wilayah administrasi D.I. Yogyakarta selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili di wilayah D.I. Yogyakarta kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Penduduk D.I. Yogyakarta hasil sensus terakhir BPS, yaitu Sensus Penduduk 2010, sebanyak 3,47 juta jiwa terdiri dari 1,71 juta jiwa laki-laki dan 1,76 jiwa perempuan. Penduduk D.I. Yogyakarta tahun 2015 hasil proyeksi penduduk yaitu sebanyak 3,72 juta jiwa yang terdiri dari 1,84 juta jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 49,43 persen, dan 1,88 juta jiwa penduduk perempuan atau sebesar 50,57 persen.

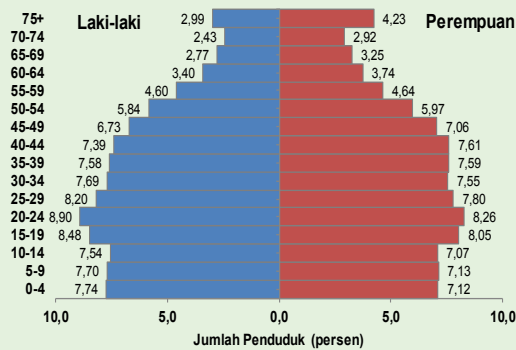
Komposisi penduduk D.I. Yogyakarta bila dibuat grafik piramida masih cenderung berbentuk piramida penduduk muda meskipun tidak kerucut. Artinya penduduk D.I. Yogyakarta masih mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Namun tingkat kelahiran dan kematian relatif terkendali karena persentase penduduk tidak lagi dominan di kelompok umur anak. Demikian pula kelompok umur tua terlihat persentasenya sudah tidak rendah lagi.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio/DR*)

Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio* - DR) mempunyai arti bahwa pada setiap 100 orang penduduk DIY yang produktif secara ekonomis (umur 15-64 tahun) harus menanggung sejumlah penduduk nonproduktif yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas. Makna naik turunnya angka DR bisa dilihat dari sisi kuantitas jumlah penduduk dan juga bisa ditinjau dari dampak nilai ekonomi yang menyertainya.

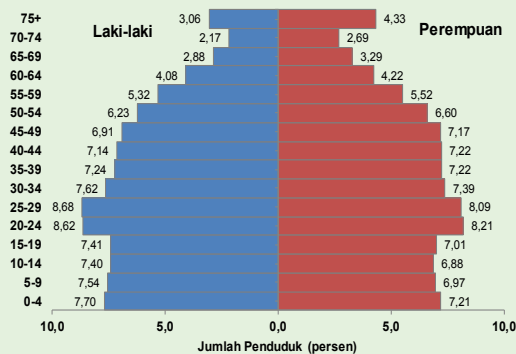
Sejak tahun 2010 hingga 2015, angka beban tanggungan penduduk DIY belum mengalami perubahan yang nyata. Pada tahun 2015 angka DR

Gambar 4.2.  
Piramida Penduduk D.I. Yogyakarta, 2010



Sumber:  
Diolah dari Hasil Sensus Penduduk 2010

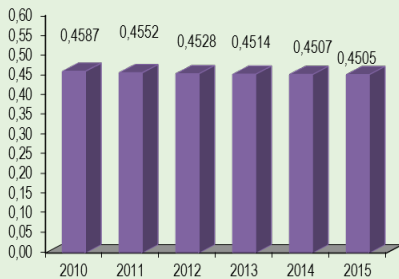
Gambar 4.3.  
Piramida Penduduk D.I. Yogyakarta, 2015



Sumber:  
Diolah dari Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta

Gambar 4.4.

Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY, 2010-2015



Sumber:

Diolah dari Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta

sebesar 45,0 sedikit lebih rendah dibanding angka DR tahun 2010 yang sebesar 45,9. Penurunan angka DR yang hanya sekitar 0,9 poin tersebut mengindikasikan bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif secara jumlah hanya berkurang 1 orang.

Angka DR DIY masih tergolong tinggi, karena di atas 41. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif masih banyak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/tidak produktif.

Hal ini lebih lanjut menjadi bahasan yang menarik bila dikalkulasi menurut sudut pandang ekonomi karena akan mempengaruhi kesejahteraan penduduk. Oleh karenanya meskipun pencapaian penurunan angka DR DIY relatif kecil namun telah memberi kontribusi terhadap optimalisasi penggunaan anggaran pembangunan yang menggerakkan atau mendukung aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Pada tahun 2014 angka DR sebesar 45,07 turun menjadi 45,05 di tahun 2015, atau dalam setahun penurunan angka DR sekitar 0,02 poin. Meskipun penurunan angka DR tersebut relatif kecil namun bila dikalkulasi secara ekonomi anggaran pembangunan yang bisa lebih dioptimalkan cukup besar. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, usia produktif DIY tahun 2015 sebanyak 2.536.556 orang. Dengan mengambil makna dari penurunan setiap poin angka DR maka sejumlah penduduk usia produktif tersebut beban tanggungannya berkurang sebanyak 507 orang. Data rata-rata pengeluaran per kapita setahun penduduk DIY berdasarkan hasil Susenas Maret 2015 adalah sebesar Rp11.143.226, sehingga anggaran yang bisa dialihkan oleh karena berkurangnya angka DR tersebut sekitar 5,7 miliar rupiah. Suatu nilai yang cukup besar untuk dialokasikan ke program pembangunan ekonomi, atau perbaikan sarana dan prasarana umum yang akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, maupun juga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Meskipun demikian realitas permasalahannya

memang tidak sesederhana itu saja. Sebab, bila dikaitkan dengan permasalahan ketenagakerjaan ternyata menjadi rumit dan kompleks, misalnya bahwa tidak semua angkatan kerja mempunyai kesempatan kerja atau tertampung di suatu lapangan pekerjaan. Lebih jauh, masalah ketenagakerjaan akan dibahas di subbab tersendiri dalam bab ini.

Laju Pertumbuhan Penduduk

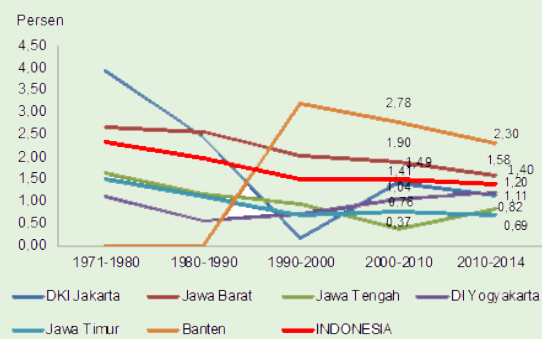
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Indikator laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dihitung berdasarkan data hasil sensus penduduk yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali dan juga hasil survei penduduk antarsensus yang dilaksanakan di pertengahan periode antarsensus. Penghitungan laju pertumbuhan penduduk menggunakan formula geometrik dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya dalam jangka waktu periode antarsensus.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu permasalahan sosial yang menarik perhatian karena bila pertumbuhan penduduk berlebih akan menimbulkan banyak pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Laju pertumbuhan penduduk D.I. Yogyakarta 2000-2010 sebesar 1,04 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 terhadap tahun 2010 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 1,19 persen. Meskipun peningkatan laju pertumbuhan tersebut hanya 0,15 poin tetapi dampak keterkaitan sosial dan ekonominya cukup luas karena menyangkut penambahan penduduk rata-rata 41,34 ribu jiwa per tahun. Laju pertumbuhan tersebut lebih lambat dibanding laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,49 persen, namun masih lebih cepat dibanding dua provinsi lain di Jawa yaitu Jawa Tengah yang tumbuh 0,37 persen dan Jawa Timur sebesar 0,76 persen

Sebaran Penduduk

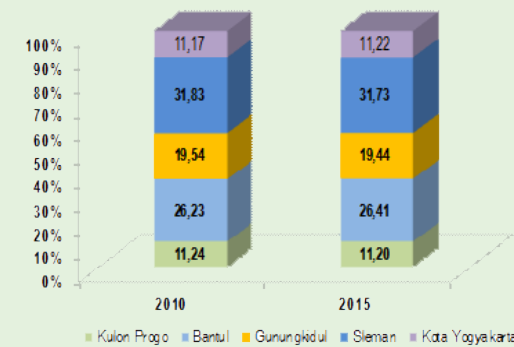
Persebaran penduduk secara umum adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau Negara. Persebaran penduduk D.I. Yogyakarta

Gambar 4.5.  
Laju Pertumbuhan Penduduk D.I. Yogyakarta, 1971-2014



Keterangan: 1971-1980 dan 1980-1990 untuk Provinsi Banten data tidak tersedia  
Sumber:  
BPS D.I.Yogyakarta

Gambar 4.6.  
Persebaran Penduduk D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota 2010 dan 2015 (persen)



Sumber:  
BPS D.I.Yogyakarta

Tabel 4.2.  
Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	95,55	95,74	95,91	96,11	96,27	96,51
Bantul	98,71	98,63	98,58	98,51	98,39	98,27
Gunungkidul	92,95	93,02	93,09	93,15	93,31	93,37
Sleman	101,11	101,23	101,35	101,42	101,51	101,60
Yogyakarta	93,89	94,14	94,31	94,56	94,77	95,02
D.I. Yogyakarta	97,40	97,48	97,56	97,63	97,70	97,76

Sumber:  
BPS D.I.Yogyakarta

berdasarkan wilayah administrasi mencerminkan distribusi penduduk menurut kabupaten/kota. Analisis lebih jauh persebaran penduduk erat kaitannya dengan tingkat hunian atau kepadatan penduduk yang tidak merata.

Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah terbesar,yaitu 46,63 persen, memiliki distribusi jumlah penduduk sekitar 19,44 persen dari penduduk D.I. Yogyakarta dilihat pada kondisi pertengahan tahun 2015. Sementara Kota Yogyakarta dengan persentase luas wilayah terkecil, yaitu hanya 1,02 persen, memiliki distribusi penduduk sebesar 11,22 persen. Kabupaten Sleman dengan persentase luas wilayah sekitar 18,04 persen distribusi penduduknya sebesar 31,73 persen. Kabupaten Bantul dengan luas wilayah sekitar 15,91 persen distribusi jumlah penduduknya sebesar 26,41 persen. Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah sekitar 18,40 persen, jumlah penduduknya sekitar 11,20 persen. Dengan demikian persebaran penduduk terbesar ada di Sleman, sedangkan terrendah ada di Kota Yogyakarta dan di Kulon Progo.

Rasio Jenis Kelamin

Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Demikian pula bila dikaitkan dengan warisan adat dan budaya jaman dahulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir perkembangan rasio jenis kelamin cenderung sedikit meningkat meskipun secara absolut tidak menunjukkan perubahan yang besar. Hanya Kota Yogyakarta yang mengalami perubahan kenaikan angka persentase lebih dari satu persen. Sementara Bantul menunjukkan perkembangan sebaliknya yaitu menurun. Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya wilayah dengan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Dengan demikian bila dilihat dari sisi gender penduduk di D.I. Yogyakarta cenderung mendekati seimbang.

Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2010 jumlah penduduk DIY sebanyak 3,47 juta jiwa. Berdasarkan proyeksi dari hasil SP2010, dua tahun berikutnya jumlah penduduk menjadi 3,55 juta jiwa dan di tahun 2015 penduduk DIY sebesar 3,68 juta jiwa, serta tahun 2016 diproyeksikan menjadi sebesar 3,72 juta jiwa. Secara alami dan tidak ada kasus bencana yang luar biasa, jumlah penduduk akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara luas wilayah DIY tetap, sehingga penambahan jumlah penduduk tersebut tentunya akan menambah kepadatan penduduk DIY.

Luas wilayah D.I. Yogyakarta 3.185,8 km<sup>2</sup>, sehingga kepadatan penduduk DIY tahun 2010 tercatat sebanyak 1.088 jiwa per km<sup>2</sup> , terus meningkat di tahun 2012 menjadi 1.115 jiwa per km<sup>2</sup>, 1.155 jiwa km<sup>2</sup> pada tahun 2015, dan di tahun 2016 diproyeksi menjadi 1.168 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebaran kepadatan penduduk relatif bervariasi, dengan kepadatan tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu 11.919 jiwa per km<sup>2</sup> di tahun 2010 dan menjadi 12.699 jiwa per km<sup>2</sup> di tahun 2015. Sementara Gunungkidul yang mempunyai luas wilayah terluas tingkat kepadatan penduduknya paling rendah yaitu 456 jiwa per km<sup>2</sup> di tahun 2010 dan bertambah lima tahun kemudian bertambah menjadi 482 km<sup>2</sup>.

Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana ditujukan agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Melalui program keluarga berencana pertumbuhan seimbang yang dimaksud adalah mengendalikan jumlah kelahiran anak sekaligus menjamin terkendalinya jumlah penduduk. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

Dalam perjalanan waktu program KB hingga saat ini pemahamannya telah berkembang sesuai dengan keyakinan dan budaya masyarakat. Kini

Tabel 4.3.  
Penduduk dan Kepadatan Penduduk D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota 2010 dan 2015

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiw a)		Kepadatan Penduduk (jiw a/km <sup>2</sup> )	
	2010	2015	2010	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulon Progo	389.661	412.198	664,64	703,09
Bantul	909.539	971.511	1.794,49	1.916,76
Gunungkidul	677.376	715.282	456,03	481,55
Sleman	1.103.534	1.167.481	1.919,79	2.031,04
Yogyakarta	387.379	412.704	11.919,35	12.698,58
D.I. Yogyakarta	3.467.489	3.679.176	1.088,42	1.154,87

Sumber:  
BPS D.I.Yogyakarta



Tabel 4.4.  
Jumlah Akseptor Baru Keluarga Berencana menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	7.402	7.565	7.003	6.911	5.980
Bantul	15.493	16.914	16.377	13.419	13.864
Gunungkidul	12.186	13.992	14.788	14.323	11.917
Sleman	14.543	16.114	15.765	15.253	13.310
Yogyakarta	6.157	6.475	6.078	5.178	3.936
D.I. Yogyakarta	55.781	61.060	60.011	55.084	49.007

Sumber:  
Perwakilan BKKN D.I. Yogyakarta

**Tabel 4.5.**  
Jumlah Akseptor Aktif Keluarga Berencana menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	51.965	53.182	54.170	54.934	53.559
Bantul	120.697	122.697	125.018	119.894	120.420
Gunungkidul	108.206	107.611	109.409	109.033	100.645
Sleman	118.424	120.561	121.536	121.901	121.976
Yogyakarta	33.697	34.737	34.873	35.901	34.818
D.I. Yogyakarta	432.989	438.788	445.006	441.663	431.418
Jumlah PUS DIY	549.894	552.422	554.736	551.676	543.115

Sumber:  
Perwakilan BKKN D.I. Yogyakarta

**Tabel 4.6.**  
Realisasi Akseptor KB Baru dalam Kepesertaan Program Kontrasepsi, 2011-2015 (persen)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	92,80	101,97	92,46	108,61	58,48
Bantul	110,30	108,92	115,27	94,55	62,18
Gunungkidul	105,39	114,23	111,35	114,34	64,55
Sleman	107,73	110,50	100,13	108,93	66,67
Yogyakarta	86,74	100,70	92,12	82,78	74,11
D.I. Yogyakarta	102,95	108,63	104,54	103,27	64,26

Sumber:  
Diolah dari Data Perwakilan BKKN D.I. Yogyakarta

**Tabel 4.7.**  
Realisasi Akseptor KB Aktif dalam Kepesertaan Program Kontrasepsi, 2011-2015 (persen)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	100,16	101,48	100,32	102,65	106,93
Bantul	98,39	99,98	102,05	111,86	108,38
Gunungkidul	97,31	95,49	102,79	100,72	108,20
Sleman	96,26	101,80	100,84	101,42	114,08
Yogyakarta	93,60	97,31	98,74	100,20	84,08
D.I. Yogyakarta	97,35	99,29	101,42	103,93	107,17

Sumber:  
Diolah dari Data Perwakilan BKKN D.I. Yogyakarta

**Tabel 4.8.**  
Rasio Akseptor KB Aktif+Baru terhadap Tenaga Pelayanan KB, 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	407	416	440	495	480
Bantul	410	423	443	414	443
Gunungkidul	576	579	531	608	577
Sleman	436	394	419	378	371
Yogyakarta	561	736	853	934	881
D.I. Yogyakarta	460	459	473	470	466

Sumber:  
Diolah dari Data Perwakilan BKKN D.I. Yogyakarta

program KB bukan hanya soal Dua Anak Cukup, tetapi bagaimana mengatur jarak kelahiran, menjamin kesehatan keluarga, pemenuhan gizi balita dan anak, dan yang terpenting membekali anak-anak dan remaja dengan pemahaman agama yang benar. Sehingga, ketika mereka menginjak dewasa tidak salah dalam pergaulan dan memahami makna perkawinan sesuai norma agama dan nilai-nilai budaya bangsa.

Pada tahun 2015 di D.I. Yogyakarta terdapat sekitar 543.115 pasangan usia subur (PUS). Kepesertaan PUS terhadap program KB cukup tinggi dan relatif stabil selama lima tahun terakhir, capaiannya antara 88,5 persen sampai dengan 91,0 persen. Kepesertaan (akseptor) tersebut berasal dari PUS yang masih terdaftar sebagai akseptor aktif maupun tambahan dari akseptor baru. Sementara bila dilihat partisipasi PUS pada kepesertaan KB di masing-masing kabupaten/kota pada kondisi 2015, berada pada rentang 83,9 persen sampai dengan 90,3 persen dengan tertinggi di Gunungkidul dan terendah di Kota Yogyakarta.

Sementara itu dilihat dari kepesertaan dalam program kontrasepsi menunjukkan perbedaan kecenderungan arah persentase capaian antara aksptor KB aktif dengan akseptor KB baru. Realisasi akseptor baru dalam program kontrasepsi yang cenderung menurun, sedangkan akseptor KB aktif semakin meningkat. Bahkan, di akhir tahun 2015 realisasi kepesertaan akseptor KB baru hanya mencapai 64,3 persen padahal di tahun-tahun sebelumnya selalu melebihi target. Partisipasi akseptor aktif di tahun 2011-2012 belum mencapai target, namun di tiga tahun terakhir mampu melebihi target dan realisasinya mencapai 107,2 persen.

Salah satu indikator pelayanan program KB dapat dilihat melalui rasio akseptor KB terhadap petugas pelayanan KB. Petugas pelayanan KB meliputi dokter, Penyuluh KB (PKB), dan Petugas Lapangan KB (PLKB). Gambaran pelayanan KB di tingkat provinsi, selama lima tahun terakhir menjelaskan bahwa setiap satu orang petugas KB tersedia untuk 450 akseptor. Nampaknya selama tiga tahun terakhir rasionya cenderung menurun, artinya beban

petugas pelayanan KB menjadi lebih ringan. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kecenderungan menurunnya jumlah akseptor KB seiring menurunnya jumlah PUS. Sementara kondisi di kabupaten/kota rasionya bervariasi.

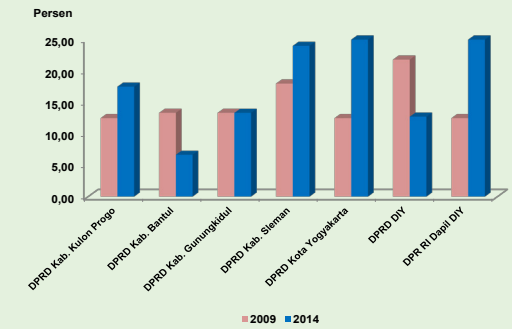
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator perspektif gender untuk melihat keterlibatan perempuan dalam politik menggunakan variabel proporsi perempuan di parlemen. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan organisasi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih pada Pemilu 2014 belum mencapai affirmative action 30 persen.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, ternyata hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 2 kursi (25,0 persen) di DPR RI Dapil DIY, 7 kursi (12,73 persen) di DPRD DIY, 7 kursi (17,50 persen) di DPRD Kabupaten Kulon Progo, 3 kursi (6,67 persen) di DPRD Kabupaten Bantul, 6 kursi (13,33 persen) di DPRD Kabupaten Gunungkidul, 12 kursi (24,0 persen) di DPRD Kabupaten Sleman, dan 10 kursi (25,0 persen) di DPRD Kota Yogyakarta. Bila dibandingkan dengan hasil Pemilu Legislatif 2009, keterwakilan perempuan meningkat untuk DPR RI Dapil DIY tetapi menurun untuk DPRD DIY. Sementara di tingkat kabupaten/kota, persentase anggota legislatif perempuan meningkat di Kulon Progo dan Sleman, sedangkan di Bantul dan Kota Yogyakarta menurun dan untuk Gunungkidul tetap.

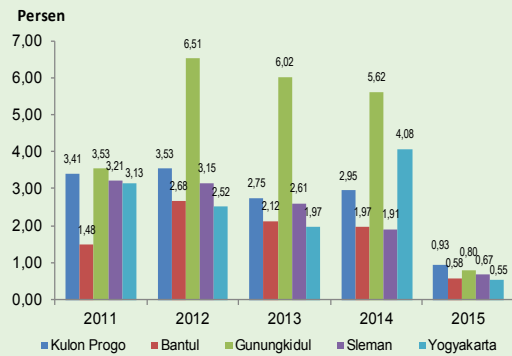
Instrumen tentang jaminan perlindungan anak yang bersumber dari instrumen Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat internasional (international human right law) maupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Demikian pula Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain

Gambar 4.7. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 (persen)



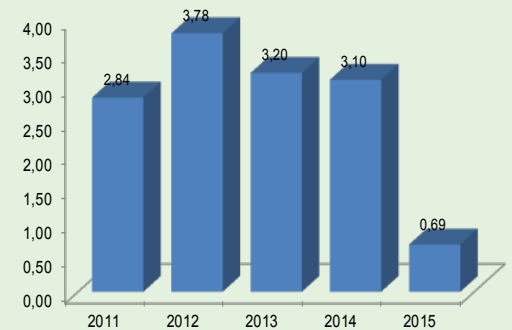
Sumber: Diolah dari Data KPU DIY

Gambar 4.8. Jumlah Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertamanya < 16 th menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015 (persen)



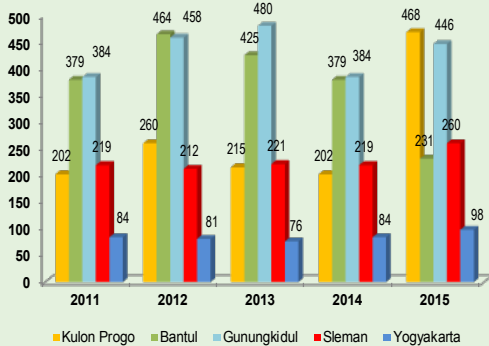
Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, Susenas 2011-2015

Gambar 4.9. Jumlah Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertamanya < 16 th di D.I. Yogyakarta, 2011-2015 (persen)



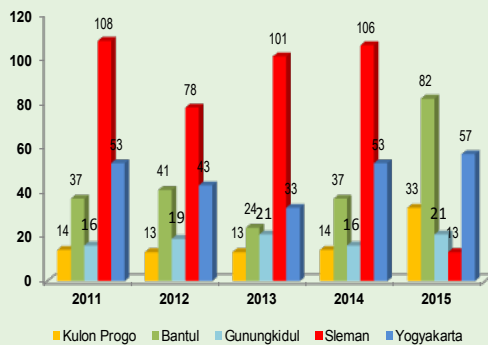
Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, Susenas 2011-2015

Gambar 4.9.  
Jumlah Kelompok Bermain menurut Kabupaten/Kota,  
2011-2015



Sumber:  
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY

Gambar 4.10.  
Jumlah Tempat Penitipan Anak menurut Kabupaten/  
Kota, 2011-2015



Sumber:  
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY

menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide pasal 7 ayat 2).

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - sebagai instrumen HAM -- juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3). Terkait pernikahan di bawah umur, pasal 26 (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Merujuk data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011 hingga 2015, nampak bahwa persentase wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin (dengan status perkawinan: kawin, cerai hidup, dan cerai mati) yang umur perkawinan pertamanya di bawah 16 tahun cenderung menurun dari 2,84 persen menjadi 0,69 persen. Meskipun

demikian di tahun 2012 sempat meningkat yang disebabkan kondisi di empat kabupaten saat itu mengalami peningkatan, sementara hanya Kota Yogyakarta yang persentasenya menurun. Sebaliknya, di tahun 2014 semua kabupaten persentase wanita dengan umur perkawinan pertamanya di bawah 16 tahun menurun sedangkan di Kota Yogyakarta melonjak. Berdasarkan data proyeksi penduduk 2015 dan Susenas 2015 maka di DIY wanita yang usia perkawinan pertamanya di bawah 16 tahun masih ada sekitar 8 ribu orang wanita, jauh menurun dibanding tahun 2011 yang diperkirakan masih ada sekitar 31 ribu orang.

Indikator perlindungan anak dan perempuan yang dijadikan bahasan di sini adalah perkembangan data perkawinan di bawah umur sebagai evaluasi agar bisa mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menekan laju pernikahan di bawah umur. Di samping itu untuk menjamin adanya sarana dan prasarana anak dalam menikmati dunianya dilihat pula ketersediaan akses kelompok bermain dan tempat penitipan anak.

Selama lima tahun terakhir, 2011-2015, jumlah sarana kelompok bermain secara kumulatif di DIY cenderung meningkat, meskipun bila dilihat perkembangan di tingkat kabupaten/kota relatif bervariasi. Jumlah sarana kelompok bermain di Kulon Progo di tahun 2015 mengalami peningkatan yang tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di Bantul selama tiga tahun terakhir cenderung menurun. Di Gunungkidul pada tahun 2013 sarana kelompok bermain muncul sebanyak 480 tempat dan merupakan tertinggi di DIY, namun di dua tahun terakhir mengalami penyusutan. Sementara di Sleman dan Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan ternyata keberadaan kelompok bermain tidak sebanyak yang dimiliki tiga kabupaten lain.

Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi, saat ini sarana Tempat Penitipan Anak sudah menjadi kebutuhan terutama bagi pasangan yang suami isteri mempunyai kesibukan pekerjaan seperti yang bekerja di perkantoran. Hingga tahun 2014 jumlah Tempat Penitipan Anak di Kulon Progo relatif stabil, baru di tahun 2015 bertambah pesat dari 14 tempat menjadi 33 tempat atau dengan persentase peningkatan mencapai 135,7 persen. Keadaan hampir serupa dengan Kulon Progo dialami di Bantul, di tahun 2014 terdapat sebanyak 37 tempat meningkat menjadi 82 tempat atau meningkat sebesar 121,6 persen. Di Gunungkidul dan Kota Yogyakarta jumlah Tempat Penitipan Anak juga bertambah, sedangkan di Sleman pada tahun 2015 mengalami penurunan drastis. Tahun 2011 hingga 2014 Sleman mempunyai jumlah Tempat Penitipan Anak terbanyak dibanding dengan empat kabupaten/kota lain. Penurunan di Sleman yang drastis tersebut secara umum mempengaruhi jumlah Tempat Penitipan Anak di D.I. Yogyakarta dari 226 tempat menjadi hanya 206 tempat.



## 4.2. PENDIDIKAN

Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal. Kesempatan memperoleh pendidikan menjadi hak dasar setiap warga negara dan semua warga negara diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan dasar. Sementara, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan dasar yang murah, terjangkau, bermutu, dan merata sekaligus mengalokasikan anggaran untuk membiayainya.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan di seluruh wilayah DIY menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator bidang pendidikan seperti ketersediaan sarana dan infrastruktur pendidikan, angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, maupun angka melek huruf yang semakin meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.

### 4.2.1. Infrastruktur Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketersediaan infrastruktur pendidikan formal seperti sekolah, ruang kelas, dan tenaga pengajar yang representatif menjadi penentu efektifitas proses belajar mengajar. Secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia hasil pendidikan. Kebutuhan infrastruktur pendidikan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah. Kondisi ini mampu disikapi dengan baik oleh pemerintah

Tabel 4.9.  
Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Muridi DIY menurut Jenjang, Tahun Ajaran 2015/2016

Jenjang Pendidikan	Rincian	Kabupaten/Kota					DIY
		Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Taman Kanak-kanak (TK) <i>Negeri+Swasta</i>	Sekolah	325	516	576	503	215	2.135
	Kelas	454	1.679	940	1.374	772	5.219
	Guru	753	1.715	1.532	2.059	864	6.923
	Murid	9.282	26.199	16.104	27.781	11.547	90.913
SD/MI <i>Dikbud (Negeri+Swasta) + non Dikbud</i>	Sekolah	365	391	553	533	167	2.009
	Kelas	2.242	3.369	3.404	3.852	1.674	14.541
	Guru	3.310	4.948	4.859	6.113	2.573	21.803
	Murid	36.295	78.835	56.771	94.200	43.823	309.924
SMP/MTS <i>Dikbud (Negeri+Swasta)+ non Dikbud</i>	Sekolah	79	110	142	134	65	530
	Kelas	725	1.385	1.186	1.534	833	5.663
	Guru	1.598	2.954	2.799	3.401	1.755	12.507
	Murid	18.002	38.157	30.611	45.014	25.087	156.871
SMU/MA <i>Dikbud (Negeri+Swasta)+ non Dikbud</i>	Sekolah	38	47	36	46	37	204
	Kelas	247	667	308	693	724	2.639
	Guru	620	1.664	964	1.763	1.756	6.767
	Murid	5.753	17.016	7.190	16.347	19.928	66.234
SMK <i>Negeri+Swasta</i>	Sekolah	36	49	46	57	32	220
	Kelas	406	548	500	751	491	2.696
	Guru	1.308	1.903	1.739	2.121	1.608	8.679
	Murid	11.268	15.890	17.295	21.088	16.531	82.072

Sumber: diolah dari data Disdikpora DIY

daerah melalui SKPD terkait maupun pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur dan penunjang pendidikan secara berjenjang sampai level perdesaan. Efektifitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas sangat ditentukan oleh daya tampung kelas dan ketersediaan tenaga pengajar atau guru. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektifitas proses belajar mengajar adalah rasio murid-kelas dan rasio murid-guru.

Tabel 4.1 menyajikan gambaran sebaran infrastruktur pendidikan menurut jenjang pendidikan di wilayah DIY menurut kabupaten/kota pada tahun ajaran 2015/2016. Sementara, Tabel 4.2 menyajikan gambaran perkembangan rasio murid-kelas dan rasio murid-guru dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, perkembangan rasio murid-kelas dan murid-guru di DIY menunjukkan pola yang relatif stabil dan masih berada pada taraf yang ideal untuk kelangsungan proses belajar mengajar.

Jumlah institusi pendidikan pra sekolah (Taman Kanak-kanak/TK) negeri dan swasta di DIY tercatat sebanyak 2.135 unit sekolah dengan kapasitas ruang kelas mencapai 5.219 kelas untuk menampung sebanyak 90.913 siswa dengan jumlah pendidik sebanyak 6.923. Artinya, setiap sekolah TK rata-rata menampung 43 orang murid dan setiap kelas rata-rata

menampung 17 orang murid. Sementara, rasio murid-guru pada jenjang TK tercatat sebesar 13. Ketiga angka rasio tersebut masih berada dalam taraf ideal yang memungkinkan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Angka rasio berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan pola yang bervariasi. Ketiga angka rasio pada jenjang TK di Kabupaten Gunungkidul tercatat lebih rendah, karena sebaran sekolah per luas wilayah di Gunungkidul tercatat paling tinggi. Konsekuensinya, meskipun jumlah siswa pra sekolahnya tidak mendominasi jumlah unit sekolah TK di Gunungkidul tercatat paling banyak dengan tujuan memperbesar peluang akses penduduk terhadap unit pendidikan pra sekolah.

Jumlah infrastruktur SD/MI baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 2.009 unit dengan ruang kelas sebanyak 14.541 unit untuk menampung 309,9 ribu murid SD. Fasilitas SD/MI sudah tersebar sampai level administrasi terendah yakni desa/kelurahan. Secara rata-rata, terdapat 4-5 unit SD/MI di setiap desa/kelurahan di DIY. Pada tahun ajaran 2015/2016 setiap sekolah pada jenjang SD/MI menampung sebanyak 154 siswa dan setiap kelas menampung 21 siswa. Rasio murid-guru pada jenjang SD/MI tercatat sebesar 14, sehingga seorang guru rata-rata memiliki beban

Tabel 4.10.  
Rasio Murid-Kelas dan Murid-Guru DIY menurut Jenjang Pendidikan, 2009-2016

Tahun Ajaran Sekolah	Rasio Murid-Kelas					Rasio Murid-Guru				
	TK	SD/MI	SMP/MTS	SMU/MA	SMK	TK	SD/MI	SMP/MTS	SMU/MA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2009/2010	21	22	30	28	30	11	13	11	8	9
2010/2011	20	21	29	28	30	11	13	11	9	10
2011/2012	20	18	28	27	29	11	13	11	9	10
2012/2013	19	21	29	26	27	12	13	12	9	10
2013/2014	20	21	27	26	26	12	13	12	9	9
2014/2015	19	21	29	29	26	13	14	12	9	9
2015/2016	17	21	28	25	30	13	14	13	10	9

Sumber: diolah dari data Disdikpora DIY

untuk memberikan pengajaran dan mengawasi sebanyak 14 siswa di setiap sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio murid-kelas jenjang SD tercatat relatif stabil pada kisaran 18-22 dan rasio murid guru tercatat pada kisaran 13-14. Kedua rasio ini masih berada pada taraf ideal yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif.

Facilities sekolah pada jenjang SLTP baik negeri maupun swasta, dibawah di bawah Dikbud maupun non Dikbud tercatat sebanyak 530 sekolah dengan kapasitas 5.663 kelas yang menampung sebanyak 156,9 ribu siswa. Pada umumnya, fasilitas sekolah pada jenjang SLTP berlokasi di pusat pemerintahan kecamatan atau desa yang mudah diakses oleh penduduk usia sekolah. Pada tahun ajaran 2015/2016, setiap SMP/MTS di DIY menampung sebanyak 154 siswa dengan rata-rata jumlah kelas paralel antara 3 sampai 4 kelas. Rasio murid-kelas tercatat sebesar 28 murid per kelas dan relatif stabil dalam tujuh tahun terakhir. Sementara, rasio murid-guru tercatat sebesar 13 dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Secara level, angka rasio ini masih berada dalam taraf ideal yang memungkinkan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efisien. Namun, kondisi ini belum menggambarkan kebutuhan dan penempatan

guru riil sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Keberadaan guru pada jenjang SLTP ke atas pada umumnya merupakan guru mata pelajaran, sehingga gambaran rasio murid-guru secara absolut hanya merupakan gambaran rasio secara kasar. Gambaran yang riil bisa didekati dengan rasio guru-murid menurut bidang studi atau mata pelajaran.

Jumlah sekolah pada jenjang SMU/MA dan SMK masing-masing tercatat sebanyak 204, dan 220 unit. Pada umumnya, fasilitas sekolah pada jenjang menengah ini berlokasi di pusat pemerintahan kecamatan. Dengan kondisi infrastruktur dan sarana transportasi yang kualitasnya semakin membaik, peluang penduduk usia sekolah untuk mengakses sekolah menengah menjadi semakin besar. Pada tahun ajaran 2015/2016, setiap SMU/MA dan SMK rata-rata menampung sebanyak 325 dan 373 murid. Rata-rata jumlah kelas paralel pada jenjang SMU/MA dan SMK berada di atas 4 kelas di setiap sekolah. Daya tampung setiap kelas masing-masing mencapai 25 orang untuk jenjang SMU/MA dan 30 untuk jenjang SMK. Rasio murid-guru pada kedua jenjang masing-masing tercatat sebesar 10 dan 9 murid per guru. Perkembangan rasio murid-kelas jenjang SMU/MA selama beberapa tahun terakhir bervariasi di bawah 30, sementara pada jenjang SMK bervariasi di bawah 35.

Tabel 4.11.  
Rasio Murid-Kelas dan Murid-Guru menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di DIY, Tahun Ajaran 2015/2016

Kabupaten/ Kota	Rasio Murid-Kelas					Rasio Murid-Guru				
	TK	SD/MI	SMP/MTS	SMU/MA	SMK	TK	SD/MI	SMP/MTS	SMU/MA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	
Kulon Progo	20	16	25	23	28	12	11	11	9	9
Bantul	16	23	28	26	29	15	16	13	10	8
Gunungkidul	17	17	26	23	35	11	12	11	7	10
Sleman	20	24	29	24	28	13	15	13	9	10
Yogyakarta	15	26	30	28	34	13	17	14	11	10
DIY	17	21	28	25	30	13	14	13	10	9

Sumber: diolah dari data Disdikpora DIY

Perkembangan rasio murid-guru pada jenjang SMU/MA bervariasi antara 7-11 dan SMK bervariasi antara 8-10. Sama halnya dengan guru pada jenjang SLTP, pada umumnya guru pada jenjang sekolah menengah merupakan guru bidang studi atau guru mata pelajaran. Rasio-murid guru pada jenjang pendidikan menengah hanya mampu menggambarkan beban secara kasar dan belum menggambarkan beban riil guru untuk mengajar sesuai dengan bidang studi yang diampu.

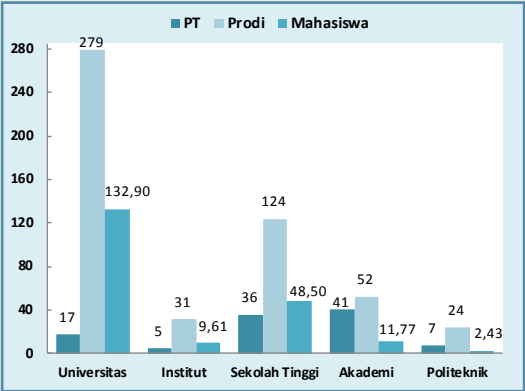
Perkembangan rasio murid-kelas dan murid-guru pada setiap jenjang pendidikan di semua kabupaten/kota DIY selama beberapa tahun terakhir terlihat relatif stabil dan masih berada dalam kondisi ideal untuk kelangsungan proses belajar mengajar. Secara umum, rasio murid-kelas pada tingkat SD tercatat paling rendah. Artinya, daya tampung kelas pada tingkat SD kurang dari SMP, SMA, dan SMK. Rasio murid-guru memiliki pola yang sedikit berbeda dengan rasio murid kelas. Rasio murid-guru semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Artinya, rasio murid-guru tingkat SD>SMP>SMU/SMK.

4.2.2. Infrastruktur Pendidikan Tinggi

Infrastruktur pendidikan dasar dan menengah di DIY juga ditopang oleh keberadaan perguruan tinggi yang cukup lengkap sebagai representasi kota pelajar. Jumlah perguruan tinggi di DIY pada tahun 2015 tercatat sebanyak 118 unit, terdiri dari 106 perguruan tinggi swasta serta 12 perguruan tinggi negeri dan kedinasan. Keberadaan perguruan tinggi tersebut tersebar di semua kabupaten/kota dan yang paling dominan terdapat di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Perguruan tinggi swasta terdiri dari 17 universitas, 5 institut, 36 sekolah tinggi, 41 akademi, dan 7 politeknik.

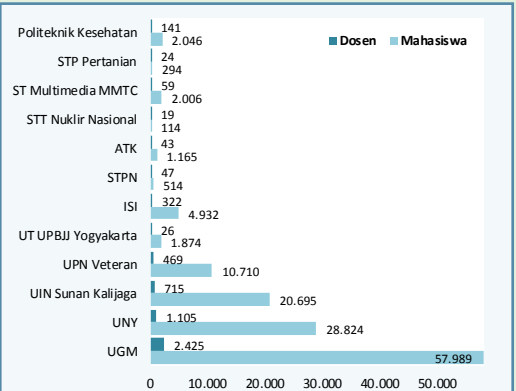
Berdasarkan data dari Kopertis V, pada tahun 2015 semua perguruan tinggi swasta di DIY menampung sebanyak 205.254 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah total program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta tercatat sebanyak 510 program, mulai dari Diploma I sampai S-3. Mahasiswa yang sedang menempuh program Sarjana (S1) mendominasi komposisi mahasiswa di perguruan tinggi swasta dengan proporsi 81 persen. Berikutnya secara berturut-turut adalah adalah mahasiswa

Gambar 4.11.  
Jumlah Perguruan Tinggi Swasta, Program Studi, dan Mahasiswa di DIY menurut Bentuk, 2015



Sumber: diolah dari data Kopertis Wilayah V, 2015

Gambar 4.12.  
Jumlah Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Negeri di DIY, 2015/2016 (Orang)



Sumber: diolah dari data PT Negeri dan Kedinasan DIY

program Diploma III sebanyak 12,7 persen dan program Magister (S2) sebesar 3,7 persen.

Jumlah perguruan tinggi negeri dan kedinasan di DIY tercatat sebanyak 12 unit dengan rincian, 5 universitas, 1 institut, 4 sekolah tinggi, serta 1 unit akademi dan politeknik. Jumlah mahasiswa yang tercatat pada beberapa perguruan tinggi negeri dan kedinasan sebanyak 131.163 orang dengan jumlah dosen pengajar sebanyak 5.395 orang. Mayoritas mahasiswa menempuh pendidikan di tiga universitas ternama di DIY, yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan proporsi masing-masing sebesar 44 persen, 22 persen, dan 16 persen. Kehidupan masyarakat yang kondusif, infrastruktur pendidikan yang representatif, dan biaya hidup yang relatif murah menjadi daya tarik bagi pelajar/mahasiswa dari luar daerah untuk melanjutkan studi di sekolah dan perguruan tinggi di DIY.

4.2.3. Angka Partisipasi Sekolah

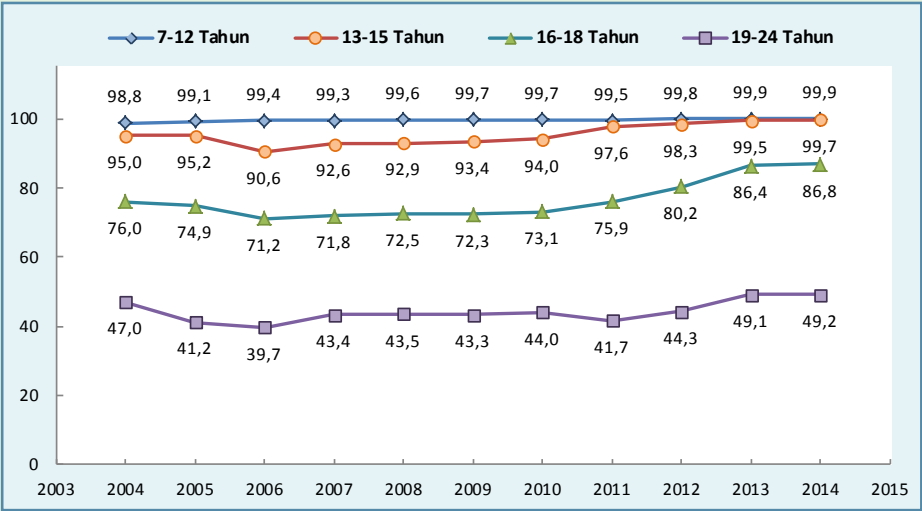
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem

pendidikan terhadap penduduk berusia sekolah. Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar akses penduduk usia sekolah terhadap institusi pendidikan yang tersedia. APS dihitung dari rasio antara jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang sedang bersekolah pada berbagai tingkatan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sesuai. Semakin tinggi APS mencerminkan semakin besar peluang penduduk usia sekolah yang mendapat kesempatan bersekolah.

Perkembangan APS DIY selama satu dekade terakhir disajikan dalam Gambar 4.3. APS penduduk berusia 7-12 tahun (usia SD) terlihat sudah mendekati 100 persen, tepatnya pada level 99,9 persen pada tahun 2015. Angka ini mengindikasikan besarnya populasi penduduk berusia 7-12 tahun yang statusnya masih bersekolah pada berbagai jenjang sudah mencapai 99,9 persen dan sisanya sebanyak 0,1 persen penduduk berstatus belum memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan sekolah atau kemungkinan sudah putus sekolah karena berbagai alasan.

APS penduduk berusia 13-15 tahun (usia SLTP) juga terlihat semakin meningkat

Gambar 4.13. Angka Partisipasi Sekolah (APS) DIY menurut Kelompok Usia Pendidikan (Persen)



Sumber: diolah dari data Susenas, BPS

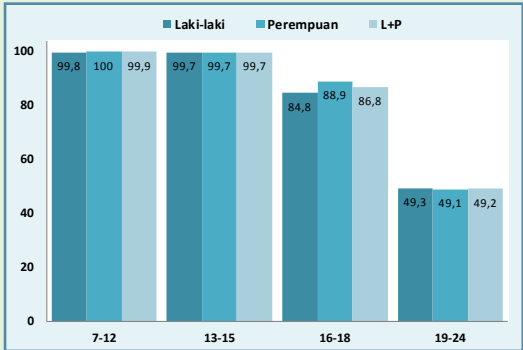
mendekati angka 100 persen. Pada tahun 2015, level APS penduduk berusia 13-15 tahun mencapai level 99,7 persen. Artinya, 99,7 persen penduduk usia 13-15 tahun memiliki status sedang bersekolah pada berbagai jenjang. Sisanya, sebanyak 0,3 persen berstatus tidak/belum pernah bersekolah atau sudah tidak sekolah lagi (putus sekolah). Berbagai permasalahan seperti kesulitan biaya pendidikan, akses ke sekolah sulit, membantu ekonomi keluarga, atau tidak mau bersekolah karena tidak mampu mengikuti menjadi alasan utama mereka yang tidak berpartisipasi dalam sekolah.

APS penduduk berusia 16-18 tahun (SLTA) menunjukkan peningkatan yang lebih tajam, meski dari sisi level masih jauh di bawah APS kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada tahun 2015, APS penduduk berusia 16-18 tahun tercatat sebesar 86,8 persen. Sementara, APS penduduk berusia 19-24 tahun tercatat pada kisaran 49,2 persen dan menunjukkan pola yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. APS penduduk pada kelompok usia 19-24 tahun tercatat paling rendah dibandingkan dengan kelompok usia di bawahnya karena tidak semua penduduk pada kelompok usia ini mampu melanjutkan sekolah pada jenjang perguruan tinggi. Sebagian di antara mereka menganggap pendidikan menengah yang ditempuh sudah cukup sebagai

bekal masuk dalam pasar tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga. Sebagian yang lain merasa tidak mampu menempuh sekolah pada jenjang perguruan tinggi karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau.

Level APS menurut jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Artinya, kesempatan untuk mengakses pendidikan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada berbagai kelompok usia pendidikan sudah hampir setara. Bahkan, pada kelompok usia 16-18 tahun, APS penduduk perempuan tercatat sudah melampaui APS laki-laki. Perbandingan APS menurut wilayah kabupaten/kota di DIY sampai kelompok usia 13-15 tahun terlihat sudah merata dengan level mendekati 100 persen. Perbedaan yang cukup nyata terlihat pada kelompok usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Level APS kelompok usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan Kulon Progo dan Gunungkidul. Perbedaan level ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tingkat kesejahteraan penduduk, kemudahan mengakses sarana pendidikan yang ada, persoalan biaya pendidikan, serta faktor budaya dalam memandang arti pentingnya pendidikan bagi anak. Biaya pendidikan pada jenjang SLTA ke atas relatif besar dan tidak semua biaya pendidikan dicover oleh pemerintah. Konsekuensinya tidak semua

Gambar 4.14.  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin DIY, 2015



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2015, BPS

Tabel 4.12.  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia dan Kabupaten/Kota DIY, 2015

Tahun	Kelompok Usia				
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	100	98,52	90,33	25,74	77,07
Bantul	99,61	100	85,77	41,68	78,96
Gunungkidul	100	100	77,18	20,05	73,56
Sleman	100	99,49	89,91	57,83	80,02
Yogyakarta	100	100	92,16	69,35	83,78
DIY	99,89	99,68	86,78	49,17	78,88

Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2015, BPS

penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun mampu mengakses pendidikan secara mandiri. Secara umum, kesejahteraan penduduk di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul relatif lebih baik dibandingkan dengan kesejahteraan penduduk Kulon Progo dan Gunungkidul sehingga secara pembiayaan mereka lebih mudah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua kabupaten lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM)

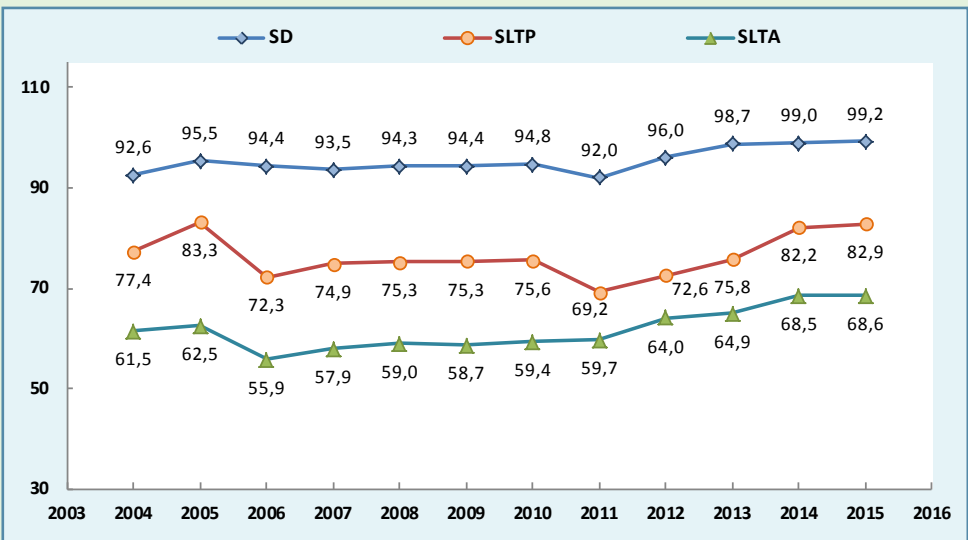
Partisipasi sekolah penduduk juga bisa dikaji berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM). APM dihitung dari jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang sekolah yang sesuai dengan usianya dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Indikator ini berguna untuk melihat proporsi penduduk usia sekolah yang tepat waktu atau sesuai dengan standar usia pada jenjang pendidikan yang berkaitan.

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat. Secara umum, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan

meningkatnya jenjang pendidikan atau  $APM_{SD} > APM_{SLTP} > APM_{SLTA}$ . APM jenjang SD pada tahun 2015 tercatat mencapai 99,2 persen. Artinya, jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD sederajat mencapai 99,2 persen. Keberhasilan implementasi program Wajib Belajar Sembilan Tahun terlihat dari tingginya angka partisipasi pada jenjang ini. Sisanya, sebanyak 0,8 persen berstatus belum/tidak pernah bersekolah di tingkat SD karena terlambat masuk sekolah (0,1 %) dan sudah bersekolah pada tingkat SLTP karena masuk sekolah sebelum waktunya atau mengikuti program akselerasi (0,7 %).

APM pada tingkat SLTP di tahun 2015 tercatat sebesar 82,9 persen. Artinya, proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTP sebanyak 82,9 persen. Sisanya, sebanyak 8,3 persen masih bersekolah pada jenjang SD karena kasus terlambat masuk sekolah atau kasus tinggal kelas; 8,5 persen sudah bersekolah pada jenjang SLTA karena masuk sekolah sebelum waktunya atau mengikuti program akselerasi; dan 0,3 penduduk persen berstatus putus sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi.

Gambar 4.15.  
Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) DIY menurut Jenjang, 2004-2015 (Tahun)



Sumber: diolah dari data Susenas, BPS

APM pada tingkat SLTA tercatat mencapai 68,6 persen. Sisanya, sebanyak 7,4 persen penduduk masih bersekolah pada jenjang SLTP karena kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah; 10,8 persen sudah bersekolah pada jenjang perguruan tinggi karena bersekolah sebelum waktunya; dan 13,2 persen berstatus putus sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka nilai APM-nya semakin rendah, karena tidak semua lulusan mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akibat persoalan biaya, kasus tinggal kelas, tidak lulus, kesulitan mengakses sekolah, dan alasan lainnya.

Berdasarkan jenis kelamin, APM pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender untuk mengakses pendidikan sampai level pendidikan menengah di DIY secara tepat usia sudah tercapai. Sementara, APM menurut wilayah kabupaten/kota terlihat lebih bervariasi tergantung pada rata-rata usia pertama kali masuk sekolah, faktor tinggal kelas atau mengulang, ketersediaan infrastruktur, biaya pendidikan dan lainnya.

Secara umum, APM pada jenjang SD di semua kabupaten/kota tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Level APM SD di Kota Yogyakarta tercatat paling rendah, karena banyak peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang masuk SD dengan usia belum mencapai

tujuh tahun. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk usia SD (7-12 tahun) di Kota Yogyakarta yang sudah bersekolah pada jenjang SLTP dengan proporsi sebesar 3,4 persen. APM pada jenjang SLTP juga terlihat relatif setara. Sementara, APM pada tingkat SLTA di Kota Yogyakarta dan Sleman juga terlihat lebih rendah dari Gunungkidul. Hal ini terjadi karena mayoritas peserta didik di Gunungkidul masuk sekolah formal pertama kali dengan usia yang standar, yakni tujuh tahun. Sementara, di Kota Yogyakarta dan Sleman banyak peserta didik yang mulai bersekolah dengan usia kurang dari tujuh tahun. Fenomena ini terlihat dari proporsi penduduk usia SLTA (16-18 tahun) di Kota Yogyakarta dan Sleman yang sudah bersekolah di tingkat perguruan tinggi masing-masing mencapai 22,6 persen dan 16,7 persen.

4.2.4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan indikator untuk melihat seberapa besar bagian dari penduduk berusia sekolah yang tidak terlibat dalam aktivitas pendidikan baik karena alasan belum mendapat kesempatan bersekolah atau berhenti sekolah sebelum waktunya selama referensi waktu pendataan. Indikator ini dihitung dari proporsi penduduk berusia sekolah pada berbagai jenjang yang statusnya tidak/belum pernah bersekolah

**Tabel 4.13.**  
Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) menurut Jenjang dan Kabupaten/Kota DIY, 2015

Kabupaten/ Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	97,32	77,25	80,32
Bantul	99,61	84,77	70,49
Gunungkidul	100,00	83,59	67,42
Sleman	100,00	82,91	65,28
Yogyakarta	96,65	81,79	63,47
DIY	99,23	82,86	68,60

Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2015, BPS

**Tabel 4.14.**  
Angka Putus Sekolah DIY menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, 2015 (Persen)

Kabupaten/ Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	0,00	1,48	9,67
Bantul	0,39	0,00	14,23
Gunungkidul	0,00	0,00	22,82
Sleman	0,00	0,51	10,09
Yogyakarta	0,00	0,00	7,84
DIY	0,11	0,32	13,22

Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2015, BPS

dan sudah tidak bersekolah lagi dengan pendekatan data hasil Susenas.

Hasil Susenas 2015 menunjukkan sebanyak 78,9 persen penduduk berusia 7-24 tahun masih berstatus bersekolah pada berbagai tingkatan, 0,2 persen tidak/belum pernah sekolah, dan 21 persen berstatus sudah tidak bersekolah lagi. Secara umum, angka putus sekolah menurut kabupaten/kota dan jenjang pendidikan disajikan dalam Tabel 4.6. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang statusnya tidak/belum pernah sekolah sama sekali tercatat sebesar 0,1 persen. Kemungkinan di antara mereka masih mengikuti pendidikan pra sekolah atau Taman Kanak-Kanak. Angka putus sekolah pada tingkat SLTP tercatat sebesar 0,3 persen. Angka putus sekolah pada jenjang SD dan SLTP tercatat sangat rendah, karena secara umum pemerintah membebaskan biaya pendidikan dasar dan infrastruktur pendidikan mudah diakses sampai level daerah.

Pada jenjang SLTA (usia 16-18 tahun), angka putus sekolah tercatat sebesar 13,2 persen. Berdasarkan wilayah, kasus putus sekolah usia 16-18 tahun tertinggi terjadi di Gunungkidul sebesar 22,8 persen. Sementara, angka putus sekolah terendah terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 7,8 persen. Pada

umumnya, kasus putus sekolah terjadi karena dorongan ekonomi untuk membantu keuangan rumah tangga, kesulitan untuk membiayai sekolah, kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan menengah, dan merasa tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

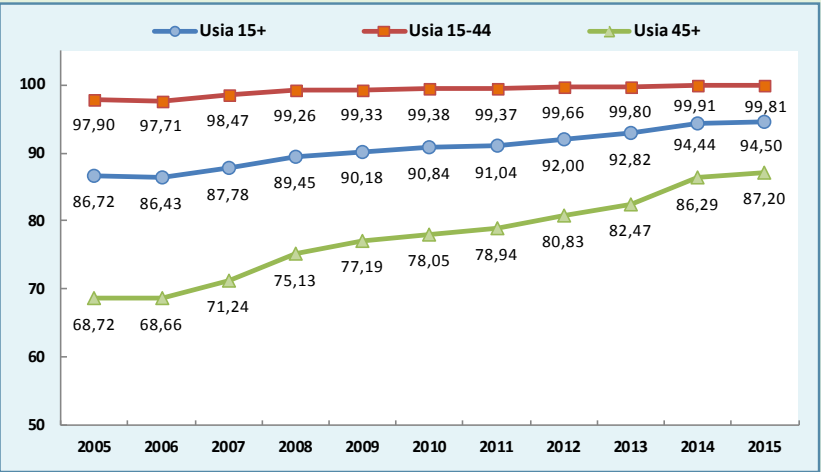
4.2.5. Kualitas Modal Manusia

Kualitas pendidikan penduduk bisa dikaji dari sisi partisipasi dan dari sisi kualitas pencapaian/stok. Ukuran partisipasi fokus pada penduduk usia sekolah, sementara ukuran pencapaian fokus pada penduduk berusia kerja. Beberapa ukuran yang menggambarkan kualitas pencapaian pendidikan diantaranya adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Angka Melek Huruf

AMH menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan pendidikan di masa lampau sekaligus mencerminkan kualitas pencapaian stok modal manusia di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan kemampuan dasar penduduk dalam berkomunikasi secara lisan (verbal) dan tertulis serta kemampuan untuk menyerap informasi

Gambar 4.16.  
Perkembangan AMH DIY menurut Kelompok Usia, 2005-2015 (Persen)



Sumber: BPS

dari berbagai media. AMH diukur dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana baik dalam huruf latin maupun huruf lainnya.

Perkembangan AMH penduduk DIY selama periode 2003-2015 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2003, AMH tercatat sebesar 85,8 persen dan meningkat secara bertahap menjadi 94,5 persen di tahun 2015. Secara eksplisit, angka tersebut menggambarkan masih terdapat 5,5 persen penduduk yang berstatus buta huruf atau tidak/belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. Dibandingkan dengan rata-rata AMH pada level nasional, AMH DIY tercatat lebih rendah. Penyebab AMH di DIY belum mencapai level optimal adalah rendahnya AMH penduduk pada kelompok usia tua (> 45 tahun). Pada tahun 2015, AMH penduduk usia 45 tahun ke atas tercatat hanya sebesar 87,2 persen. Sementara, AMH penduduk berusia 15-44 tahun tercatat cukup tinggi (99,8 %), bahkan sudah lebih tinggi dari level nasional. Besarnya proporsi buta huruf pada kelompok penduduk berusia tua dipengaruhi oleh angka harapan hidup penduduk DIY yang levelnya lebih tinggi dari rata-rata level nasional serta kebijakan pendidikan di masa lampau yang belum berjalan secara merata. Secara alamiah, persoalan tingginya angka melek huruf penduduk berusia tua ini akan semakin berkurang karena jumlah populasi penduduk

usia tua semakin berkurang akibat proses kematian.

Perbandingan level AMH menurut wilayah menunjukkan AMH tertinggi dicapai Kota Yogyakarta sebesar 98,5 persen dan diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 96,9 persen. Sementara, AMH terendah tercatat di Kabupaten Gunungkidul sebesar 86,3 persen. AMH penduduk berusia 15-44 tahun di semua kabupaten/kota sudah mendekati angka 100 persen. Artinya tidak ada persoalan dengan kemampuan baca tulis penduduk usia tersebut di semua wilayah. Perbandingan AMH penduduk usia di atas 45 tahun antar kabupaten/kota di DIY terlihat masih belum merata. Hal ini terlihat dari gap AMH usia 45 tahun ke atas antar wilayah yang cukup besar.

AMH menurut jenis kelamin juga terlihat merata pada kelompok usia 15-44 tahun, namun belum merata pada kelompok usia di atas 45 tahun. Secara umum, AMH laki-laki terlihat lebih dominan dibandingkan perempuan. Fenomena ini menggambarkan kinerja pembangunan pendidikan di masa lampau yang belum memperhatikan aspek kesetaraan gender dan pemerataan menurut wilayah.

Rata-rata Lama Sekolah

RLS merupakan indikator yang mencerminkan kualitas capaian pendidikan

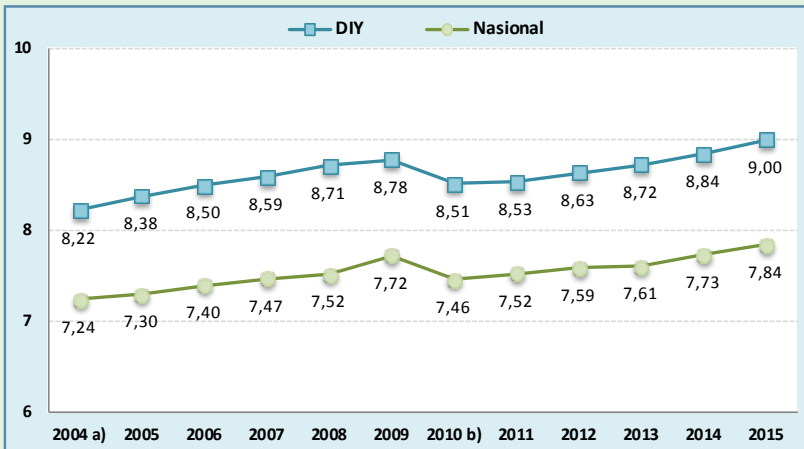
Tabel 4.15.  
AMH DIY menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2015 (Persen)

Kabupaten/ Kota	15+			15-44			45+		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kulonprogo	97,57	92,16	94,78	99,61	100	99,80	95,15	84,44	89,38
Bantul	97,46	94,44	95,91	99,11	100	99,56	94,95	86,80	90,65
Gunungkidul	93,12	80,08	86,28	99,76	100	99,88	86,22	62,56	73,32
Sleman	98,81	94,90	96,86	100	100	100	96,67	87,28	91,72
Yogyakarta	99,85	97,26	98,50	100	99,53	99,76	99,56	93,27	96,13
DIY	97,35	91,78	94,50	99,69	99,94	99,81	93,87	81,38	87,20

Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2015, BPS

**Gambar 4.17.**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) DIY dan Nasional, 2004-2015 (Tahun)



Sumber: BPS

Cat: a) tahun 2004-2009 menggunakan penduduk 15+ tahun

b) tahun 2010-2015 menggunakan penduduk 25+ tahun

tertinggi yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif atau usia kerja. Referensi penduduk berusia kerja yang biasa digunakan untuk menghitung RLS ada dua macam, kelompok usia 15 tahun ke atas dan kelompok usia 25 tahun ke atas. Sampai tahun 2009, estimasi RLS untuk kebutuhan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan referensi penduduk berusia 15 tahun ke atas. Namun, mulai tahun 2010 penghitungan RLS disempurnakan dengan menggunakan referensi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Pertimbangannya adalah penduduk kelompok usia 25 tahun ke atas diasumsikan sudah

menyelesaikan jenjang pendidikan terakhirnya, sementara jika menggunakan kelompok 15 tahun ke atas masih banyak penduduk yang pendidikannya belum tuntas atau masih aktif bersekolah dan masih ada peluang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendekatan baru menghasilkan level RLS yang lebih rendah, tetapi lebih representatif menggambarkan kondisi yang riil dibandingkan dengan kelompok 15 tahun ke atas.

Perkembangan RLS pada periode 2004-2015 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, terlihat ada penurunan level akibat penyempurnaan

Tabel 4.16.

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota, 2015 (Tahun)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	7,85	7,88	7,93	8,02	8,20	8,40
Bantul	8,34	8,35	8,44	8,72	8,74	9,08
Gunungkidul	5,59	5,74	6,08	6,22	6,45	6,46
Sleman	9,79	10,03	10,03	10,03	10,28	10,30
Yogyakarta	10,88	11,01	11,22	11,36	11,39	11,41
<b>DIY</b>	<b>8,51</b>	<b>8,53</b>	<b>8,63</b>	<b>8,72</b>	<b>8,84</b>	<b>9,00</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>7,46</b>	<b>7,52</b>	<b>7,59</b>	<b>7,61</b>	<b>7,73</b>	<b>7,84</b>

Sumber: data IPM, BPS

referensi penduduk dalam penghitungan menggunakan metode baru. RLS penduduk DIY pada tahun 2015 tercatat sebesar 9,0 tahun. Angka ini mengandung arti rata-rata lama masa sekolah yang telah dijalani oleh penduduk DIY berusia 25 tahun ke atas hingga jenjang tertingginya setara dengan kelas 9 SLTP. Secara umum, RLS penduduk DIY cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata level nasional. Fenomena ini menggambarkan capaian kualitas pembangunan modal manusia DIY yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional selama lebih dari satu dekade terakhir.

Berdasarkan wilayah, RLS tertinggi di DIY selama beberapa tahun terakhir dicapai Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. RLS di kedua daerah pada tahun 2015 masing-masing tercatat mencapai 11,4 tahun dan 10,3 tahun. Sementara, RLS terendah terjadi di Gunungkidul sebesar 6,5 tahun. Secara umum, RLS di semua kabupaten/kota di DIY tercatat lebih tinggi dari RLS nasional (7,8 tahun), kecuali Gunungkidul. Perbedaan RLS antar wilayah ini mencerminkan perbedaan kualitas pembangunan manusia antar wilayah yang cukup mencolok dan hal ini searah dengan indikator pendidikan lainnya seperti angka melek huruf. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang diperkuat oleh inisiatif beberapa pemerintah daerah dengan program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang cukup gencar

digalakkan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya diharapkan akan meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk pada periode ke depan, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi gap atau selisih RLS antar wilayah di DIY.

4.3. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pemuda merupakan bagian dari penduduk berusia produktif yang menjadi sumber potensial untuk menggerakkan roda pembangunan. Undang-undang No. 40 tahun 2009 mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Secara demografis, kelompok usia 16-30 tahun mencakup penduduk yang masih berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah dan penduduk yang sudah masuk dalam pasar tenaga kerja. Pembangunan pemuda memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan manusia melalui bidang kepemudaan berusaha untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam

Tabel 4.17.  
Jumlah Fasilitas, Organisasi, dan Kegiatan Pemuda dan Olahraga di DIY, 2012-2015

Fasilitas, Organisasi, dan Kegiatan	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klub Olahraga	485	244	825	825
Lapangan/Gedung Olahraga	720	1.002	1.002	1.002
Kegiatan Olahraga	14	14	14	14
Organisasi Pemuda	35	35	35	35
Kegiatan Kepemudaan	440	440	440	440
Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	5	10	10	10

Sumber: Disdikpora DIY

mengembangkan diri dan mengaktualisasikan potensi, bakat, serta minat yang dimiliki dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Upaya yang ditempuh adalah meningkatkan peran pemuda dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi dan pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kemandirian dan kewirausahaan. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah DIY telah melakukan upaya pembinaan kepada organisasi kepemudaan dan olah raga, menyelenggarakan fasilitas kegiatan, serta menyediakan berbagai macam fasilitas dan infrastruktur. Namun, belum semuanya mampu mengakomodir semua kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan potensi kepemudaan dan olah raga.

Perkembangan sarana, kegiatan, dan organisasi kepemudaan di wilayah DIY dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data dari Disdikpora DIY disajikan dalam Tabel 4.9. Jumlah kegiatan olahraga, kegiatan kepemudaan, dan organisasi pemuda tercatat tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Sementara perkembangan gelanggang olah raga yang dikelola pemerintah terlihat meningkat secara nyata. Jumlah tersebut belum mencakup gelanggang dan sarana olah raga yang dikelola secara komersial oleh swasta dan yang dikelola oleh komunitas

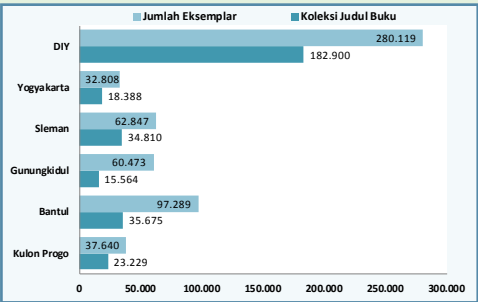
atau perkumpulan yang berbasis pemuda dan olahraga.

4.4. PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Pencapaian modal pembangunan manusia yang berkualitas tidak semata-mata ditentukan oleh proses melalui jalur pendidikan formal. Banyak aspek yang ikut berpengaruh dan salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pendukung seperti unit perpustakaan dan arsip. Perpustakaan tidak sekedar menjadi unit institusi yang mengelola koleksi karya cetak, karya tulis, dan karya rekam dengan sistem yang profesional. Namun, juga menjadi media pembelajaran yang mendukung dan memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan informasi. Keberadaan perpustakaan pada berbagai tingkatan pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, komunitas, tempat ibadah, dan lainnya membantu mendorong minat dan budaya baca penduduk. Melalui media perpustakaan kemampuan dasar penduduk dalam membaca dan memperoleh informasi penting dari berbagai sumber dapat ditingkatkan. Sementara, Lembaga Kearsipan Daerah memiliki fungsi untuk mengelola arsip dan warisan budaya agar tetap utuh, otentik, dan terpercaya.

DIY memiliki potensi kearsipan yang sangat besar yang dipengaruhi oleh faktor

Gambar 4.18.  
Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menurut Jenis, 2015



Sumber: BPAD DIY

Tabel 4.18.  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Pemerintah di DIY, 2012-2015 (Orang)

Perpustakaan	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DIY	108.000	132.307	169.889	71.313
Kulon Progo	67.875	76.634	89.195	101.515
Kabupaten Bantul	93.562	108.291	175.202	218.521
Kabupaten Gunungkidul	30.150	30.445	32.555	26.714
Kabupaten Sleman	45.576	50.801	108.875	609.754
Kota Yogyakarta	102.508	111.486	126.554	163.111
Jumlah	447.671	650.144	702.270	1.190.928

Sumber: BPAD DIY

sejarah panjang baik sebagai kerajaan maupun sebagai institusi pemerintahan provinsi. Seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan kearsipan juga mengalami banyak perkembangan dan kemudahan. Berdasarkan data dari Badan Arsip Daerah DIY, hingga akhir tahun 2015 jumlah arsip tekstual yang diolah mencapai 27 ribu dan arsip foto sebanyak 1500. Selain itu, juga terdapat koleksi arsip rekaman suara, audio visual, dan kartografi.

Sebagai representasi “Kota Pelajar”, di seluruh wilayah DIY terdapat berbagai fasilitas perpustakaan umum dengan ribuan koleksi buku yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan penduduk sampai level desa. Jumlah perpustakaan di wilayah DIY mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2015, jumlah seluruh unit perpustakaan di wilayah DIY tercatat sebanyak 4.515 unit perpustakaan yang mencakup perpustakaan pemerintah daerah, institusi pemerintah/SKPD, perguruan tinggi/sekolah, yayasan/lembaga keagamaan, komunitas, dan lainnya. Pemerintah daerah DIY memiliki beberapa unit perpustakaan umum yang tersebar di beberapa lokasi, seperti Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jl Malioboro, RBM Sewon, dan Grhatama Jl Janti. Untuk mempermudah akses penduduk, BPAD DIY juga menyediakan layanan perpustakaan keliling yang menjangkau 12 titik lokasi di seluruh wilayah DIY. Setiap pemerintah kabupaten/kota juga memiliki unit perpustakaan umum dan untuk melayani kebutuhan informasi penduduk sampai level desa pemerintah kabupaten/kota juga mengaktifkan perpustakaan pada 1 desa. Pada tahun 2015, jumlahnya tercatat sebanyak 447 unit dan meningkat cukup nyata dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Pengunjung yang memanfaatkan layanan perpustakaan terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data jumlah total pengunjung ke perpustakaan pemerintah daerah DIY dan kabupaten kota selama tahun 2015 tercatat

mencapai 1,2 juta dan mengalami peningkatan sebesar 38 persen per tahun selama periode 2012-2015. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang semakin membaik, jumlah koleksi buku yang semakin bertambah dan bervariasi, serta peningkatan jumlah unit perpustakaan. Kualitas dan kemudahan pelayanan dalam beberapa tahun terakhir terus dikembangkan melalui aplikasi layanan digital Jogja Library for All. Aplikasi ini memberi peluang bagi pengunjung untuk mengakses katalog buku secara online dari berbagai sumber perpustakaan di DIY.

Jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan umum pemerintah DIY pada akhir tahun 2015 terdiri dari 182,9 ribu judul dan 280,2 ribu eksemplar. Berdasarkan kabupaten/kota, jumlah koleksi terbanyak dimiliki oleh perpustakaan umum pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman dengan koleksi masing-masing sebanyak 35,7 ribu dan 34,8 ribu judul.

## 4.5. KEBUDAYAAN

DIY memiliki potensi budaya yang beraneka ragam. Khasanah budaya DIY merupakan perpaduan antara budaya yang bersifat fisik seperti kawasan cagar budaya, bangunan dan benda cagar budaya, situs, dan lainnya dengan budaya yang bersifat non fisik seperti karya seni, adat istiadat, tradisi, sistem sosial, dan perilaku budaya lainnya. Potensi budaya DIY telah mendapatkan pengakuan luas secara pada level nasional maupun internasional. Bahkan, beberapa karya seni yang tumbuh di wilayah DIY sebagai representasi budaya Jawa seperti batik, wayang kulit, keris, gamelan, dan lainnya telah diakui sebagai warisan budaya dunia. Implementasi Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY memberi semangat baru untuk lebih mengaktualisasikan dan mengembangkan nilai-nilai dan semangat budaya dalam proses pembangunan, karena salah satu urusan keistimewaan yang diatur

Tabel 4.19.  
Persebaran Benda Cagar Budaya,  
Bangunan Cagar Budaya, Situs dan  
Peninggalan Sejarah di DIY, 2015

Jenis Peninggalan Sejarah	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangunan Cagar Budaya	44	90	27	103	617	881
Benda Cagar Budaya	84	274	63	279	49	749
Situs	15	61	26	80	2	184
Kawasan Cagar Budaya	-	5	1	3	6	15
Monumen Perjuangan	12	17	4	22	15	70
Museum	-	8	1	13	21	43

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com)

dalam UU Keistimewaan adalah kebudayaan. cukup terbuka.

Ragam khasanah budaya DIY senantiasa mengalami perkembangan dinamis yang didukung oleh kreativitas dan inovasi insan pelaku budaya dan seni yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sementara, Pemerintah Daerah DIY memiliki peran yang kuat dalam menyusun strategi perencanaan dan regulasi pembangunan kebudayaan agar bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan perkembangan yang menggembirakan. Capaian pembangunan kebudayaan dalam beberapa tahun dapat dikaji berdasarkan perkembangan statistik kebudayaan antar waktu maupun sebaran menurut wilayah di DIY.

### Sejarah, Purbakala, dan Museum

Peninggalan sejarah dan purbakala yang terdapat di DIY sangat beragam, mulai dari cagar budaya, monumen perjuangan, dan museum. Cagar budaya yang ada di DIY berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs, dan tanpa struktur budaya yang sangat bernilai sebagai warisan kehidupan mulai dari zaman purbakala sampai zaman kontemporer. Jumlah potensi cagar budaya yang dimiliki DIY pada akhir tahun 2015 diidentifikasi sebanyak 1.829 unit. Sementara, jumlah yang masih dilestarikan tercatat sebanyak 422 unit. Bertambahnya jumlah cagar budaya masih sangat mungkin terjadi melalui penemuan-penemuan baru, namun potensi rusak dan hilang akibat ulah tangan manusia maupun faktor alam juga

Tabel 4.11 menyajikan sebaran peninggalan sejarah purbakala di wilayah DIY menurut kabupaten/kota pada tahun 2015. Secara umum, terdapat 15 kawasan cagar budaya dan 14 diantaranya yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kebudayaan DIY. Beberapa kawasan yang cukup populer diantaranya adalah Kawasan Kraton, Malioboro, Pakualaman, Kotagede, Kotabaru, Imogiri, Parangtritis, Pleret, Prambanan, dan Ratu Boko.

Sebaran monumen perjuangan ada di semua kabupaten/kota dengan jumlah 70 unit dan yang paling dominan terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul. Sementara, jumlah museum tercatat sebanyak 43 unit dan sebagian besar terdapat di Kota Yogyakarta. DIY memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pengelolaan dan pelestarian museum di Indonesia, karena 14 persen museum di Indonesia berada di wilayah DIY.

Perkembangan jumlah peninggalan sejarah di DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup nyata. Hampir semua jenis peninggalan sejarah mengalami peningkatan. Implementasi UU Keistimewaan yang didalamnya memuat alokasi dana keistimewaan untuk kegiatan kebudayaan mendorong upaya pelestarian semua cagar budaya berjalan lebih intensif dan upaya penemuan baru benda cagar budaya juga dilakukan lebih masif.

Tabel 4.20.  
Perkembangan Benda Peninggalan Sejarah di DIY,  
2011-2015

Jenis Peninggalan Sejarah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangunan Cagar Budaya	511	520	947	877	881
Benda Cagar Budaya	747	747	762	763	764
Situs	95	95	176	184	184
Kawasan Cagar Budaya	12	12	13	13	15
Monumen Perjuangan	44	44	52	65	70
Museum	34	34	39	43	43

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com)

Adat Istiadat, Tradisi, dan Sistem Nilai Budaya Lainnya

Keunggulan sebuah bangsa terletak pada aspek kualitas nilai-nilai spiritualitas, intelektualitas, hubungan sosial, dan semangat kerja. Dalam kehidupan yang berjalan secara dinamis, masyarakat DIY masih mampu mempertahankan nilai-nilai luhur warisan masa lalu dalam berbagai bentuk adat, tradisi, dan sistem nilai budaya lainnya yang kental dengan nilai-nilai yang luhur.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah upacara adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat sebanyak 473. Beberapa jenis upacara adat yang cukup populer adalah baritan, bersih desa, labuhan, khaul, rasulan, nyadran, sedekah laut, dan lainnya. Upacara tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat

Tabel 4.21.  
Perkembangan Sistem Nilai Budaya dalam Masyarakat DIY, 2011-2015

Jenis Budaya	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upacara Adat	358	358	452	459	473
Upacar Tradisi	34	34	35	35	35
Organisasi Penghayat Kepercayaan	90	90	94	94	112
Makanan Tradisional	137	137	138	147	149
Permainan Tradisional	34	34	34	34	34
Jenis Pakaian	15	15	15	15	15
Sanggar Rias	349	349	401	405	405

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com)

tercatat sebanyak 35. Beberapa jenis upacara tradisi yang populer adalah upacara bancaan, brokohan, khitanan, tingkeban, perkawinan, puputan, selamatan, dan lainnya. Jenis makanan tradisional yang masih dikonsumsi masyarakat tercatat sebanyak 149 jenis dan yang paling populer adalah gudeg, bakpia, thiwul, geplak, kipo, dan lainnya. Selain itu, di tengah-tengah masyarakat DIY juga tercatat sebanyak 34 jenis permainan tradisional, 15 jenis pakaian tradisional, dan 405 unit sanggar rias.

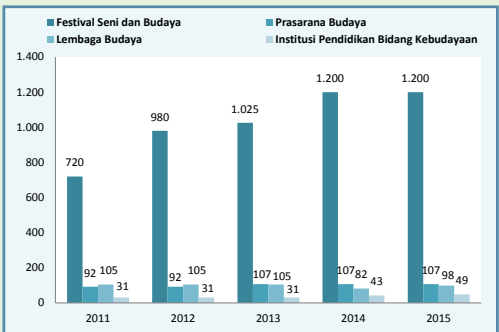
Kegiatan upacara adat dan tradisi di beberapa tempat telah dikemas dengan baik. Upacara tidak sekedar menjadi ritual budaya semata, namun juga menjadi paket kegiatan wisata berbasis budaya yang mampu menarik kunjungan wisatawan domestik dan

Tabel 4.22.  
Perkembangan Pelaku Budaya dan Seni di DIY, 2011-2015

Pelaku Seni dan Budaya	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Organisasi Sinematografi	14	14	42	42	42
Organisasi Seni Pertunjukan	4.206	4.231	5.226	5.241	5.434
Organisasi Seni Rupa	8	8	16	17	17
Galeri Seni Rupa	26	26	29	29	29
Kerajinan Properti Budaya	178	178	246	241	244
Tokoh Seniman dan Budayawan	369	369	486	487	489
Penghargaan Seniman & Budayawan	258	258	258	261	264

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com)

Gambar 4.19.  
Perkembangan Prasarana dan Kegiatan Budaya di DIY, 2011-2015



Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com)

mancanegara. Beberapa upacara juga dikemas dalam bentuk festival yang memberi ruang berekspresi bagi pelaku seni dan budaya, sekaligus memberikan alternatif pendidikan dan hiburan bagi masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah DIY dalam mendorong pengembangan dan pelestarian kegiatan adat, tradisi, dan budaya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kegiatan serta sarana dan prasarana budaya. Selain, itu pemerintah daerah juga melakukan pembinaan terhadap potensi budaya yang ada di desa melalui penetapan kawasan Desa Budaya dengan Surat Keputusan Gubernur. Pada tahun 2015, terdapat 43 desa budaya dan sebanyak 33 desa sudah mendapat predikat Desa Bina Budaya (Desa Budaya) melalui SK Gubernur. Kriteria penentuan desa budaya dilihat dari aspek sistem kepercayaan, sistem kesenian, mata pencaharian, sistem lingkungan, sistem sosial, potensi budaya yang mencakup adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang. Dari sejumlah desa budaya, 17 diantaranya memiliki predikat maju dan yang lainnya berada dalam tahap tumbuh dan berkembang.

#### Pelaku, Sarana Prasarana, dan Kegiatan Seni Budaya

Potensi seni dan budaya dalam masyarakat dapat dilihat eksistensi pelaku seni dan budaya beserta kegiatan seni dan budaya. Pasca implementasi UU Keistimewaan DIY, perkembangan pelaku seni dan budaya maupun even/kegiatan seni budaya dalam masyarakat menunjukkan peningkatan secara nyata. Jumlah organisasi perfilman, seni pertunjukan, seni rupa terlihat meningkat selama periode 2011-2015. Keberadaan tokoh seniman dan budayawan di DIY juga semakin meningkat dan sejalan dengan peningkatan jumlah penghargaan untuk seniman dan budayawan.

#### Peningkatan eksistensi pelaku seni

dan budaya juga ditopang oleh keberadaan sarana dan prasarana, lembaga budaya, institusi pendidikan di bidang budaya, dan aktivitas festival seni dan budaya. Secara



umum, eksistensi pelaku seni budaya beserta aktivitasnya memiliki persinggungan yang kuat dengan posisi DIY sebagai kota pelajar.

4.6. KETENAGAKERJAAN

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Semakin baik kualitas tenaga kerja yang dimiliki suatu wilayah maka produktivitas pekerjaanya juga akan semakin meningkat. Konsep ketenagakerjaan yang biasa digunakan di Indonesia merujuk pada rekomendasi dari International Labor Organization atau ILO. ILO membagi penduduk berusia produktif (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitasnya menjadi dua kelompok, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup semua penduduk berusia kerja yang berstatus sedang bekerja dan pengangguran. Sementara, bukan angkatan kerja mencakup mereka yang aktivitasnya bersekolah,

mengurus rumah tangga, dan lainnya. Bekerja adalah melakukan kegiatan pekerjaan dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu. Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, namun pertumbuhan kesempatan kerja berjalan lebih lambat. Akibatnya, tidak semua angkatan kerja dapat terserap oleh pasar tenaga kerja dan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga

Gambar 4.20.  
Pembagian Penduduk Berdasarkan Aktivitas Ketenagakerjaan



Sumber: BPS

kerja. Ketidakseimbangan ini memunculkan persoalan pengangguran dan beberapa persoalan ketenagakerjaan yang lainnya. Aspek ketenagakerjaan yang dikaji dalam bagian ini diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta karakteristik penduduk bekerja. Data yang dikaji sebagian besar bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan secara periodik sampai level kabupaten/kota.

#### 4.6.1. Komposisi Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Komposisi penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) di DIY menurut kegiatan utama berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013-2016 disajikan dalam Tabel 4.15. Jumlah penduduk berusia kerja meningkat dari 2,8 juta jiwa di bulan Februari 2013 menjadi 2,9 juta jiwa di bulan Februari 2016. Komposisi angkatan kerja terhadap penduduk berusia kerja berfluktuasi pada level 68-73 persen. Sementara, komposisi bukan angkatan kerja berfluktuasi antara 27 sampai 32 persen. Pada umumnya, kelompok bukan angkatan kerja didominasi oleh mereka yang mengurus rumah tangga dan bersekolah.

Pada bulan Februari 2016, jumlah angkatan kerja di DIY tercatat sebanyak 2,1

juta jiwa terdiri dari 1,2 juta jiwa laki-laki dan 0,9 juta jiwa perempuan. Dengan jumlah tersebut, maka TPAK DIY pada Februari 2016 tercatat sebesar 72,2 persen. Angka ini menggambarkan proporsi atau bagian dari penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian baik berstatus bekerja maupun pengangguran. Secara umum, terdapat pola TPAK bulan Februari cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK bulan Agustus. Fenomena ini terkait dengan siklus masa puncak panen tanaman pangan khususnya padi yang terjadi selama kuartal pertama (Januari-April) setiap tahun. Masa puncak panen ini mendorong peningkatan TPAK di daerah perdesaan, karena pada masa tersebut permintaan pekerja pertanian meningkat tajam.

Perkembangan TPAK DIY menurut jenis kelamin menunjukkan TPAK laki-laki memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. TPAK laki-laki berfluktuasi pada kisaran 77-83 persen. Sementara, TPAK perempuan berfluktuasi pada kisaran 57-67 persen. Fenomena ini mengindikasikan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian cenderung lebih dominan dari perempuan. Hal ini terjadi karena pengaruh budaya. Sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan.

Tabel 4.23.  
Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama di DIY, 2013-2016

Kegiatan	2013		2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>1.958.084</b>	<b>1.949.243</b>	<b>2.032.896</b>	<b>2.023.461</b>	<b>2.098.080</b>	<b>1.971.463</b>	<b>2.096.865</b>
Bekerja	1.885.040	1.886.071	1.988.912	1.956.043	2.012.626	1.891.218	2.037.864
Pengangguran	73.044	63.172	43.984	67.418	85.454	80.245	59.001
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>838.726</b>	<b>863.845</b>	<b>796.887</b>	<b>824.293</b>	<b>771.935</b>	<b>911.517</b>	<b>807.436</b>
Sekolah	306.151	201.760	349.639	270.545	249.336	297.972	264.858
Mengurus RT	466.843	479.109	352.183	439.522	422.297	475.397	400.382
Lainnya	65.732	182.976	95.065	114.226	100.302	138.148	142.196
<b>Penduduk Usia 15+</b>	<b>2.796.810</b>	<b>2.813.088</b>	<b>2.829.783</b>	<b>2.847.754</b>	<b>2.870.015</b>	<b>2.882.980</b>	<b>2.904.301</b>
<b>TPAK</b>	<b>70,01</b>	<b>69,29</b>	<b>71,84</b>	<b>71,05</b>	<b>73,10</b>	<b>68,38</b>	<b>72,20</b>

Sumber: Sakernas, BPS

Ada pandangan bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah tanggung jawab laki-laki, sementara peran perempuan hanya membantu. Pandangan ini mendorong lebih sedikit perempuan yang masuk dan terlibat dalam pasar tenaga kerja.

Perkembangan TPAK menurut wilayah menunjukkan TPAK daerah perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dari daerah perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi pada level 73-82 persen, sementara TPAK perkotaan berfluktuasi pada level 62-72 persen. Hal ini terkait dengan kecenderungan penduduk perkotaan terutama yang berusia muda yang lebih memilih untuk menyelesaikan studi sampai tuntas sebelum masuk pasar tenaga kerja. Kelompok ini juga lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan dan tingkat upah yang diharapkan. Sementara, penduduk perdesaan berusia muda memiliki masa bersekolah relatif lebih singkat, kemudian masuk ke dalam pasar tenaga kerja dengan tujuan membantu ekonomi keluarga. Perbedaan TPAK perkotaan dan perdesaan juga dipengaruhi oleh partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Banyak penduduk

perempuan di perkotaan yang memilih untuk mengurus rumah tangga dan memutuskan untuk tidak masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Sementara, perempuan di daerah perdesaan juga lebih aktif untuk membantu ekonomi keluarga, meskipun statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar dan bekerja di pertanian atau sektor informal lainnya.

Berdasarkan kabupaten/kota di DIY, TPAK bulan Agustus 2015 tertinggi tercatat di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Sementara, TPAK terendah tercatat di Kabuapten Sleman dan Kota Yogyakarta. Rendahnya TPAK di Sleman dan Kota Yogyakarta disebabkan oleh tingginya proporsi penduduk usia kerja yang statusnya masih bersekolah.

TPAK DIY pada bulan Februari 2016 menurut kelompok usia kerja memiliki pola seperti huruf U terbalik. TPAK pada kelompok usia 15-19 tahun tercatat paling rendah sebesar 21,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya komposisi penduduk pada kelompok usia ini yang berstatus masih sekolah. TPAK tercatat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok usia sampai

Tabel 4.24.  
TPAK DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2005-2016 (Persen)

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin			Wilayah		
	L	P	L+P	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Feb 2005	80,26	63,87	71,95	65,67	81,29	71,95
Nov 2005	78,80	60,92	69,83	64,79	77,35	69,83
Feb 2006	79,00	61,95	70,30	64,96	78,26	70,30
Agst 2006	79,07	59,86	69,20	62,71	78,81	69,20
Feb 2007	81,25	62,64	71,69	67,44	77,98	71,69
Agst 2007	80,21	57,54	68,56	65,41	73,24	68,56
Feb 2008	79,82	60,15	69,95	65,21	77,04	69,95
Agst 2008	79,44	61,61	70,51	67,37	75,17	70,51
Feb 2009	81,33	62,06	71,70	66,09	79,95	71,70
Agst 2009	80,26	60,19	70,23	66,48	75,82	70,23
Feb 2010	80,18	62,65	71,41	67,01	77,99	71,41
Agst 2010	78,62	61,35	69,76	66,96	73,84	69,76

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin			Wilayah		
	L	P	L+P	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Feb 2011	81,17	65,08	72,93	71,50	75,78	72,93
Agst 2011	81,67	59,62	70,39	67,98	75,19	70,39
Feb 2012	80,84	62,17	71,29	68,72	76,42	71,29
Agst 2012	80,84	62,62	71,52	68,01	78,52	71,52
Feb 2013	79,72	60,73	70,01	67,09	75,85	70,01
Agst 2013	77,95	61,01	69,29	66,03	75,80	69,29
Feb 2014	77,70	66,24	71,84	69,06	77,39	71,84
Agst 2014	80,93	61,60	71,05	67,65	77,85	71,05
Feb 2015	83,95	62,72	73,10	71,95	76,20	73,10
Agst 2015	79,95	57,30	68,38	66,95	71,77	68,38
Feb 2016	81,33	63,45	72,21	68,55	81,09	72,21

Sumber: Sakernas, BPS

menyentuh level tertinggi sebesar 85,1 persen pada kelompok usia 35-39 tahun. Sampai dengan kelompok usia 55-59 tahun, level TPAK masih berada di atas 80 persen. TPAK pada kelompok usia 60 tahun ke atas kembali menurun hingga level 50 persen. Penyebabnya adalah banyak penduduk yang mulai masuk masa pensiun dan tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja.

Komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan mayoritas angkatan kerja di DIY adalah mereka yang berpendidikan menengah atau tamat SMA/SMK dengan proporsi 38,8 persen. Berikutnya secara berturut-turut adalah angkatan kerja yang berpendidikan tamat SD ke bawah dengan proporsi 28,8 persen dan tamat SMP dengan proporsi 18,0 persen. Secara proporsial, mereka yang berpendidikan SMP ke bawah umumnya tinggal di daerah perdesaan dan lebih didominasi oleh penduduk perempuan. Sementara, angkatan kerja yang berpendidikan tinggi memiliki proporsi sebesar 14,4 persen. Rinciannya adalah Diploma I/II/III sebesar 4,4 persen dan Universitas sebesar 10,0 persen. Pada umumnya, angkatan kerja yang berpendidikan tinggi terdapat di daerah perkotaan dan ada kecenderungan proporsi angkatan kerja perempuan yang berpendidikan tinggi lebih besar dari laki-laki.

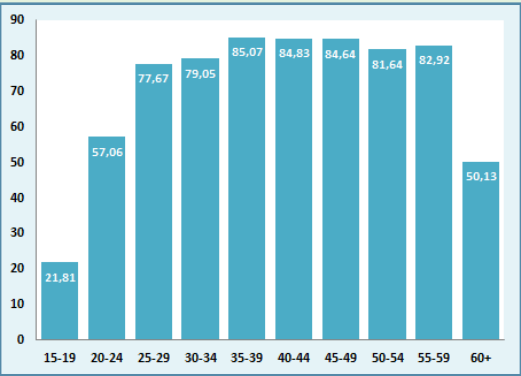
Perkembangan angkatan kerja menurut pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat cukup dinamis. Komposisi angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah cenderung menurun. Sementara, angkatan kerja yang berpendidikan SLTP sederajat relatif stabil. Sebaliknya, angkatan kerja yang berpendidikan tinggi atau SLTA ke atas komposisinya cenderung meningkat. Secara umum, hal ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas pendidikan angkatan kerja di DIY.

4.6.2. Penduduk Bekerja dan Karakteristiknya

Jumlah penduduk bekerja di DIY berdasarkan hasil Sakernas bulan Februari 2016 tercatat sebanyak 2,0 juta yang terdiri dari 1,1 juta pekerja laki-laki dan 0,9 juta pekerja perempuan. Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap angkatan kerja tercatat sebesar 97,2 persen. Angka ini menggambarkan besarnya tingkat kesempatan kerja di DIY pada bulan Februari 2016.

Secara umum, pasar tenaga kerja di DIY didominasi oleh lapangan usaha pada empat sektor, yakni perdagangan, hotel dan restoran; pertanian; jasa-jasa; dan sektor industri pengolahan. Lapangan usaha sektor pertanian yang pada masa awal pembangunan sangat

Gambar 4.21.  
TPAK DIY menurut Kelompok Umur (Persen)



Sumber: Sakernas Februari 2016, BPS

Tabel 4.25.  
Distribusi Angkatan Kerja DIY menurut Pendidikan, Wilayah dan Jenis Kelamin (Persen)

Pendidikan Terakhir	Wilayah		Jenis Kelamin		Jumlah
	K	D	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	19,53	47,84	23,56	35,17	28,77
SMP	16,14	21,95	17,55	18,63	18,04
SMA Umum	19,45	11,20	19,09	13,90	16,76
SMA Kejuruan	26,44	12,92	26,53	16,49	22,02
Diploma I/II/III	5,76	1,63	3,67	5,33	4,41
Universitas	12,68	4,46	9,60	10,47	9,99
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas Februari 2016, BPS

Tabel 4.26.  
Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Usaha, 2010-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2010	2011		2012		2013		2014		2015		2016
	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pertanian	30,40	24,29	26,17	25,43	27,82	24,38	28,18	25,42	25,41	25,10	23,08	22,81
Industri Pengolahan	13,92	14,22	14,68	15,65	14,97	12,96	13,36	14,91	13,97	17,70	14,61	17,85
Konstruksi	6,19	5,55	7,30	5,68	6,92	6,39	5,54	4,84	7,48	8,15	8,19	8,53
Perdagangan, Hotel, & Restoran	24,69	25,92	25,76	26,37	24,52	26,38	25,87	26,64	25,86	24,34	25,67	26,60
Transportasi dan Komunikasi	3,80	4,75	3,70	3,72	3,27	3,87	3,48	3,78	3,52	2,38	3,23	2,35
Keuangan, Real Estat & Jasa Prsh	2,18	2,20	2,74	2,68	3,06	3,34	2,87	3,37	3,75	2,98	3,00	2,61
Jasa-jasa	17,93	21,83	18,73	20,25	18,58	21,46	19,93	20,75	19,14	18,71	21,25	18,39
Lainnya (Penggalian, LGA)	0,89	1,25	0,92	0,22	0,86	1,22	0,77	0,29	0,86	0,65	0,96	0,87
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas, BPS

dominan dalam menyerap angkatan kerja, secara berangsur-angsur peranannya mulai tergantikan oleh lapangan usaha di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menyerap sebanyak 26,6 persen pekerja pada bulan Februari 2016. Sementara, sektor pertanian masih mampu menyerap 22,8 persen tenaga kerja. Lapangan usaha pada sektor jasa-jasa dan industri pengolahan masing-masing menyerap 18,4 persen dan 17,8 persen tenaga kerja. Lapangan usaha di sektor yang lainnya menyerap angkatan kerja dengan level proporsi yang bervariasi di bawah 10 persen.

Berdasarkan series data selama tujuh tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian

dalam menyerap angkatan kerja terlihat semakin menurun dari 30,4 persen di bulan Agustus 2010 menjadi 22,8 persen di bulan Februari 2016. Kontibusi lapangan usaha transportasi dan komunikasi, keuangan, jasa-jasa, dan lainnya dalam menyerap angkatan kerja relatif stabil. Sementara, lapangan usaha industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; dan konstruksi; memiliki kontibusi menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat secara bertahap. Secara umum, hal ini mengindikaikan adanya proses transformasi atau perubahan struktural dalam perekonomian DIY dari sektor pertanian yang berbasis perdesaan menuju sektor industri dan jasa yang berbasis perkotaan.

Tabel 4.27.  
Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Status Pekerjaan Utama, 2010-2016 (Persen)

Status Pekerjaan Utama	2010	2011		2012		2013		2014		2015		2016
	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Berusaha Sendiri	13,75	15,30	13,47	13,61	12,52	13,52	12,92	12,14	13,92	15,06	15,54	14,15
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	24,35	17,52	20,67	21,32	19,51	20,15	19,83	19,97	16,59	15,01	14,04	19,49
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3,90	4,26	4,16	3,90	4,35	4,10	4,57	4,10	3,90	3,92	3,48	3,52
Buruh/ Karyawan	30,57	39,35	39,10	38,18	38,79	39,75	39,46	41,81	43,22	41,94	45,31	38,11
Pekerja Bebas Pertanian	8,56	8,61	8,32	7,14	8,47	8,74	7,12	5,13	7,62	9,46	9,72	11,44
Pekerja Tak Dibayar	18,87	14,96	14,28	15,85	16,36	13,73	16,10	16,85	14,75	14,61	11,92	13,29
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas, BPS

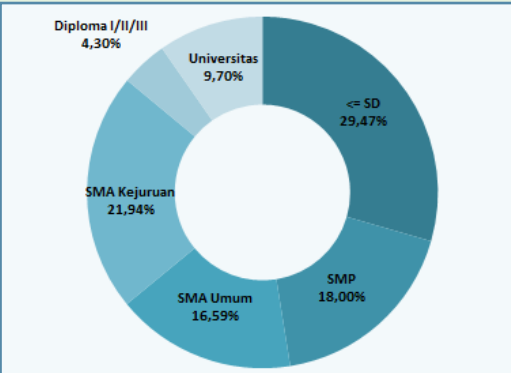
Komposisi pekerja menurut lapangan usaha pada level kabupaten kota terlihat lebih bervariasi. Secara umum, komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian terlihat dominan di Kabupaten Gunungkidul (52,4 %) dan Kulonprogo (37,8 %). Komposisi penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran terlihat dominan di Kabupaten Bantul (29,9 %) dan Kota Yogyakarta (42,2 %). Sementara, komposisi di Kabupaten Sleman didominasi oleh pekerja di sektor jasa (28,6 %).

Struktur penduduk bekerja berdasarkan status dalam pekerjaan utama didominasi oleh mereka yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Komposisi buruh/karyawan/pegawai pada bulan Februari 2016 mencapai 38,1 persen. Proporsi pekerja yang statusnya berusaha mencapai 37 persen, terdiri dari berusaha sendiri (14,2 %), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (19,5 %) dan berusaha dibantu buruh tetap (3,5 %). Perkembangan proporsi penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar cenderung menurun, sementara yang berusaha sendiri semakin meningkat. Proporsi pekerja bebas/lepas di sektor pertanian dan non pertanian tercatat sebesar 11,4 persen, sementara pekerja tak dibayar sebesar 11,3 persen.

Komposisi penduduk bekerja menurut pendidikan secara umum memiliki pola yang sama dengan komposisi angkatan kerja. Berdasarkan data Sakernas bulan Februari 2016, proporsi terbesar penduduk bekerja adalah mereka yang berpendidikan menengah (SMA dan SMK). Proporsi terbesar berikutnya adalah pekerja berpendidikan SD ke bawah dan SLTP sederajat. Populasi tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah dan SLTP cukup dominan di daerah perdesaan dan mayoritas adalah wanita. Mereka banyak mengisi kesempatan kerja di sektor pertanian dan cukup banyak yang status pekerjaannya buruh/pekerja tak dibayar. Sementara, pekerja yang berpendidikan tinggi umumnya mengisi pekerjaan formal yang sebagian besar terdapat di daerah perkotaan. Komposisi pekerja yang berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang semakin meningkat.

Komposisi penduduk bekerja berdasarkan jumlah jam kerja dalam seminggu didominasi oleh mereka yang memiliki jam kerja di atas 35 jam per minggu atau bekerja secara penuh. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2016 pekerja penuh mencapai 72,2 persen. Secara umum, pekerja penuh di daerah perkotaan proporsinya lebih besar

Gambar 4.22.  
Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan (Persen)



Sumber: Sakernas Februari 2016, BPS

Tabel 4.28.  
Distribusi Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja, Wilayah dan Jenis Kelamin (Persen)

Jumlah Jam Kerja Seminggu	Wilayah		Jenis Kelamin		Jumlah
	K	D	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-7	3,25	2,10	2,32	3,53	2,87
1-7	2,58	3,34	0,51	5,64	2,83
8-14	2,95	6,88	4,61	3,83	4,26
15-24	6,39	12,95	5,50	12,27	8,56
25-34	7,55	12,66	8,73	9,86	9,24
35+	77,28	62,09	78,34	64,87	72,24
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas Februari 2016, BPS

dibandingkan dengan pekerja penuh di daerah perdesaan. Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan formal sebagian besar terdapat di daerah perkotaan. Sementara, berdasarkan jenis kelamin terlihat proporsi laki-laki yang pekerja penuh lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

4.6.3. Pengangguran

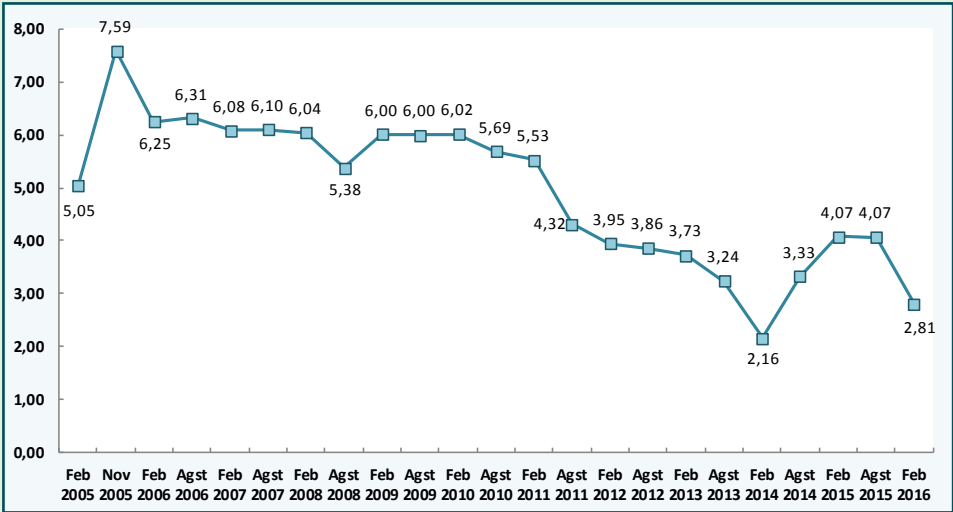
Pengangguran merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Ukuran untuk menggambarkan komposisi pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dihitung dari proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPT DIY selama Februari 2005-Februari 2016 terlihat berfluktuasi pada level 2,2-7,6 persen dan secara umum memiliki kecenderungan yang semakin menurun.

Pada bulan Februari 2005, TPT DIY tercatat sebesar 5,0 persen. Angka ini meningkat tajam sampai level tertinggi sebesar 7,9 persen di bulan November 2005. Peningkatan TPT yang cukup tajam terjadi akibat dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM selama dua kali dalam setahun di awal dan akhir

tahun 2015. Kenaikan harga BBM ini memberi pengaruh terhadap produksi barang dan jasa pada sisi penawaran. Beban pengeluaran perusahaan untuk komponen bahan bakar minyak dan energi akan meningkat tajam. Peningkatan biaya ini disikapi secara rasional oleh perusahaan dengan mengurangi volume produksi atau mengurangi penggunaan jumlah pekerja produksi dan hal ini berdampak pada kenaikan jumlah penganggur. Pada periode berikutnya, secara bertahap TPT DIY semakin menurun hingga mencapai level 2,8 persen pada bulan Februari 2016.

Perkembangan TPT menurut wilayah menunjukkan pola yang hampir sama dengan TPT total. Terdapat kecenderungan TPT di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPT daerah perdesaan. Secara kasar, fenomena ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di perdesaan lebih mudah terserap pasar kerja. Alasannya pada umumnya angkatan kerja di perdesaan akan menerima jenis pekerjaan apa saja termasuk jenis pekerjaan yang sifatnya informal dan meskipun berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Sebaliknya, angkatan kerja perkotaan lebih selektif dalam memilih

Gambar 4.23.  
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY, 2005-2016 (Persen)



Sumber: Sakernas, BPS

Tabel 4.29.

TPT DIY menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2010-2016(Persen)

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin		Wilayah		Jumlah
	L	P	K	D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Feb 2010	7,42	4,21	7,10	4,63	6,02
Agst 2010	6,97	4,01	6,19	5,08	5,69
Feb 2011	5,86	4,90	6,27	4,64	5,53
Agst 2011	5,13	2,86	4,14	4,55	4,32
Feb 2012	4,84	2,36	4,91	2,76	3,95
Agst 2012	4,73	2,37	3,96	3,74	3,86
Feb 2013	4,45	2,47	3,22	4,37	3,73
Agst 2013	3,93	2,04	3,59	2,81	3,24
Feb 2014	2,68	1,24	2,67	1,60	2,16
Agst 2014	4,00	2,17	3,88	2,65	3,33
Feb 2015	5,30	0,95	5,23	2,59	4,07
Agst 2015	4,55	3,02	3,72	4,54	4,07
Feb 2016	3,54	1,32	3,56	1,90	2,81

jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan tingkat upah yang diharapkan. Lamanya waktu dalam mencocokkan jenis pekerjaan inilah yang mendorong TPT daerah perkotaan selalu lebih tinggi dari TPT daerah perdesaan. Perbedaan level TPY perkotaan dan perdesaan juga dipengaruhi oleh faktor jenis pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih bervariasi sebagai ciri pusat perekonomian. Kondisi ini mendorong migrasi angkatan kerja dari

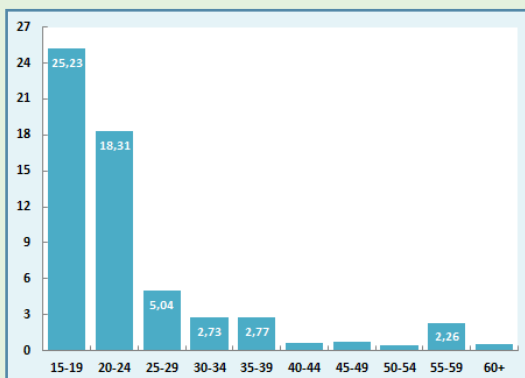
daerah perdesaan ke perkotaan. Mereka ada yang tinggal dengan cara mondok/sewa/kost dan ada yang secara komuter atau pulang pergi. Tidak semua angkatan kerja tersebut dapat langsung terserap dalam pasar kerja di perkotaan. Sebagian di antara mereka ada yang masih menunggu mendapatkan pekerjaan atau sudah bekerja dan masih mencari pekerjaan baru. TPT perkotaan pada bulan Februari 2016 tercatat sebesar 3,5 persen, sementara TPT perdesaan sebesar 1,3 persen.

Perbandingan TPT bulan Agustus 2015 menurut kabupaten/kota menunjukkan TPT tertinggi tercatat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan level sebesar 5,5 persen dan 5,4 persen. Sementara, level TPT terendah tercatat di Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,9 persen.

Pola TPT menurut jenis kelamin tampak lebih dinamis dan lebih berfluktuasi. Meskipun demikian, TPT keduanya terlihat memiliki kecenderungan yang semakin menurun. Selama periode Februari 2005-Agustus 2008, TPT perempuan tercatat lebih tinggi dari laki-laki. Namun, mulai Februari 2009-Februari 2016 TPT laki-laki tercatat lebih tinggi. Pada Februari 2016, TPT laki-laki tercatat sebesar 3,6 persen dan perempuan sebesar 1,9 persen. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh karakter penduduk laki-laki yang belum/tidak punya

Gambar 4.24.

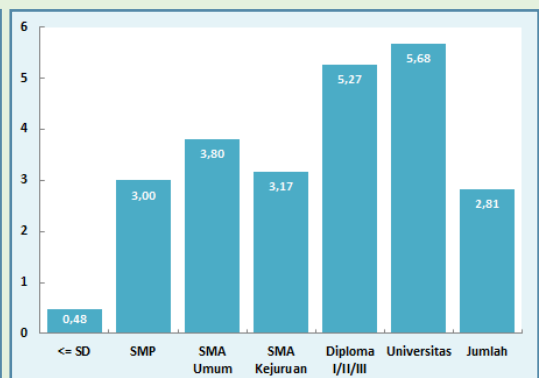
TPT DIY menurut Kelompok Umur (Persen)



Sumber: Sakernas Februari 2016, BPS

Gambar 4.25.

TPT DIY menurut Pendidikan Tertinggi (Persen)



Sumber: Sakernas Februari 2016, BPS

pekerjaan yang lebih proaktif untuk mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Sementara, banyak perempuan yang belum/ tidak bekerja lebih pasif dalam mencari pekerjaan dan lebih memilih untuk mengurus rumah tangga.

TPT DIY menurut kelompok usia memiliki pola semakin menurun seiring dengan bertambahnya kelompok usia. TPT kelompok usia muda (15-19 tahun dan 20-24 tahun) tercatat pada level 25,2 persen dan 18,3 persen. Tingginya TPT pada kedua kelompok usia ini terjadi karena pada umumnya mereka yang baru saja menyelesaikan masa pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan tidak bisa secara langsung mendapatkan pekerjaan atau terserap dalam pasar tenaga kerja. Sebagian di antara mereka masih memilih-milih mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan, tingkat upah, dan lokasi yang diinginkan. Selama waktu mencari dan melakukan penyesuaian pekerjaan mereka masih tinggal di wilayah DIY, sehingga jeda waktu dalam melakukan penyesuaian pekerjaan ini mendorong tingginya angka TPT pada kelompok usia muda di DIY. Seiring bertambahnya kelompok usia penduduk, angka TPT terlihat semakin mengecil atau semakin rendah. Bahkan, pada kelompok usia 40-54 TPT berada pada level di bawah 1 persen. TPT pada kelompok usia di atas 60 tahun sudah mendekati nol persen, karena mereka yang sudah berhenti bekerja atau memasuki masa pensiun akan langsung masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja.

Pola TPT menurut kelompok usia sejalan dengan pola TPT menurut pendidikan. Secara umum, TPT terendah tercatat pada kelompok angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah dengan level kurang dari 1 persen. Level TPT semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Artinya, TPT penduduk berpendidikan SD<SMP<SMA/SMK<Diploma<Universitas.

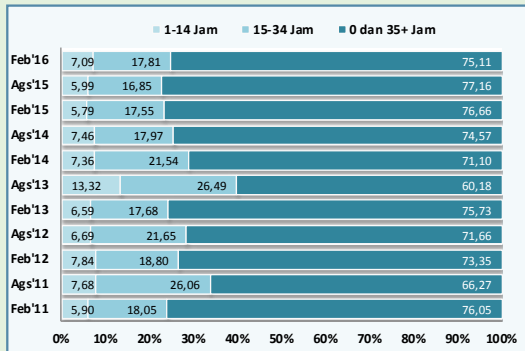
Hal ini menggambarkan adanya persoalan pengangguran terdidik di DIY. Dari 59 ribu penganggur atau pencari kerja di DIY pada bulan Maret 2016, 28 persen diantaranya memiliki pendidikan tertinggi Diploma dan Universitas. Mereka pada umumnya adalah lulusan baru dari perguruan tinggi yang masih tinggal di wilayah DIY. Mereka adalah angkatan kerja baru yang sedang menunggu untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan selepas masa bersekolah.

### 4.6.4. Tingkat Setengah Pengangguran

Isu ketenagakerjaan lain yang cukup menarik untuk dicermati adalah struktur pekerja menurut jam kerja per minggu. Komposisi pekerja dengan jumlah jam kerja di atas jam kerja normal (35 jam seminggu) berdasarkan hasil Sakernas selama beberapa tahun terakhir berada di atas 70 persen. Pada kondisi Agustus 2015, proporsinya sebesar 77,2 persen.

Komposisi pekerja dengan jumlah jam kerja di bawah jam kerja normal tercatat sebesar 22,8 persen. Jika lebih dirinci, maka sebanyak 16,8 persen pekerja memiliki jumlah jam kerja 15-34 jam seminggu dan 6 persen lainnya memiliki jumlah jam kerja 1-14 jam selama seminggu. Hal ini mengindikasikan masih cukup besar populasi pekerja yang termasuk

**Gambar 4.25.**  
Distribusi Persentase Penduduk Bekerja DIY menurut Jumlah Jam Kerja selama Seminggu



Sumber: diolah dari data Sakernas, BPS

dalam kategori setengah pengangguran (under unemployment) karena memiliki jam kerja kurang dari jam kerja normal. Dalam beberapa tahun terakhir angka setengah pengangguran di DIY menunjukkan perkembangan yang semakin menurun.

Karakteristik setengah pengangguran di DIY secara umum didominasi oleh penduduk berusia tua (60 tahun ke atas), berjenis kelamin perempuan, tinggal di kawasan perdesaan, bekerja di sektor pertanian, serta memiliki pendidikan tertinggi SD ke bawah. Pada kondisi bulan Agustus 2015, tingkat setengah pengangguran pada kelompok umur 60 tahun ke atas tercatat sebesar 42 persen. Tingkat setengah pengangguran penduduk perempuan tercatat sebesar 31,0 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (16,8 %). Di perdesaan, tingkat setengah pengangguran tercatat sebesar 28,4 persen dan lebih tinggi dari daerah perkotaan (20,4 %). Angka setengah pengangguran di sektor pertanian tercatat sebesar 46,1 persen. Sementara, tingkat setengah pengangguran pada penduduk berpendidikan SD ke bawah tercatat sebesar 40,0 persen.

### 4.6.5. Upah Minimum

Upah minimum merupakan standar upah minimal yang harus dibayarkan oleh

pengusaha/perusahaan kepada karyawan/buruh/pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum yang layak (KHL) yang berlaku di kabupaten/kota/provinsi yang bersangkutan. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk menjaga daya beli penduduk/pekerja akibat adanya kenaikan harga atau inflasi. Penentuan UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan birokrat, akademisi dan serikat pekerja melalui survei kebutuhan hidup minimum yang dilakukan setiap tahun. Sementara, UMP diambil dari nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang terendah. UMP DIY adalah UMK Kabupaten Gunungkidul. UMK dan UMP menjadi isu yang sensitif, karena dalam realita tidak semua perusahaan mampu membayar upah sesuai ketentuan. Sementara, nilai nominal UMK/UMP dari sisi pekerja dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup minimum yang layak.

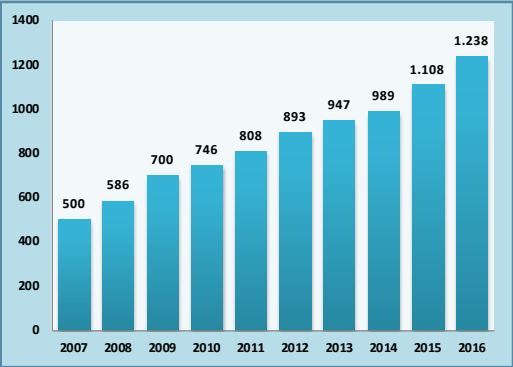
Pada tahun 2016, nilai nominal UMK di DIY terlihat bervariasi. UMK tertinggi ditetapkan di Kota Yogyakarta sebesar Rp1.452.400 sebulan dan terendah di Gunungkidul sebesar Rp1.235.700 sebulan. Dibandingkan dengan tahun 2015, nilai nominal UMK rata-rata meningkat 11,5 persen. Kenaikan ini disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan hidup penduduk akibat pengaruh inflasi barang dan jasa.

Tabel 4.30.  
Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY 2013-2014 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulon Progo	954.339	1.069.000	1.138.000	1.268.870
Bantul	993.484	1.125.000	1.163.800	1.297.700
Gunungkidul	947.114	988.500	1.108.249	1.235.700
Sleman	1.026.181	1.127.000	1.200.000	1.338.000
Yogyakarta	1.065.247	1.173.300	1.302.500	1.452.400
<b>UMP DIY</b>	<b>947.114</b>	<b>988.500</b>	<b>1.108.249</b>	<b>1.235.700</b>

Sumber: Disnakertrans, DIY

Gambar 4.26.  
Perkembangan Nilai Nominal UMP DIY, 2007-2016 (juta Rp)



Sumber: Disnakertrans DIY

Tabel 4.31.

Perkembangan Jumlah TKI asal DIY menurut Negara Tujuan, 2010-2015 (Orang)

Negara Tujuan	Tahun											
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Malaysia	1.807	(98,74)	1.320	(96,14)	1.178	(96,16)	804	(81,79)	1.334	(61,62)	1.104	(60,0)
Taiwan	8	(0,44)	12	(0,87)	8	(0,65)	16	(1,63)	6	(0,28)	158	(8,59)
Singapura	1	(0,05)	8	(0,58)	1	(0,08)	29	(2,95)	124	(5,73)	112	(6,09)
Korea Selatan	4	(0,22)	15	(1,09)	0	(0,00)	0	(0,00)	7	(0,32)	107	(5,82)
Saudi Arabia	0	(0,00)	3	(0,22)	0	(0,00)	0	(0,00)	103	(4,76)	103	(5,60)
Amerika Serikat	0	(0,00)	5	(0,36)	0	(0,00)	82	(8,34)	288	(13,30)	97	(5,27)
Brunei Darussalam	0	(0,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	1	(0,10)	28	(1,29)	49	(2,66)
Lainnya	10	(0,55)	10	(0,73)	38	(3,10)	51	(5,19)	275	(12,70)	110	(5,98)
<b>Jumlah</b>	<b>1.830</b>	<b>(100)</b>	<b>1.373</b>	<b>(100)</b>	<b>1.225</b>	<b>(100)</b>	<b>983</b>	<b>(100)</b>	<b>2.165</b>	<b>(100)</b>	<b>1.840</b>	<b>(100)</b>

Sumber: Disnakertrans, DIY

Berdasarkan angka UMK, maka nilai UMP DIY tahun 2016 secara nominal ditetapkan sebesar Rp1.235.700 per bulan atau sama dengan UMK terendah yakni Gunungkidul. Secara nominal, UMP dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, meskipun dari sisi KHL lebih berfluktuasi dan tergantung pada tingkat perubahan harga yang berlaku.

#### 4.6.6. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran kerja di wilayah DIY mendorong sebagian angkatan kerja mencari kesempatan kerja di luar daerah dan luar negeri. Data penempatan TKI ke luar

negeri sudah tersedia, tetapi penempatan tenaga kerja di luar wilayah belum tersedia secara berkala. Data penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal DIY ke beberapa negara tujuan terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2015, jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri mencapai 1.840 orang dengan komposisi perempuan lebih mendominasi. Komposisi TKI laki-laki sebesar 40 persen dan perempuan sebesar 60 persen. Dibandingkan dengan tahun 2014, pengiriman TKI selama tahun 2015 turun sebesar 15 persen.

Komposisi TKI berdasarkan tujuan menunjukkan bahwa Malaysia masih menjadi negara tujuan utama TKI asal DIY. Pada tahun

Tabel 4.32.

Distribusi Jumlah TKI menurut Kabupaten/Kota Asal dan Negara Tujuan, 2015 (Orang)

Negara Tujuan	Kabupaten/Kota Asal										DIY	
	Kulon Progo		Bantul	Gunungkidul		Sleman	Yogyakarta					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Malaysia	365	(19,84)	370	(20,11)	67	(3,64)	246	(13,37)	56	(3,04)	1.104	(60,0)
Taiwan	59	(3,21)	51	(2,77)	25	(1,36)	16	(0,87)	7	(0,38)	158	(8,59)
Singapura	31	(1,68)	34	(1,85)	19	(1,03)	24	(1,30)	4	(0,22)	112	(6,09)
Korea Selatan	12	(0,65)	35	(1,90)	11	(0,60)	38	(2,07)	11	(0,60)	107	(5,82)
Saudi Arabia	12	(0,65)	33	(1,79)	22	(1,20)	31	(1,68)	5	(0,27)	103	(5,60)
Amerika Serikat	7	(0,38)	21	(1,14)	9	(0,49)	30	(1,63)	30	(1,63)	97	(5,27)
Brunei Darussalam	14	(0,76)	18	(0,98)	7	(0,38)	10	(0,54)			49	(2,66)
Lainnya	14	(0,76)	29	(1,58)	8	(0,43)	32	(1,74)	27	(1,47)	110	(5,98)
Jumlah	514	(27,93)	591	(32,12)	168	(9,13)	427	(23,21)	140	(7,61)	1.840	(100)

Sumber: Disnakertrans, DIY

2015, sebanyak 60,0 persen TKI asal DIY tercatat diberangkatkan menuju Malaysia. Namun demikian, dalam enam tahun terakhir proporsi TKI yang menuju Malaysia cenderung menurun dari 98,7 persen di tahun 2010 menjadi 60,0 persen di tahun 2015. Komposisi negara tujuan TKI berikutnya secara berturut-turut adalah Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat dengan proporsi masing-masing antara 5-9 persen. Selama dua tahun terakhir yakni 2014-2015, distribusi negara tujuan TKI terlihat semakin meluas dan muncul beberapa negara yang menjadi alternatif tujuan seperti Brunai Darussalam dan lainnya.

Komposisi TKI berdasarkan wilayah asal didominasi oleh TKI dari Kabupaten Bantul sebanyak 32,1 persen dan Kulonprogo sebanyak 27,9 persen. Pada umumnya, TKI asal Bantul dan Kulonprogo memiliki negara tujuan ke Malaysia dan Taiwan. Komposisi terbesar berikutnya adalah TKI dari Kabupaten Sleman. TKI dari Sleman memiliki negara tujuan yang lebih bervariasi dan didominasi oleh negara tujuan Malaysia, Korea Selatan, Saudi Arabia, dan Amerika Selatan. Sementara, TKI yang berasal dari Kota Yogyakarta tercatat paling sedikit dan mayoritas menuju Amerika Serikat.

### 4.7. TRANSMIGRASI

Transmigrasi merupakan proses perpindahan penduduk secara sukarela untuk menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi yang diatur dan didanai oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan untuk kesejahteraan transmigran. Pada umumnya, para transmigran berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Proses transmigrasi juga bisa dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah sekaligus mendorong perkembangan dan pertumbuhan daerah yang menjadi tujuan.

Proses transmigrasi tidak sekedar fokus pada upaya pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya menuju daerah tujuan, tetapi juga menyangkut upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas serta membangun kemandirian dengan tujuan akhir kesejahteraan individu dan keluarga transmigran. Upaya memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan di daerah asal yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja, keterbatasan aset, dan ketidakberdayaan untuk mendapatkan tempat

Tabel 4.33.  
Perkembangan Jumlah Transmigran Asal DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Tahun										Jumlah 2011- 2015	
	2011		2012		2013		2014		2015			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kulon Progo	49	154	53	162	47	138	19	65	27	85	195	604
Bantul	75	265	80	264	53	168	23	73	40	128	271	898
Gunungkidul	40	129	40	126	25	75	12	41	15	56	132	427
Sleman	70	233	56	170	10	31	11	36	22	82	169	552
Yogyakarta	25	85	19	59	15	46	5	15	12	39	76	244
DIY	259	866	248	781	150	458	70	230	116	390	843	2.725

Sumber: Disnakertrans, DIY

**Tabel 4.34.**  
**Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY**  
**menurut Provinsi Tujuan**

Provinsi Penempatan	2013		2014		2015	
	KK	%	KK	%	KK	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Selatan	90	(60,00)	20	(28,57)	25	(21,55)
Kalimantan Barat	10	(6,67)	15	(21,43)	-	-
Kalimantan Tengah	25	(16,67)	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	50	(43,10)
Sulawesi Selatan	15	(10,00)	-	-	25	(21,55)
Sulawesi Tenggara	10	(6,67)	25	(35,71)	16	(13,79)
Bangka Belitung	-	-	10	(14,29)	-	-
Jumlah	150	(100)	70	(100)	116	(100)

Sumber: Disnakertrans, DIY

tinggal dan pekerjaan yang layak menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk terus mendorong kebijakan transmigrasi. Pemerintah juga membuka peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif secara swakarsa dan mandiri dalam pelaksanaan kegiatan transmigrasi.

Pemerintah daerah DIY selaku pihak yang mengirimkan calon transmigran senantiasa menjalin kerjasama dengan provinsi yang menjadi tujuan penempatan transmigran dan aktif memetakan daerah-daerah alternatif yang menjadi tujuan transmigrasi. Kriteria daerah tujuan dan tolok ukur keberhasilan, kriteria kelayaan program, status lahan untuk transmigran dirumuskan dengan jelas. Pemerintah Daerah DIY juga melakukan tahapan pelatihan dasar bagi calon transmigran sebagai bekal sebelum melakukan transmigrasi. Proses evaluasi, pendampingan, dan perlindungan secara berkelanjutan juga dilakukan setelah masa penempatan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin terjadi selama masa proses perpindahan, masa penempatan, masa transisi, dan masa setelahnya.

Animo masyarakat DIY untuk mengikuti program transmigrasi secara swakarsa atau atas kemauan sendiri masih cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari realisasi pendaftar yang

melebihi kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2011-2015, Pemerintah DIY telah memberangkatkan sebanyak 843 kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 2.725 jiwa sebagai transmigran ke beberapa wilayah provinsi tujuan di Indonesia. Realisasi transmigran selama lima tahun terakhir terlihat mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015. Secara umum, transmigran yang berasal dari Kabupaten Bantul terlihat mendominasi jumlah transmigran selama periode 2011-2015 dengan proporsi sebesar 32,2 persen atau sebanyak 271 kepala keluarga dan 898 jiwa anggota keluarga. Berikutnya adalah Kabupaten Kulonprogo dan Sleman dengan proporsi masing-masing sebesar 22,2 persen dan 20,3 persen. Jumlah transmigran terendah berasal dari Kota Yogyakarta dengan proporsi 9,0 persen.

Berdasarkan lokasi penempatan transmigran, Provinsi Sumatera Selatan tercatat menjadi tujuan utama transmigrasi asal DIY selama tiga tahun terakhir. Jumlah transmigran yang ditempatkan di Sumatera selatan mencapai 135 KK dengan proporsi 40,2 persen. Meskipun demikian, realisasi jumlah transmigran ke Sumatera Selatan dalam dua tahun terakhir cenderung menurun karena ada beberapa lokasi tujuan transmigrasi alternatif yang lain yang disediakan oleh pemerintah pusat. Provinsi yang menjadi tujuan alternatif transmigran asal DIY pada tahun 2014-2015 adalah Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2015, proporsi transmigran yang menuju Kalimantan Utara sebanyak 43,1 persen dengan jumlah keluarga sebanyak 50 KK.



EKONOMI

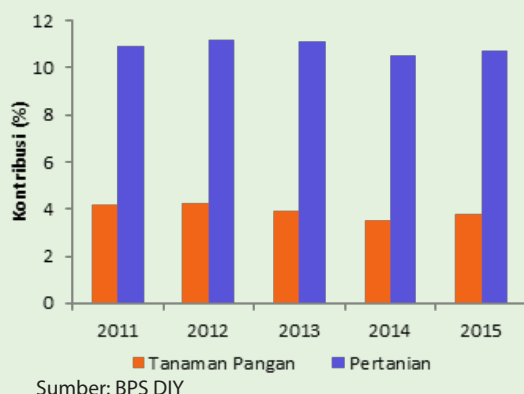


# Bab EKONOMI

## 5

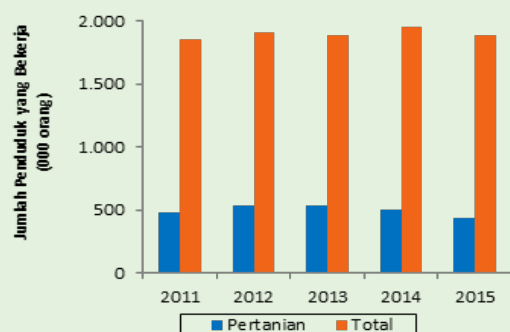
Gambar 5.1.

Kontribusi Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan Terhadap PDRB DIY, 2011-2015 (persen)



Gambar 5.2.

Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Sektor Pertanian di Provinsi DIY, 2011-2015 (ribu orang)



Sumber: BPS DIY

### 5.1. PERTANIAN

Pertanian merupakan sektor hulu (primer) yang kegiatannya berbasis pada sumber daya alam di mana sebagian besar produk akhirnya digunakan sebagai bahan baku (input) utama di sektor industri pengolahan serta konsumsi rumah tangga. Kegiatan ini tersebar merata hampir di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keragaman produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh setiap wilayah. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Peranan sektor pertanian dalam penciptaan PDRB DIY selama lima tahun terakhir sekitar 11 persen. Sementara itu jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar 26 persen.

#### 5.1.1. Luas Lahan Pertanian

Lahan merupakan faktor produksi penting dalam proses produksi pertanian. Pada tahun 2015 luas lahan pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta mencapai 242,25 ribu hektar atau sekitar 76 persen dari total luas lahan di DIY. Lahan pertanian tersebut terdiri dari lahan sawah seluas 55,43 ribu hektar (22,88 persen) dan lahan bukan sawah seluas 186,82 ribu hektar (77,12 persen). Sleman merupakan kabupaten dengan lahan sawah paling luas, yaitu mencapai 21,91 ribu hektar atau sekitar 40 persen dari total lahan sawah di DIY. Sementara untuk lahan pertanian bukan sawah sebagian besar terletak di Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 117,44 ribu hektar atau sekitar 63 persen dari total lahan pertanian bukan sawah di DIY.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, terjadi perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan. Selama periode 2010 – 2015 terjadi penyusutan lahan sawah di DIY seluas 1,11 ribu hektar atau rata-rata seluas 223

hektar per tahun. Sedangkan untuk lahan bukan sawah terjadi peningkatan seluas 3,50 ribu hektar selama 5 tahun atau meningkat rata-rata 700 hektar per tahun.

Penyusutan lahan sawah perlu memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah karena menyangkut penyediaan pangan bagi masyarakat. Lahan sawah merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi padi, karena sebagian besar produksi padi di DIY dilakukan di lahan sawah. Apabila dirinci menurut kabupaten/kota dan jenis lahan sawah terlihat bahwa laju konversi lahan sawah di Kabupaten Sleman menempati urutan tertinggi yaitu mencapai 912 hektar (81,94 persen) selama 5 tahun atau rata-rata 182 hektar lahan sawah di wilayah ini beralih fungsi. Urutan ke dua adalah Kabupaten Bantul dengan penyusutan lahan sawah seluas 240 hektar (rata-rata 48 hektar/tahun).

Berdasarkan sistem pengairannya terlihat bahwa selama lima tahun terakhir telah terjadi penyusutan lahan sawah beririgasi seluas 1.450 hektar. Dengan demikian, dalam setahun luas lahan sawah yang beirigasi berkurang sekitar 290 hektar. Hampir di semua kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kulonprogo terjadi penyusutan lahan sawah beririgasi. Penyusutan paling tinggi terjadi di Kabupaten Sleman, yaitu mencapai 904 hektar atau sekitar 62,34 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta dengan luas masing-masing 362 hektar (24,97 persen), 247 hektar (17,03 persen), dan 23 hektar (1,59 persen). Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo terjadi penambahan lahan sawah beririgasi seluas 86 hektar.

Disi lain, luas lahan sawah tadah hujan mengalami kenaikan sekitar 337 hektar selama periode 2010-2015. Kenaikan ini terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul masing-masing seluas 247 hektar dan 122 hektar. Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman luas lahan sawah tadah hujan mengalami penyusutan masing-masing 24 hektar dan 8 hektar.

Tabel 5.1.

Perkembangan Luas lahan Pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut kabupaten/Kota dan Jenis lahan, 2010-2015 (hektar)

Kabupaten/ Kota	Sawah			Bukan Sawah		
	2010	2015	Selisih	2010	2015	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	10.304	10.366	62	35.027	34.957	-70
Bantul	15.465	15.225	-240	13.628	13.639	11
Gunungkidul	7.865	7.865	0	117.834	117.437	-397
Sleman	22.819	21.907	-912	16.643	20.771	4.128
Yogyakarta	85	62	-23	187	17	-170
DIY	56.538	55.425	-1.113	183.319	186.821	3.502

Sumber: Dinas Pertanian DIY

Tabel 5.2.

Perkembangan Luas Lahan Sawah di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan, 2010-2015 (hektar)

Kabupaten/ Kota	Irigasi			Tadah Hujan		
	2010	2015	Selisih	2010	2015	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	9.258	9.344	86	1.046	1.022	-24
Bantul	13.428	13.066	-362	2.037	2.159	122
Gunungkidul	2.427	2.180	-247	5.438	5.685	247
Sleman	22.228	21.324	-904	591	583	-8
Yogyakarta	85	62	-23	0	0	0
DIY	47.426	45.976	-1.450	9.112	9.449	337

Sumber: Dinas Pertanian DIY

Tabel 5.3.

Perkembangan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015

Komoditas		2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
padi	produksi (ton)	921.824	919.573	975.136
	pertumbuhan (%)	-2,58	-0,24	6,04
Jagung	produksi (ton)	289.580	312.236	299.084
	pertumbuhan (%)	-13,97	7,82	-4,21
Kedelai	produksi (ton)	31.677	19.579	18.822
	pertumbuhan (%)	-12,09	-38,19	-3,87
Kacang Tanah	produksi (ton)	70.834	71.582	83.300
	pertumbuhan (%)	12,61	1,06	16,37
Ubi Kayu	produksi (ton)	1.013.565	884.931	873.362
	pertumbuhan (%)	16,99	-12,69	-1,31

Sumber: Dinas Pertanian DIY

Tabel 5.4.

Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015

Komoditas		2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Padi Sawah</b>				
Luas panen	satuan (ha)	114.547	115.667	113.027
	pertumbuhan (%)	4,76	0,98	-2,28
Produktivitas	satuan (ku/ha)	63	62,18	68,73
	pertumbuhan (%)	-6,58	-1,31	10,53
Produksi	satuan (ton)	721.674	719.194	776.810
	pertumbuhan (%)	-2,14	-0,34	8,01
<b>Padi Ladang</b>				
Luas panen	satuan (ha)	44.719	43.236	42.811
	pertumbuhan (%)	2,64	-3,32	-0,98
Produktivitas	satuan (ku/ha)	44,76	46,35	46,33
	pertumbuhan (%)	-6,6	3,55	-0,04
Produksi	satuan (ton)	200.150	200.379	198.326
	pertumbuhan (%)	-4,13	0,11	-1,02
<b>Total</b>				
Luas panen	satuan (ha)	159.266	158.903	155.838
	pertumbuhan (%)	4,16	-0,23	-1,93
Produktivitas	satuan (ku/ha)	57,88	57,87	62,57
	pertumbuhan (%)	-6,47	-0,02	8,13
Produksi	satuan (ton)	921.824	919.573	975.136
	pertumbuhan (%)	-2,58	-0,24	6,04

Sumber: BPS DIY

## 5.1.2. Tanaman Pangan

Tanaman pangan mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian DIY. Kontribusi tanaman pangan terhadap pembentukan PDRB DIY selama periode 2011-2015 sekitar 4 persen dan terhadap Sektor Pertanian sekitar 36 persen (Gambar 1.). Selain itu, tanaman pangan juga menjadi andalan dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan wilayah. Ketersediaan pangan merupakan masalah yang krusial bagi pemerintah dan masyarakat. Secara turun temurun padi/beras dan palawija (jagung, kedelai, ubi kayu, dan kacang tanah) merupakan bahan pangan pokok bagi bangsa Indonesia termasuk DIY. Namun demikian, budaya mengkonsumsi beras masih mewarnai sebagian besar masyarakat DIY.

Animo masyarakat untuk menanam padi juga masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya luas panen dan peningkatan produktivitas tanaman padi. Selama periode 2013-2015 produksi padi di DIY agak berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2013 produksi padi di DIY mencapai 921,8 ribu ton, kemudian sedikit menurun pada tahun 2014 menjadi 919,6 ribu ton. Tahun 2015 produksinya meningkat 6,04 persen menjadi 975,1 ribu ton. Peningkatan ini murni disebabkan oleh peningkatan produktivitas, karena luas panen padi mengalami penurunan dari 158,9 ribu hektar pada tahun 2014 menjadi 155,8 ribu hektar pada tahun 2015. Penurunan tersebut terjadi baik pada padi sawah maupun padi ladang. Penurunan luas panen padi sawah seiring dengan penyusutan luas baku lahan sawah di DIY. Di sisi lain, produktivitas tanaman padi pada tahun 2015 meningkat 8,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 57,87 kuintal per hektar menjadi 62,57 kuintal per hektar. Peningkatan ini terutama akibat dari kenaikan produktivitas tanaman padi sawah. Sementara produktivitas padi ladang relatif stagnan.

Sebagian besar produksi padi di Provinsi DIY berasal dari lahan sawah dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan padi ladang. Pada tahun 2015 produksi padi sawah mencapai sekitar 80 persen dari total produksi padi di DIY dan 20 persen

sisanya merupakan padi ladang. Kabupaten Sleman merupakan produsen utama padi sawah di DIY. Pada tahun 2015 sekitar 43,76 persen produksi padi sawah di DIY berasal dari Kabupaten Sleman. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul dengan kontribusi masing-masing sebesar 26,57 persen, 16,94 persen, dan 12,62 persen. Sementara itu sentra produksi padi ladang adalah Kabupaten Gunungkidul dengan kontribusi sekitar 98,49 persen.

Berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa Sleman merupakan penyangga utama penyedia pangan pokok bagi masyarakat DIY. Namun ironisnya, laju konversi lahan sawah di wilayah tersebut juga menempati posisi tertinggi. Pesatnya pembangunan kompleks perumahan dan bangunan bisnis lainnya merupakan faktor utama tingginya laju konversi lahan sawah di Kabupaten Sleman. Perkembangan ekonomi yang cukup tinggi dan lokasi yang cukup strategis merupakan daya tarik yang cukup potensial bagi investor untuk melakukan investasi di wilayah ini. Selain Sleman, Bantul juga merupakan sasaran alternatif bagi pengembang untuk membangun kompleks perumahan sehingga laju konversi lahan sawah di Bantul juga cukup tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh kedua wilayah tersebut lokasinya yang cukup strategis, yaitu berada di sekitar pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi. Hal ini perlu memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah untuk mengendalikan laju konversi lahan sawah agar ketahanan pangan di wilayah DIY data terjaga. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akan mengurangi potensi produksi pertanian.

Tanaman palawija yang banyak diusahakan di wilayah DIY adalah jagung, kacang tanah, kedelai, dan ubi kayu. Pada tahun 2015 produksi jagung, kacang tanah, kedelai, dan ubi kayu masing-masing sebesar 299,01 ribu ton, 83,3 ribu ton, 18,8 ribu ton, dan 873,4 ribu ton (Tabel 3.).

Produksi jagung di DIY selama 2013-2015 berfluktuatif. Pada tahun 2013 produksinya sebesar 289,6 ribu ton, kemudian meningkat menjadi 312,2 ribu ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar

Tabel 5.5.

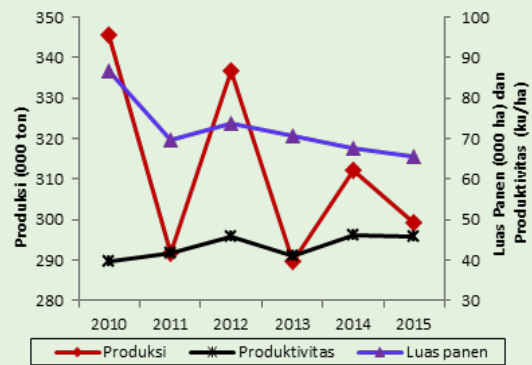
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut kabupaten/kota Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Padi sawah			Padi ladang		
	luas panen (ha)	produktivitas (kg/ha)	produksi (ton)	luas panen (ha)	produktivitas (kg/ha)	produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	18.569	68,15	126.539	127	35,51	451
	-16,43		-16,94	-0,3		-0,23
Bantul	29.522	67,22	198.456	120	57,08	685
	-26,12		-26,57	-0,28		-0,35
Gunungkidul	14.936	63,09	94.232	42.078	46,42	195.326
	-13,21		-12,62	-98,29		-98,49
Sleman	49.870	65,53	326.819	486	38,35	1.864
	-44,12		-43,76	-1,14		-0,94
Yogyakarta	130	58,77	764	0		0
	-0,12		-0,1			
Total	113.027	66,07	746.810	42.811	46,33	198.326
	-100		-100	-100		-100

Sumber: BPS DIY

Gambar 5.3.

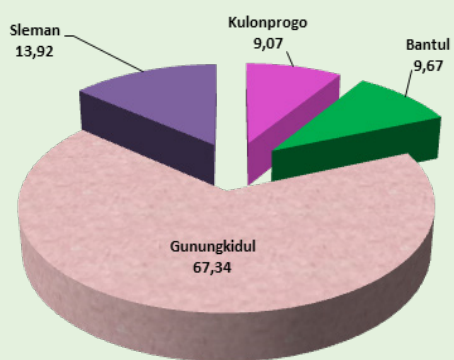
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2010-2015



Sumber: BPS DIY

Gambar 5.4.

Distribusi Produksi Jagung di Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 (persen)



Sumber: BPS DIY

7,82 persen. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan produksi sebesar 4,21 persen menjadi 299,1 ribu ton (Tabel 3). Fluktuasi produksi tersebut disebabkan oleh fluktuasi produktivitas dan luas panen. Produktivitas antara lain dipengaruhi oleh kondisi musin, jenis varietas benih yang digunakan, serangan organisme pengganggu tanaman, dan teknik budidaya yang dilakukan oleh petani. Di sisi lain, luas panen jagung cenderung menurun. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian dan kompetisi penggunaan lahan pertanian untuk berbagai komoditas pertanian mempengaruhi penurunan luas panen jagung di DIY. Kabupaten Gunungkidul merupakan sentra produksi jagung di DIY. Pada tahun 2015, sekitar dua per tiga produksi jagung DIY berasal dari Gunungkidul. Urutan ke dua adalah Kabupaten Sleman dengan kontribusi sekitar 13,92 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul dan Kulonprogo dengan kontribusi masing-masing sekitar 9,67 persen dan 9,07 persen.

Selain sebagai bahan pangan, jagung juga digunakan sebagai bahan baku pada industri pakan ternak. Seiring dengan peningkatan permintaan terhadap produk peternakan seperti daging dan telur, maka pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap produk jagung. Hal ini menunjukkan bahwa jagung mempunyai prospek ekonomi yang cukup bagus pada masa yang akan datang.

Gambar 5.6.

Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Luas panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	1.329	9,53	1.266
	-1,87		-1,52
Bantul	3.390	17,75	6.016
	-4,78		-7,22
Gunungkidul	61.705	11,27	69.532
	-87,05		-83,47
Sleman	4.463	14,53	6.485
	-6,3		-7,79
Yogyakarta	1	11,34	1
	0		0
Total	70.888	11,75	83.300
	-100		-100

Sumber: BPS DIY

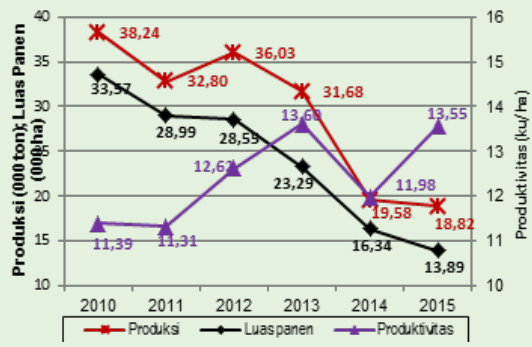
Berbeda dengan komoditas jagung, produksi kacang tanah di DIY selama periode 2013-2015 terus meningkat. Pada tahun 2013 produksi kacang tanah tercatat 70,8ribu ton dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,3 ribu ton atau meningkat rata-rata 8,44 persen per tahun. Seperti halnya komoditas jagung, Kabupaten Gunungkidul juga merupakan penyumbang utama produksi kacang tanah di DIY. Produksi kacang tanah di wilayah ini memberikan kontribusi sekitar 83,47 persen. Sementara Bantul dan Sleman masing-masing memberikan kontribusi sekitar 7 persen. Kalau dilihat dari produktivitas lahan, nampaknya tanaman kacang tanah yang ditanam di wilayah Bantul dan Sleman memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Di kedua wilayah tersebut produksi kacang

tanah masing-masing mencapai 17,75 kuintal per hektar dan 14,53 kuintal per hektar. Di Gunungkidul dan Kota Yogyakarta produktivitasnya sekitar 11 kuintal per hektar dan di Kulonprogo hanya 9,53 kuintal per hektar.

Kedelai yang juga merupakan bahan pangan dasar bagi sebagian besar masyarakat mengalami penurunan produksi yang cukup tajam, terutama pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2013 produksi kedelai di DIY tercatat 31,68 ribu ton, kemudian menurun drastis menjadi 18,82 ribu ton pada tahun 2015. Dengan demikian, selama dua tahun terakhir produksi kedelai menurun sebesar 59,42 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan luas panen, sedangkan produktivitasnya berfluktuasi. Terbatasnya lahan pertanian yang diperparah dengan tingginya laju konversi lahan pertanian serta kompetisi penggunaan lahan untuk berbagai komoditas pertanian merupakan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan luas panen kedelai. Penurunan produksi kedelai domestik akan meningkatkan impor kedelai baik dari luar negeri maupun dari luar wilayah DIY. Sebagian besar masyarakat banyak mengkonsumsi pangan yang berbahan dasar kedelai, karena kedelai merupakan bahan pangan murah untuk memenuhi kebutuhan protein nabati bagi masyarakat. Banyak produk olahan industri makanan yang menggunakan kedelai sebagai bahan baku utamanya, antara lain tempe, tahu, dan kecap.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten penghasil kedelai terbesar di DIY. Pada tahun 2015, sekitar 72 persen produksi kedelai DIY berasal dari Gunungkidul. Kontribusi yang besar ini terutama disebabkan oleh tingginya luas panen yang mencapai 10,43 ribu hektar atau sekitar tiga per empat dari total luas panen kedelai di DIY. Sedangkan dari sisi produktivitas, wilayah ini mempunyai tingkat produktivitas yang paling rendah yaitu sebesar 12,99 kuintal per hektar karena kondisi lahan yang kurang subur. Kabupaten Bantul merupakan wilayah dengan produktivitas kedelai tertinggi di DIY, yaitu mencapai 16,77 kuintal per hektar. Produksi kedelai di Bantul memberikan sumbangan sekitar 15 persen terhadap produksi

Gambar 5.5.  
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2010-2015



Sumber: BPS DIY

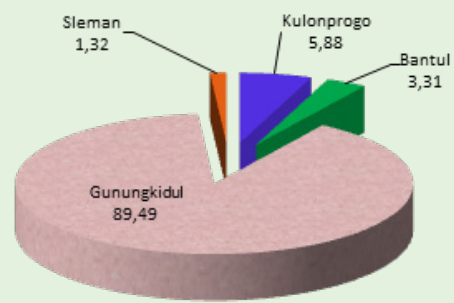
Tabel 5.7.  
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Luas panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	1.664	13,76	2.289
	-11,98		-12,16
Bantul	1.660	16,77	2.784
	-11,95		-14,79
Gunungkidul	10.432	12,99	13.550
	-75,13		-71,99
Sleman	130	15,31	199
	-0,94		-1,06
Yogyakarta	0		0
	0		0
Total	13.886	13,55	18.822
	-100		-100

Keterangan : angka dalam kurung menunjukkan persentase  
Sumber: BPS DIY

Gambar 5.6.

Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2010-2015



Sumber: BPS DIY

kedelai di DIY dan menempati urutan ke dua setelah Gunungkidul.

Produksi ubi kayu di DIY selama periode 2013-2015 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 produksi ubi kayu tercatat 1.013,57 ribu ton, kemudian turun menjadi 884,93 ribu ton pada tahun 2014. Tahun 2015 produksi kembali turun menjadi 873,36 ribu ton. Dengan demikian, rata-rata per tahun terjadi penurunan produksi sebesar 7,17 persen. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan luas panen dan produktivitasnya tanaman ubi kayu. Selain beberapa komoditas palawija, Gunungkidul juga merupakan produsen ubi kayu terbesar di DIY. Pada tahun 2015, produksi ubi kayu di wilayah ini memberikan kontribusi sebesar 89,49 persen terhadap produksi ubi kayu DIY. Ubi kayu dapat menjadi bahan baku industri rumah tangga, sebagai bahan baku banyak makanan dan kue-kue tradisional seperti cenil, tiwul, keripik, getuk, dll. Selain itu dapat juga di gunakan sebagai bahan baku untuk industri dengan skala usaha yang lebih besar seperti industri tepung tapioka, bioetanol, dll.

5.1.3. Hortikultura

Tabel 5.8.

Perkembangan Produksi Sayuran di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013- 2015 (ton)

Komoditas	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Bawang merah	9.541	12.360	8.799
Sawi	6.447	5.605	6.452
Cabe besar	17.134	17.759	23.388
Cabe rawit	3.229	3.168	3.276
Jamur	163.651	139.630	143.157

Sumber: BPS DIY

DIY mempunyai berbagai jenis tanaman hortikultura yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi atau lainnya. Jenis tanaman hortikulturan yang dicatat perkembangannya adalah tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Salah satu ciri khas produk hortikultura adalah perisabel atau mudah rusak karena segar.

Beberapa jenis tanaman sayuran yang banyak diproduksi di DIY antara lain bawang merah, sawi, cabe besar, cabe rawit, dan jamur. Produksi tanaman sayuran selama periode 2013-2015 cenderung berfluktuasi. Produksi bawang merah pada tahun 2013 tercatat sebesar 9,54 ribu ton, kemudian meningkat menjadi 12,36 ribu ton pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 turun menjadi 8,80 ribu ton. Produksi sawi juga mengalami pasang surut, dari 6,45 ribu ton (2013), menjadi 5,61 ribu ton (2014), dan 6,45 ribu ton (2015). Produksi jamur tahun 2013 tercatat 163,65 ribu ton, kemudian turun menjadi 139,63 ribu ton (2014), dan naik lagi menjadi

143,16 ribu ton (2015). Di sisi lain, produksi cabe besar cenderung meningkat dari 17,13 ribu ton (2013), menjadi 17,76 ribu ton (2014), dan 23,39 ribu ton (2015). Sedangkan cabe rawit produksinya cenderung stagnan pada level produksi sekitar 3,2 ribu ton.

Kabupaten Sleman dan Kulonprogo merupakan daerah penghasil sayuran utama di DIY. Kabupaten Kulonprogo merupakan sentra produksi cabe besar, sawi, dan bawang merah di DIY. Pada tahun 2015 andil Kulonprogo terhadap produksi ketiga jenis sayuran tersebut di DIY masing-masing adalah 71,95 persen, 48,02 persen, dan 45,37 persen. Sedangkan Kabupaten Sleman merupakan produsen utama untuk komoditas jamur, cabe rawit, dan sawi. Kontribusi Sleman terhadap produksi ketiga jenis sayuran tersebut di DIY pada tahun 2015 masing-masing adalah 96,26 persen, 66,11 persen, dan 44,24 persen. Sleman juga merupakan penyumbang ke dua terbesar untuk produksi cabe besar setelah Kulonprogo, meskipun kontribusinya tidak terlalu besar yaitu sekitar 19 persen. Di sisi lain, Kabupaten Bantul merupakan daerah penyumbang utama produksi bawang merah di DIY. Kontribusi Bantul terhadap produksi bawang merah tahun 2015 sekitar 51 persen.

Komoditas buah-buahan yang cukup potensial di DIY adalah mangga, melon, nangka, pisang, rambutan, salak, dan semangka. Seperti halnya komoditas sayuran, produksi buah-buahan juga menunjukkan tren yang sama dengan Kabupaten Sleman dan Kulonprogo sebagai sentra produksi untuk beberapa komoditas buah-buahan unggulan di DIY. Kabupaten Sleman merupakan sentra produksi salak, rambutan, nangka, dan mangga. Produksi salak di DIY pada tahun 2015 tercatat sebesar 73,28 ribu ton dan 97,85 persen diantaranya berasal dari Kabupaten Sleman. Sementara kontribusi produksi rambutan, nangka, dan mangga di Sleman terhadap total produksi di DIY masing-masing adalah 70,37 persen, 64,99 persen, dan 40,48 persen dengan volume produksi masing-masing sebesar 5.079 ton, 18.445 ton, dan 14.871 ton. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo merupakan sentra produksi melon, semangka, dan pisang. Produksi ketiga jenis

Tabel 5.9.  
Perkembangan Produksi Buah-buahan di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, 2013- 2015 (ton)

Komoditas	Kab./Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mangga	Sleman	14.869	15.743	14.871
	Gunungkidul	9.520	20.568	9.622
	Lainnya	12.500	13.356	12.247
Melon	Kulonprogo	21.128	28.060	20.696
	Bantul	7.265	2.624	3.812
	Lainnya	2.384	2.379	2.278
Nangka	Sleman	17.991	17.669	18.445
	Kulonprogo	5.423	5.500	5.557
	Lainnya	3.300	3.701	4.379
Pisang	Kulonprogo	19.786	19.821	20.410
	Sleman	18.486	14.995	9.603
	Lainnya	18.578	21.246	21.205
Rambutan	Sleman	6.553	16.790	17.270
	Kulonprogo	3.248	4.035	5.079
	Lainnya	719	2.245	2.194
Salak	Sleman	104.500	74.174	71.705
	Kulonprogo	1.634	1.567	1.572
	Lainnya	11	9	6
Semangka	Kulonprogo	8.756	10.778	8.296
	Sleman	1.394	956	836
	Lainnya	4	1	4

Sumber: BPS DIY

komoditas buah-buahan pada tahun 2015 masing-masing sebesar 20.696 ton, 8.296 ton, dan 20.410 ton dengan kontribusi masing-masing sebesar 77,26 persen, 90,80 persen, dan 39,85 persen.

Tanaman biofarmaka dapat memanfaatkan untuk konsumsi dan obat-obatan. Selain itu tanaman biofarmaka biasanya juga digunakan sebagai bahan untuk membuat kosmetik dan produk kecantikan lainnya. Beberapa jenis tanaman biofarmaka yang banyak dibudidayakan di DIY antara lain jahe, lengkuas, kencur, kunyit, temu lawak, kapulaga, dan mahkota dewa. Beberapa komoditas biofarmaka yang mempunyai tren peningkatan produksi selama periode 2013-2015 adalah jahe, kapulaga, kencur, dan mahkota dewa. Pada tahun 2013 produksi komoditas tersebut tercatat 2.775 ton (jahe), 1.301 ton (kapulaga), 1.827 ton (kencur) dan 1.634 ton (mahkota dewa). Kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan produksi masing-masing menjadi 4.617 ton (jahe), 3.190 ton (kapulaga), 2.097 ton (kencur) dan 1.967 ton (mahkota dewa). Sedangkan komoditas lainnya cenderung mengalami penurunan produksi.

Sentra produksi tanaman biofarmaka adalah Kabupaten Kulonprogo. Produksi tanaman biofarmaka di wilayah ini pada tahun 2015 adalah sebesar 3.095 ton (jahe), 3.183 ton (kapulaga), 2.818 ton (kunyit), 1.938 ton (kencur), 1.524 ton (mahkota dewa), 1.408 ton (temulawak), dan 1.062 ton (lengkuas), dengan kontribusi masing-masing komoditas terhadap total produksi di DIY adalah sebesar 67,03 persen (jahe), 99,79 persen (kapulaga), 93,51 persen (kunyit), 92,39 persen (kencur), 77,48 persen (mahkota dewa), 85,22 persen (temulawak), dan 85,26 persen (lengkuas).

#### 5.1.4. Perkebunan

Usaha tanaman perkebunan di DIY sebagian besar merupakan usaha perkebunan rakyat. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang cukup banyak dibudidayakan di DIY antara lain kelapa, cengkeh, kopi, jambu mete, coklat/kakao, tembakau dan tebu. Kelapa merupakan komoditas perkebunan yang paling dominan di DIY. Produksi kelapa selama

Tabel 5.10.

Perkembangan Produksi Tanaman Biofarmaka di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013- 2015 (ton)

Komoditas	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Jahe	2.775	3.374	4.617
Lengkuas	2.813	1.595	1.246
Kencur	1.827	1.886	2.097
Kunyit	4.401	3.215	3.014
Temulawak	4.428	2.446	1.652
Temuireng	1.067	668	645
Kapulaga	1.301	1.695	3.190
Mahkota dewa	1.634	2.016	1.967

Sumber: BPS DIY

periode 2013-2015 terus mengalami penurunan, dari 55,75 ribu ton pada tahun 2013 menjadi 53,47 ribu ton (2014) dan 50,38 ribu ton (2015). Dari sisi luas panen cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2013 luas panen kelapa tercatat 34,21 ribu hektar, kemudian turun menjadi 32,83 ribu hektar, dan meningkat lagi menjadi 34,57 ribu hektar pada tahun 2015. Dengan demikian, penurunan produksi tersebut disebabkan oleh faktor penurunan luas panen (2014) dan produktivitas (2015). Kabupaten Kulonprogo merupakan sentra produksi kelapa di DIY. Pada tahun 2015, sekitar 56,87 persen produksi kelapa DIY berasal dari Kulonprogo. Sementara Bantul, Sleman, dan Gunungkidul memberikan kontribusi masing-masing sebesar 17,76 persen, 15,18 persen, dan 10,20 persen.

Tanaman tebu sebagian diusahakan oleh rakyat dan sebagian lagi diusahakan oleh perusahaan. Produksi tebu selama periode 2013-2015 berfluktuasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2015 produksinya sebesar 12,71 ribu ton, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 9,89 ribu ton. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan produksi tahun 2013 yang mencapai 15,96 ribu ton. Dari sisi luas panen terus mengalami penurunan, dari 3.604 hektar (2013) menjadi 3.332 hektar (2014), dan 3.280 hektar (2015). Sedangkan produktivitasnya berfluktuasi. Bantul merupakan penyumbang terbesar pada tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 39,66 persen. Wilayah lain yang memberikan andil cukup besar Sleman dan Kulonprogo dengan kontribusi masing-masing 30,43 persen dan 27,40 persen, dan hanya sebagian kecil saja yang diproduksi di Gunungkidul.

Komoditas tebu merupakan komoditas yang cukup strategis, mengingat tingkat konsumsi gula cukup tinggi. Selama ini kebutuhan gula belum bisa dipenuhi dari produksi domestik, sehingga impor gula masih cukup tinggi. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan lahan karena kompetisi penggunaan lahan pertanian untuk berbagai jenis komoditas pertanian. Sebagai produsen, petani akan berfikir secara rasional untuk mengusahakan suatu jenis komoditas tertentu. Selain itu, pasar untuk produk tebu bersifat monopsoni sehingga

Tabel 5.11.  
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013- 2015 (ton)

Komoditas	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelapa	55.753	53.465	50.383
Cengkeh	364	686	453
Kopi	736	467	402
Jambu mete	261	452	447
Coklat	1.124	1.379	1.632
Tembakau	560	1.544	1.453
Tebu	15.961	9.888	12.705

Sumber: BPS DIY

secara keseluruhan bargaining power petani relatif lemah dalam penentuan harga produk. Jika tidak ada campur tangan pemerintah maka petani tebu akan semakin tersudut dan animo masyarakat untuk menanam tebu akan berkurang.

Tabel 5.12.

Perkembangan Luas Panen Tanaman Perkebunan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013- 2015 (ton)

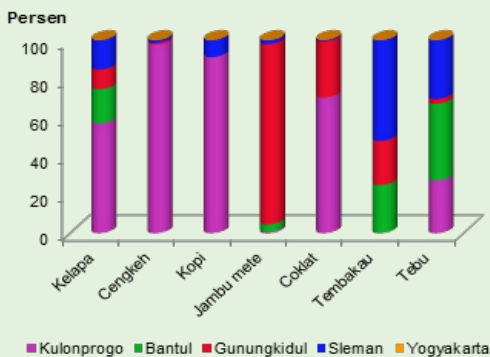
Komoditas	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelapa	34.207	32.829	34.565
Cengkeh	1.569	1.412	1.634
Kopi	1.037	859	886
Jambu mete	4.343	3.823	2.678
Coklat	2.859	2.062	3.174
Tembakau	1.235	1.757	1.976
Tebu	3.604	3.332	3.280

Sumber: BPS DIY

Produksi tembakau di DIY tercatat 1.453 ton pada tahun 2015. Sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.544 ton, namun lebih tinggi dibandingkan produksi tahun 2013 yang tercatat 560 ton. Berdasarkan luas panennya terlihat adanya kenaikan dari tahun ke tahun, sedangkan produktivitasnya berfluktuasi walaupun cenderung meningkat. Faktor cuaca, adanya serangan organisme pengganggu tanaman, serta varietas yang digunakan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tanaman. Kabupaten Sleman merupakan sentra produksi tembakau di DIY. Pada tahun 2015 produksinya mencapai 757,5 ton atau sekitar 52,14 persen dari total produksi tembakau di DIY. Sementara Bantul dan Gunungkidul memberikan kontribusi masing-masing sebesar 24,89 persen dan 22,88 persen.

Gambar 5.7.

Distribusi Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi DIY menurut Jenis Tanaman dan kabupaten/kota Tahun 2015 (persen)



Sumber: BPS DIY

Beberapa komoditas perkebunan lainnya yang produksinya cenderung meningkat adalah jambu mete dan coklat. Produksi jambu mete dan coklat pada tahun 2013 masing-masing adalah 261 ton dan 1.124 ton dan pada tahun 2015 produksinya meningkat masing-masing menjadi 447 ton dan 1.632 ton. Luas panen jambu mete cenderung menurun, namun sebaliknya untuk komoditas coklat luas panennya cenderung meningkat. Sentra produksi jambu mete adalah Kabupaten Gunungkidul dengan kontribusi sekitar 93,44 persen pada tahun 2015. Sementara sentra produksi coklat adalah Kabupaten Kulonprogo dengan kontribusi sekitar 70,22 persen pada tahun 2015.

Untuk komoditas kopi, produksinya cenderung menurun. Pada tahun 2013 produksi kopi di DIY mencapai 736 ton, kemudian menurun menjadi 402 ton pada tahun 2015 atau mengalami penurunan rata-rata 26,11 persen per tahun. Penurunan produksi kopi disebabkan oleh penurunan luas panen dan produktivitas. Hal ini bisa menggambarkan bahwa animo masyarakat untuk

melakukan budidaya kopi di DIY semakin menurun. Sentra produksi kopi adalah Kabupaten Kulonprogo, sengan kontribusinya sebesar 91,21 persen pada tahun 2015.

5.1.5. kehutanan

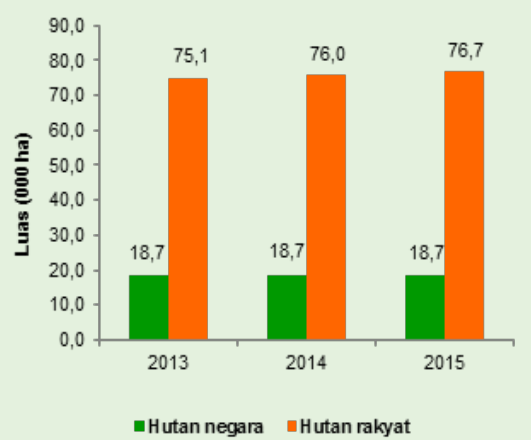
Hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Luas hutan di DIY pada tahun 2015 mencapai 95.397,31 hektar atau sekitar 30 persen dari luas wilayah DIY. Sebagian besar kawasan hutan di DIY merupakan hutan rakyat yaitu seluas 76.680,48 hektar atau mencakup sekitar 80 persen dari total kawasan hutan di DIY, dan sisanya 18.715,06 hektar (20 persen) merupakan hutan negara. Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat. Hitan rakyat ditanami dengan berbagai jenis tanaman hutan, ada yang dikombinasikan dengan tanaman semusim. Sedangkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004).

Luas hutan rakyat selama periode 2013-2015 cenderung mengalami kenaikan dari 75.120,3 hektar (2013) menjadi 76.680,48 hektar (2015). Kenaikan ini terjadi di semua kabupaten dan yang paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul yaitu seluas 616,03 hektar. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo dan Sleman masing-masing seluas 581,72 hektar dan 337,42 hektar. Sementara di Kabupaten Bantul hanya bertambah 25 hektar.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah, sebagian besar kawasan hutan rakyat pada tahun 2015 berada di Kabupaten Gunungkidul. Sekitar 56 persen dari total luas hutan rakyat di DIY berada di wilayah ini atau seluas 42.570 hektar. Gunungkidul dikenal sebagai wilayah berbasis hutan, baik hutan rakyat maupun hutan negara. Sementara kawasan hutan rakyat di Kulonprogo mencapai 20.759,4 hektar (27 persen). Dengan topografi yang berbukit, keberadaan hutan di kedua wilayah tersebut akan membantu menjaga ekosistem dan kelestarian

Gambar 5.8.

Perkembangan Luas Hutan Negara dan Hutan Rakyat di Provinsi D.I. Yogyakarta (000 hektar)



Sumber: Dinas kehutanan dan Perkebunan Provnsi DIY

Tabel 5.13.

Perkembangan Luas Hutan Rakyat menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015 (hektar)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	20.178	20.446	20.759
Bantul	8570	8570	8595
Gunungkidul	41953,9	42132	42570
Sleman	4418,7	4865	4756,1
Yogyakarta	-	-	-
DIY	75.120	76.012	76.681

Sumber: Dinas kehutanan dan Perkebunan Provnsi DIY

alam. Di Kabupaten Bantul dan Sleman luasan hutan rakyat masing-masing tercatat 8.595 hektar (11 persen) dan 4.756 hektar (6 hektar).

Keberadaan kawasan hutan dapat mengatasi persoalan lahan kritis banyak ditemui di wilayah Gunungkidul. Hal ini akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan areal hutan di wilayah ini memberikan dampak yang positif terhadap ekosistem dengan peran hutan sebagai penjaga fungsi hidroorologis. Keberadaan hutan di wilayah ini dapat menurunkan luasan lahan kritis. Pada tahun 2013 luas lahan kritis di Gunungkidul tercatat 13.673,62 hektar ([http://bappeda.jogjaprov.go.id/jogja\\_masa\\_depan/detail/Pembangunan-Kehutanan-DIY](http://bappeda.jogjaprov.go.id/jogja_masa_depan/detail/Pembangunan-Kehutanan-DIY), 2016). Seiring dengan kenaikan luas wilayah hutan, terutama hutan rakyat, luasan lahan kritis mengalami penurunan dan pada tahun 2015 tercatat sekitar 8.012,04 hektar (Badan Lingkungan Hidup DIY, 2016). Penurunan luasan lahan kritis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Berbeda dengan luasan hutan rakyat yang cenderung berubah, luas hutan negara di DIY tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan tata guna hutan, pada tahun 2015 sebagian besar kawasan hutan negara merupakan hutan produksi yaitu seluas 13.411,7 hektar (71,66 persen), kemudian disusul hutan konservasi seluas 2.312,8 hektar (15,98 persen), dan sisanya merupakan hutan lindung. Hutan Produksi berfungsi sebagai penghasil kayu atau non kayu, seperti hasil industri kayu dan obat-obatan.

Lokasi hutan negara terluas berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu sekitar 14.895.5 hektar atau 79,59 persen dari total luas hutan di DIY. Wilayah Gunungkidul merupakan basis wilayah hutan di DIY. Sekitar 86 persen dari hutan di Gunungkidul merupakan hutan produksi. Sisanya merupakan hutan konservasi seluas 1.068,7 hektar (7,17 persen) dan hutan lindung seluas 1.016,7 hektar (6,83 persen).

Luas hutan negara di Kabupaten Sleman

Tabel 5.14.

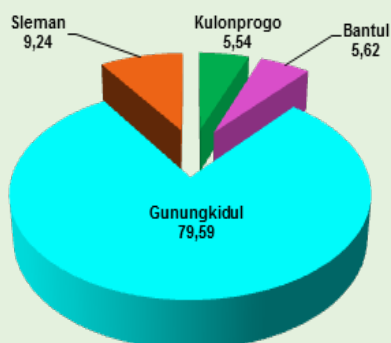
Luas Hutan Negara menurut Tata Guna Hutan dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2015 (hektar)

Kabupaten/ Kota	Hutan produksi	Hutan lindung	Hutan konservasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	602	255	181
Bantul	-	1.041	11
Gunungkidul	12.810	1.017	1.069
Sleman	-	-	1.730
Yogyakarta	-	-	-
<b>DIY</b>	<b>13.412</b>	<b>2.313</b>	<b>2.991</b>

Sumber: Dinas kehutanan dan Perkebunan Provnsi DIY

Gambar 5.9.

Distribusi Luas Hutan Negara di Provinsi DIY menurut Kabupaten/kota Tahun 2015 (persen)



Sumber: Dinas kehutanan dan Perkebunan Provnsi DIY

mencapai 1.729,5 atau sekitar 9,24 persen dari total luas kawasan hutan negara di DIY. Kawasan hutan negara di wilayah ini semuanya merupakan hutan konservasi. Sementara untuk wilayah Bantul dan Kulonprogo luas hutan negara masing-masing sebesar 1.052,6 hektar (5,62 persen) dan 1.037,5 (5,54 persen). Kawasan hutan negara di Bantul didominasi oleh kawasan hutan lindung yang mencapai 98,92 persen dari luas hutan negara di wilayah tersebut. Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo didominasi oleh hutan produksi yang mencapai 57,99 persen dari total luas hutan negara di wilayah tersebut. Proporsi luas hutan lindung dan hutan konservasi masing-masing sebesar 24,57 persen dan 17,45 persen.

Hutan produksi di wilayah DIY dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY). Potensi hutan produksi (13.411,7 hektar) didominasi oleh tanaman jati (50,79 persen) dan tanaman kayu putih (34,32 persen). Nilai penjualan hasil hutan terus mengalami kenaikan selama periode 2013-2015. Penjualan produk kehutanan terdiri dari kayu pertukangan, kayu bakar, dan minyak kayu putih. Pada tahun 2013 total nilai penjualan hasil hutan tercatat Rp. 7,59 miliar. Pada tahun 2014 dan 2015 nilainya meningkat menjadi Rp. 7,83 miliar dan Rp. 8,61 miliar. Penjualan hasil hutan didominasi oleh hasil penjualan minyak kayu putih yang nilainya mencapai 97 persen dari total penjualan hasil hutan di DIY.

Di sisi lain, produksi kayu bulat dari hutan rakyat mengalami fluktuasi meskipun menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2013 produksi kayu bulat tercatat sebanyak 73.395 m3, kemudian meningkat menjadi 113.930 m3 pada tahun 2014. Namun tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 109.609 m3. Fluktuasi produksi tersebut terutama akibat adanya fluktuasi produksi di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan di kabupaten lain menunjukkan adanya tren kenaikan dari tahun ke tahun. Selama 3 tahun terakhir, produksi kayu bulat di Gunungkidul memberikan kontribusi sekitar 37,1 persen dari produksi kayu bulat di DIY yang berasal dari hutan rakyat. Angka ini menempati urutan ke-2 setelah Kabupaten Kulonprogo yang memberikan

Tabel 5.15.  
Nilai Penjualan Hasil Hutan menurut Jenisnya di D.I. Yogyakarta tahun 2015 (juta rupiah)

No.	Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kayu pertukangan			
	- jati	232,25	215,26	229,13
	- rimba	23,23	31,66	6,75
2.	Kayu bakar			
	- jati	4	2	0,07
3.	Minyak kayu putih	7.331	7.581	8374,96
Jumlah		7.590	7.830	8610,9

Sumber: Dinas kehutanan dan Perkebunan Provnsi DIY

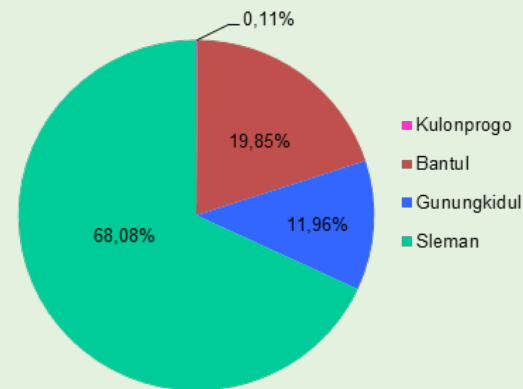
Tabel 5.16.  
Perkembangan Produksi Kayu Bulat dari Hutan Rakyat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015 (m3)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	42.516,0	43.212,4	49.958,5
Bantul	2.925,0	2.972,9	5.829,9
Gunungkidul	15.794,3	55.386,0	39.010,9
Sleman	12.159,7	12.358,9	14.810,1
Yogyakarta	-	-	-
Jumlah	73.395,0	113.930,1	109.609,3

Sumber: Dinas kehutanan dan Perkebunan Provnsi DIY

Gambar 5.10.

Distribusi Produksi Bambu di Provinsi DIY menurut Kabupaten/kota Tahun 2015 (persen)



Sumber: Dinas kehutanan dan Perkebunan Provnsi DIY

kontribusi sekitar 45,7 persen. Sementara Sleman dan Bantul memberikan kontribusi masing-masing sebesar 13,2 persen dan 3,9 persen. Jenis kayu yang banyak diusahakan oleh masyarakat adalah jati, rimba, mahoni, sono, dan akasia.

Produksi hutan rakyat selain kayu adalah bambu. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, pada tahun 2015 produksi bambu di DIY tercatat 5.814 ribu batang. Sentra produksi bambu adalah Kabupaten Sleman dengan jumlah produksi sebanyak 3.958 ribu batang (68,08 persen). Daerah lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah produksi sebanyak 1.154 ribu batang (19,85 persen), kemudian diikuti oleh Gunungkidul sebanyak 695 ribu batang (11,96 persen) dan sisanya dari Kulonprogo.

5.1.6. Peternakan

Tabel 5.17.

Perkembangan Populasi dan Jumlah Ternak yang Dipotong, 2013-2015 (ekor)

Jenis Ternak		2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kuda	Populasi	1 776	1 971	2 165
	Dipotong	239	323	238
2. Sapi	Populasi	272 794	302 011	306 691
	Dipotong	39 323	39 208	40 409
3. Sapi perah	Populasi	4 326	3 990	4 044
	Dipotong	0	0	0
4. Kerbau	Populasi	980	1 044	1 101
	Dipotong	0	0	0
5. Kambing	Populasi	369 730	385 477	400 001
	Dipotong	117 809	117 201	173.579
6. Domba	Populasi	156 860	166 567	177 578
	Dipotong	171 456	180 721	459 871
7. Babi	Populasi	13 579	13 021	13 083
	Dipotong	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian DIY

Pembangunan subsektor peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan hewani, seperti daging, telur, dan susu yang bernilai gizi tinggi. Daging, telur, dan susu merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk proses perkembangan tubuh manusia. Protein hewani dari daging dapat meningkatkan dan mempercepat penyerapan besi heme yang merupakan pembentuk hemoglobin. Protein hewani juga sebagai sumber dari zat besi heme pembentuk hemoglobin. Kebijakan di sub sektor peternakan diarahkan untuk membangun dan mengembangkan usaha peternakan agar mampu meningkatkan produksi dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian usaha peternakan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ekonomi wilayah.

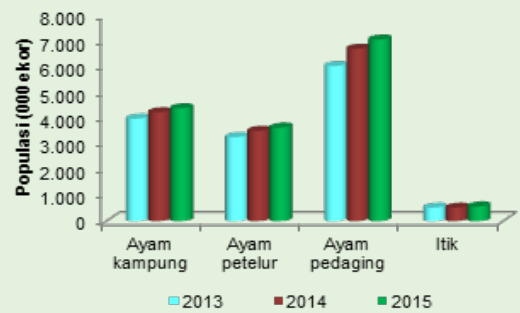
Ternak besar yang paling banyak diusahakan di DIY adalah sapi potong. Populasi ternak sapi potong pada akhir tahun 2015 tercatat 306,7 ribu ekor, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 302 ribu ekor. Sebagian besar ternak sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul,

yaitu sekitar 148,6 ribu ekor (48,45 persen). Jumlah pemotongan ternak sapi potong pada tahun 2015 sebanyak 40,4 ribu ekor atau sekitar 13,2 persen. Untuk ternak besar yang lain populasinya kurang dari 5 ribu ekor. Sentra usaha ternak sapi perah adalah Kabupaten Sleman, dengan populasi ternak sekitar 93 persen dari total sapi perah di DIY. Kondisi lingkungan di Sleman cukup kondusif untuk pengembangan ternak sapi perah, terutama wilayah di kaki Gunung Merapi. Populasi kerbau sebagian besar berada di Kabupaten Sleman dan Bantul. Sementara ternak kuda lebih banyak ditemukan di Kabupaten Bantul.

Jenis ternak kecil yang banyak diusahakan di DIY adalah kambing dan domba. Kedua jenis ternak tersebut populasinya cenderung meningkat selama periode 2013-2015. Pada tahun 2013 populasi kambing dan domba di DIY masing-masing tercatat 369,7 ribu ekor dan 156,9 ribu ekor. Tahun 2015 populasinya meningkat menjadi 400 ribu ekor dan 177,6 ribu ekor. Ternak kambing sebagian besar berada di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Kabupaten Bantul juga merupakan sentra ternak domba. Tingkat pemotongan ternak juga mengalami kenaikan, baik untuk ternak kambing maupun domba. Pada tahun 2013 tercatat ada 117,8 ribu ekor kambing dan 171,5 ribu ekor domba yang dipotong. Kemudian pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 173,6 ribu ekor kambing dan 459,9 ribu ekor domba.

Seperti halnya ternak besar dan ternak kecil, populasi unggas di DIY juga cenderung meningkat. Jenis unggas yang banyak diusahakan oleh masyarakat adalah ayam ras pedaging, ayam kampung/buras, dan ayam ras petelur. Ayam ras pedaging merupakan jenis unggas yang paling banyak diusahakan di DIY. Pada akhir tahun 2013 populasinya tercatat sebanyak 6.046 ribu ekor, dan pada akhir 2015 meningkat menjadi 7.076 ribu ekor. Dalam waktu 2 tahun populasinya meningkat sebesar 17,05 persen. Ayam kampung/buras merupakan jenis unggas terbanyak kedua setelah ayam ras pedaging, kemudian disusul oleh ayam ras petelur, dan itik. Populasi ayam buras meningkat dari 3.993 ribu ekor pada tahun 2013 menjadi 4.397

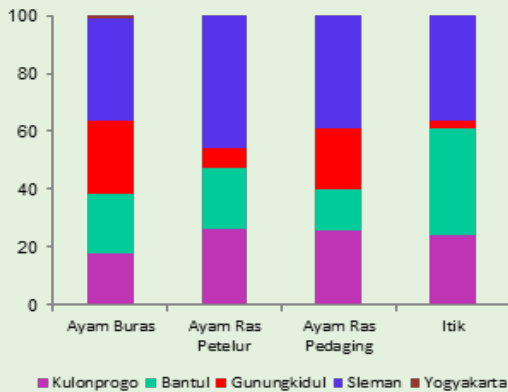
Gambar 5.11.  
Perkembangan Populasi Unggas di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015 (000 ekor)



Sumber: Dinas Pertanian DIY

Gambar 5.12.

Distribusi Populasi Unggas di Provinsi DIY menurut jenis Unggas dan Kabupaten/kota Tahun 2015 (persen)



Sumber: Dinas Pertanian DIY

Tabel 5.18.

Perkembangan Produksi Daging di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Jenis Daging, 2013-2015 (ton)

Jenis Daging	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Sapi	8.637	8.611	7.696
Kuda	36	48	36
Kambing	1.490	1.483	2.196
Domba	2.188	2.306	5.869
Ayam Buras	5.798	6.160	6.035
Ayam Ras Petelur	2.819	3.028	3.635
Ayam Ras Pedaging	33.634	37.367	35.536
Itik	493	492	606

Sumber: Dinas Pertanian DIY

ribu ekor pada tahun 2015 atau meningkat 10,11 persen. Selama 2 tahun populasi ayam ras petelur meningkat 11,22 persen dari 3.275 ribu ekor (2013) menjadi 3.642 ribu ekor (2015). Ternak itik tidak banyak diusahakan oleh masyarakat DIY, terlihat dari populasinya yang relatif kecil, kurang dari 600 irbu ekor meskipun menunjukkan tren kenaikan.

Apabila dirinci menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa potensi usaha peternakan unggas paling tinggi di Kabupaten Sleman. Untuk semua jenis unggas, kecuali itik, wilayah ini merupakan penyumbang terbesar di DIY. Sentra ternak itik ada di Kabupaten Bantul, yaitu sekitar 37 persen dari total populasi itik di DIY pada tahun 2015. Sedangkan di Sleman populasinya sedikit lebih rendah, yaitu sekitar 36 persen. Kontribusi paling tinggi pada ternak ayam ras petelur, yang menyumbang sekitar 46 persen dari total populasi ayam ras petelur di DIY pada tahun 2015. Untuk ayam buras, dan ayam ras pedaging, Sleman memberikan kontribusi masing-masing sebesar 35,13 persen dan 38,72 persen.

Produksi pangan hewani untuk komoditas daging sapi mengalami penurunan dari 8.637 ton pada tahun 2013 menjadi 7.696 ton pada tahun 2015 atau turun 11 persen selama 2 tahun terakhir. Sedangkan produksi daging kambing dan domba mengalami kenaikan masing-masing sebesar 47 persen dan 168 persen. Pada tahun 2013 produksi daging kambing dan daging domba masing-masing sebesar 1.490 ton dan 2.188 ton, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.196 ton dan 5.869 ton. Kenaikan produksi daging seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat terhadap pangan hewani berupa daging.

Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas, baik berupa daging maupun telur juga cenderung meningkat selama periode 2013-2015. Daging ayam ras mengalami kenaikan dari 36.452 ton (2013) menjadi 39.171 ton (2015). Sebagian kecil dari produksi daging ayam ras berasal dari pemotongan ayam ras petelur yang sudah tidak produktif lagi. Jumlahnya sekitar 8-9 persen dari total produksi daging ayam ras. Produksi daging ayam buras juga meningkat dari 5.798 ton (2013)

menjadi 6.035 ton (2015). Secara umum cita rasa daging ayam buras lebih disukai dibandingkan dengan daging ayam ras, namun harga daging ayam buras relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga daging ayam ras. Selain itu budidaya ayam buras juga memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ayam ras. Hal-hal tersebut menyebabkan produksi daging ayam buras jauh lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam ras.

Produksi telur ayam di DIY juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 produksi telur ayam tercatat sebesar 477,68 juta butir, kemudian meningkat menjadi 492,58 juta butir (2014) dan 519,55 juta butir (2015). Sekitar 14 persen diantaranya merupakan telur ayam buras. Di sisi lain, produksi telur itik berfluktuasi, yaitu dari 43.63 juta butir (2013) kemudian meningkat menjadi 50.45 juta butir (2014), lalu turun menjadi 44,62 juta butir.

Kabupaten Sleman merupakan penyumbang terbesar produksi telur di DIY. Pada tahun 2015 sekitar 44 persen produksi telur DIY berasal dari Sleman. Kabupaten lain yang andilnya cukup besar adalah Kulonprogo dan Bantul dengan kontribusi masing-masing sebesar 24,66 persen dan 22,66 persen. Kabupaten Gunungkidul kontribusinya kurang dari 10 persen, bahkan Kota Yogyakarta kurang dari 1 persen. Produksi telur pada masing-masing kabupaten/kota seiring dengan populasi ayam buras dan ayam ras petelur pada masing-masing wilayah.

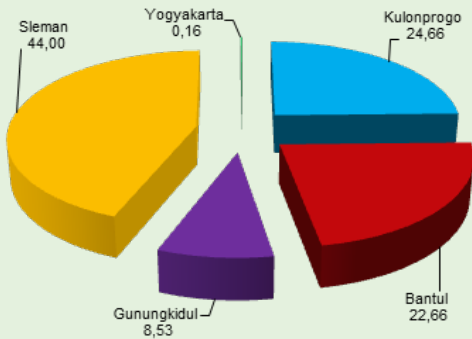
Produk pangan hewani selain daging dan telur adalah susu. Susu sapi mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang pas dan dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Produksi susu sapi di DIY meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 produksinya tercatat sebanyak 4.066,5 ribu liter, kemudian meningkat menjadi 5.869,5 ribu liter pada tahun 2014 dan 6.187,3 ribu liter pada tahun 2015. Dengan demikian, produksi susu sapi di DIY mengalami pertumbuhan rata-rata 23,35 persen per tahun. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan produksi di Kabupaten Sleman yang

Tabel 5.19.  
Perkembangan Produksi Telur di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015 (000 butir)

Jenis Unggas	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayam Buras	64.845	68.683	70.213
Ayam Ras	412.832	423.896	449.335
Itik	43.632	50.448	44.619
Jumlah	521.309	543.027	564.167

Sumber: Dinas Pertanian DIY

Gambar 5.13.  
Distribusi Produksi Telur di Provinsi DIY Kabupaten/kota Tahun 2015 (persen)



Sumber: Dinas Pertanian DIY

Tabel 5.20.  
Perkembangan Produksi Susu di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015 (000 liter)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	141,0	75,0	58,1
Bantul	143,8	295,7	377,9
Gunungkidul	32,9	4,4	-
Sleman	3716,8	5475,3	5734,4
Yogyakarta	32,0	19,1	16,8
DIY	4066,5	5869,5	6187,3

Sumber: Dinas Pertanian DIY

mencapai rata-rata 24,21 persen per tahun. Produksi susu sapi di Kabupaten Sleman menyumbang sekitar 93 persen dari total produksi susu sapi DIY.

### 5.1.7. Perikanan

DIY memiliki bagian wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan dan dilalui oleh beberapa sungai besar, sehingga memiliki potensi untuk pengembangan usaha perikanan. Pengembangan sub sektor perikanan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sehingga potensi yang ada dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Sub sektor perikanan meliputi perikanan darat dan perikanan laut. Produksi ikan darat di DIY pada tahun 2015 mencapai 69,17 ribu ton, meningkat sekitar 16 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat 59,50 ribu ton. Kabupaten Sleman merupakan penghasil ikan darat terbesar di DIY. Sekitar 53 persen produksi ikan darat tahun DIY berasal dari Sleman. Kondisi lingkungan di wilayah ini cukup mendukung untuk usaha perikanan darat karena mempunyai sumber air yang cukup melimpah. Pengembangan budidaya perikanan dan pembinaan petani ikan dengan sistem kelompok turut mendukung usaha perikanan di Sleman. Dengan sistem tersebut, transfer pengetahuan dan transfer teknologi diharapkan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain Sleman, Kabupaten Kulonprogo juga mempunyai kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar 20 persen dari total produksi ikan darat di DIY pada tahun 2015. Di sisi lain, Kota Yogyakarta memberikan andil yang sangat kecil, bahkan kurang dari 1 persen. Dengan luas lahan yang terbatas dan kepadatan penduduk yang tinggi, tidak memungkinkan untuk mendorong pengembangan usaha pertanian termasuk perikanan di wilayah ini.

Pengembangan usaha budidaya ikan di DIY sebagian besar dilakukan di kolam. Produksi ikan dari hasil budidaya yang dilakukan di kolam memberikan kontribusi sekitar 94,93 persen dari total produksi ikan darat di DIY tahun 2015. Produksi ikan hasil budidaya di kolam sebagian besar berasal dari Kabupaten Sleman, yaitu sekitar 55 persen. Sementara untuk produksi ikan hasil budidaya di tambak hanya sekitar 4,69 persen, dan sisanya

Tabel 5.21.

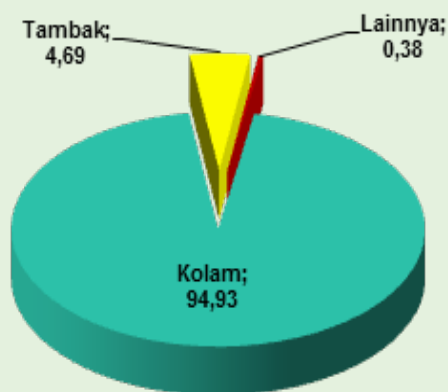
Produksi Ikan Darat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015 (ton)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	14.324,1	14.580,6	14.338,5
Bantul	13.017,0	12.462,3	11.155,0
Gunungkidul	6.618,5	6.509,5	7.200,4
Sleman	30.937,3	25.883,7	36.436,8
Yogyakarta	66,9	67,1	43,1
<b>DIY</b>	<b>64.964,1</b>	<b>59.503,2</b>	<b>69.173,7</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Gambar 5.14.

Distribusi Produksi Ikan Darat di Provinsi DIY Kabupaten/ kota menurut Jenis Budidaya Tahun 2015 (persen)



Sumber: Dinas Pertanian DIY

merupakan hasil budidaya di karamba, jaring apung, sawah (mina-padi), dan telaga. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan di tambak belum berkembang di Provinsi DIY. Produksi ikan hasil budidaya di tambak berasal dari wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Kabupaten Kulonprogo (79,57 persen), Kabupaten Bantul (20,05 persen) dan Kabupaten Gunungkidul (0,37 persen).

Produksi ikan laut di DIY merupakan hasil penangkapan. Selama periode 2012-2014 produksi ikan laut DIY mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2012 produksi ikan laut tercatat sebesar 2,57 ribu ton, kemudian meningkat tajam menjadi 2,72 ribu ton pada tahun 2013 atau meningkat sekitar 96,54 persen. Pada tahun 2014 produksinya kembali meningkat sekitar 6,03 persen mejadi menjadi 5,35 ribu ton. Dengan demikian, selama 2 tahun terjadi peningkatan produksi ikan laut rata-rata 44,36 persen per tahun. Jenis ikan laut yang banyak ditangkap oleh nelayan dari perairan laut selatan antara lain tengiri, tongkol, layang, manyung, dan layur. Kenaikan produksi ikan laut pada tahun 2014 terutama dari hasil penangkapan ubur-ubur (jelly fish) di wilayah Gunungkidul. Produksi ikan laut DIY terutama berasal dari Kabupaten Gunungkidul. Hasil penangkapan ikan laut di wilayah ini memberikan kontribusi sekitar 83,29 persen pada tahun 2014.

Produksi ikan laut sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca. Kondisi cuaca yang kurang mendukung seperti gelombang laut yang tinggi di samudera Hindia menyebabkan banyak nelayan yang tidak berani melaut sehingga berdampak terhadap penurunan produksi ikan laut. Sarana dan prasarana penangkapan ikan juga turut mempengaruhi tingkat produksi ikan laut.

5.1.8. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga

Tabel 5.22.  
Produksi Ikan Laut menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2015 (ton)

Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	351,4	435,0	530,8
Bantul	449,6	545,4	363,8
Gunungkidul	1767,4	1743,0	4457,9
Sleman	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-
DIY	2568,4	2723,4	5352,5

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Tabel 5.23.

Perkembangan Nilai Tukar Petani menurut Subsektor di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2014-2015 (2012 = 100)

Subsektor	2014			2015		
	IT	IB	NTP	IT	IB	NTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanaman Pangan	110,52	114,08	96,88	118,22	121,14	97,59
Hortikultura	110,31	112,80	97,79	117,74	119,54	98,49
Perkebunan	126,99	110,71	114,71	132,43	116,61	113,57
Peternakan	114,05	110,11	103,58	114,37	115,39	99,12
Perikanan	113,91	109,97	103,58	121,02	114,82	105,40
<b>Total</b>	<b>114,39</b>	<b>111,88</b>	<b>102,24</b>	<b>119,51</b>	<b>118,15</b>	<b>101,15</b>

Keterangan : IT : Indeks harga yang diterima petani  
 IB : Indeks harga yang dibayar petani  
 NTP : Nilai Tukar Petani

Sumber : DIY Dalam Angka 2016

Yang Dibayar Petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Semakin tinggi nilai NTP, maka kemampuan atau daya beli petani secara relatif semakin meningkat.

Berdasarkan hasil pengamatan harga-harga pedesaan di wilayah DIY, rata-rata NTP tahun 2015 mengalami penurunan indeks sebesar 1,07 persen dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu dari 102,24 menjadi 101,15. Penurunan NTP tahun 2015 disebabkan oleh indeks harga yang dibayar petani meningkat lebih ditinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang diterima petani. Penurunan NTP ini terutama disebabkan oleh penurunan NTP di subsektor peternakan sebesar 4,31 persen dan subsektor perkebunan sebesar 0,99 persen. Kenaikan NTP subsektor yang lain tidak mampu menutupi penurunan pada kedua subsektor tersebut. Namun demikian, dengan nilai NTP di atas 100 menunjukkan bahwa petani masih mengalami surplus. Artinya kenaikan harga produk pertanian masih lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

Apabila dirinci menurut subsektor, terlihat bahwa NTP subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura nilainya selalu di bawah 100. Artinya kenaikan harga-harga produk tanaman pangan dan hortikultura tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga barang konsumsi dan biaya produksi pada kedua subsektor tersebut, sehingga petani yang mengusahakan tanaman pangan dan hortikultura selalu mengalami defisit. Dengan kata lain, daya saing produk tanaman pangan, dan hortikultura relatif lebih rendah dibandingkan produk lain. NTP subsektor peternakan pada tahun 2014 masih di atas 100, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan hingga nilainya kurang dari 100. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang

konsumsi dan biaya produksi jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga produk peternakan. Di sisi lain NTP subsektor perkebunan dan subsektor perikanan nilainya selalu di atas 100. Artinya, petani yang mengusahakan produk perkebunan dan perikanan selalu mengalami surplus, karena harga produk perkebunan dan perikanan naik lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Dengan demikian, produk perkebunan dan perikanan di DIY mempunyai daya saing yang relatif tinggi.





Bab  
6

KEWILAYAHAN



# Bab KEWILAYAHAN

## 6

### 6.1. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan yang dimaksud tidak semata-mata direpresentasikan oleh tingginya pendapatan per kapita penduduk maupun pertumbuhannya. Tetapi, kesejahteraan juga menyangkut aspek peningkatan kapasitas atau kemampuan berfungsi sekaligus memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dengan sasaran akhir penurunan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan yang dihasilkan oleh proses pertumbuhan.

#### Pengukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan entitas yang bersifat multidimensional. Dimensi kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, kultural, spiritual, dan lainnya. Metode pengukuran kemiskinan sangat beragam, baik menggunakan pendekatan ekonomi atau moneter maupun pendekatan non moneter. Sampai saat, ini metode pengukuran kemiskinan yang lazim digunakan di banyak negara termasuk Indonesia masih bertumpu pada pendekatan moneter. Pertimbangannya adalah lebih mudah digunakan dalam penghitungan, pengumpulan data, interpretasi, maupun aspek keseragaman antar wilayah. Kemiskinan dengan pendekatan moneter bisa dihitung menggunakan data pendapatan atau pengeluaran rumah tangga atau penduduk berdasarkan survei rumah tangga.

Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan di Indonesia ada beberapa macam. BPS mengukur kemiskinan makro

menggunakan pendekatan pengeluaran penduduk yang disebut dengan istilah kebutuhan dasar minimum (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang mencakup kebutuhan dasar makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan dasar non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kebutuhan dasar minimum ini biasa disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dalam bentuk absolut berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga (Susenas) modul konsumsi. Garis kemiskinan pada prinsipnya merupakan penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan. Ukuran-ukuran kemiskinan diestimasi berdasarkan data Susenas kor yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Seseorang dikatakan miskin apabila memiliki pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan.

#### Perkembangan Garis Kemiskinan DIY

Perkembangan nilai nominal garis kemiskinan DIY selama periode 2002-2016 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga (inflasi). Pada bulan Maret 2002, garis kemiskinan DIY ditetapkan sebesar Rp 113,- ribu per kapita per bulan. Secara bertahap, angka ini meningkat hingga Rp 354,- ribu per kapita per bulan di bulan

Maret 2016. Secara umum, garis kemiskinan DIY tercatat selalu lebih tinggi dari rata-rata garis kemiskinan pada level nasional. Hal ini menjadi salah satu sebab level kemiskinan DIY cenderung lebih tinggi dari angka nasional, karena ukuran kemiskinan sangat sensitif terhadap besarnya nilai garis kemiskinan yang digunakan.

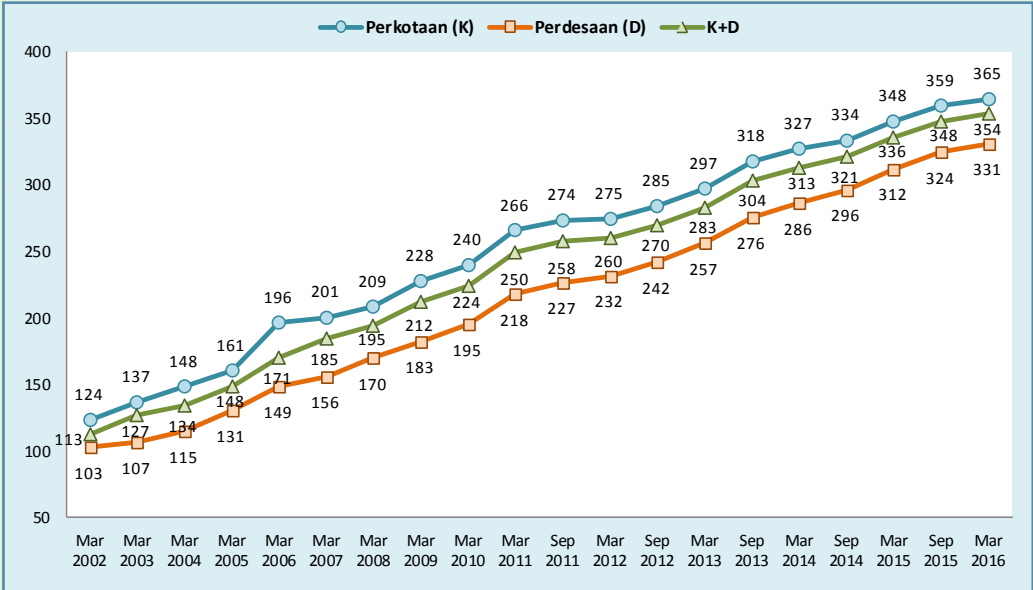
Berdasarkan wilayah, garis kemiskinan daerah perkotaan tercatat selalu lebih tinggi dari daerah perdesaan. Namun demikian, garis kemiskinan di kedua wilayah menunjukkan pola yang peningkatan yang searah. Tingginya level garis kemiskinan di perkotaan disebabkan oleh pola konsumsi penduduk yang lebih bervariasi. Di samping itu, tingkat harga relatif komoditas barang dan jasa di daerah perkotaan juga lebih tinggi dari daerah perdesaan sehingga turut berpengaruh terhadap perbedaan level garis kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY**

Ukuran kemiskinan yang lazim digunakan adalah jumlah penduduk miskin (jiwa) dan persentase penduduk miskin. Perkembangan jumlah penduduk miskin (*Head Count* - HC) DIY selama tahun 2000-2016 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, meskipun polanya terlihat yang sedikit berfluktuasi. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin di DIY tercatat sebanyak 1.035,8 ribu jiwa dengan persentase (*Head Count Index*-HCI) sebesar 33,4 persen. Tingginya level kemiskinan pada saat itu masih dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi 1997/1998 yang belum sepenuhnya pulih. Secara bertahap, jumlah penduduk miskin maupun persentasenya menurun hingga mencapai 494,9 ribu jiwa atau 13,4 persen di bulan Maret 2016.

Berdasarkan *series data*, jumlah penduduk miskin terlihat beberapa kali mengalami peningkatan seperti pada bulan

**Gambar 5.1.**  
Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2002-2016 (000 Rp)



Sumber: BPS

Selama lebih dari satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan daerah perkotaan. Hal ini

## Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan DIY

**Tabel 5.1.**

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Kota + Desa (K+D)		Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Kota + Desa (K+D)	
	HC (000)	HCI (%)	HC (000)	HCI (%)	HC (000)	HCI (%)		HC (000)	HCI (%)	HC (000)	HCI (%)	HC (000)	HCI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2000	436,6	24,58	599,2	45,17	1.035,8	33,39	Mar 2011	304,3	13,16	256,6	21,82	560,9	16,08
Mar 2001	266,8	14,56	500,8	38,65	767,6	24,53	Sep 2011	298,9	12,88	265,3	22,57	564,2	16,14
Mar 2002	303,8	16,17	331,9	25,96	635,7	20,14	Mar 2012	305,9	13,13	259,4	21,76	565,3	16,05
Mar 2003	303,3	16,44	333,5	24,48	636,8	19,86	Sep 2012	306,5	13,10	255,6	21,29	562,1	15,88
Mar 2004	301,4	15,96	314,8	23,65	616,2	19,14	Mar 2013	315,5	13,43	234,7	19,29	550,2	15,43
Mar 2005	340,3	16,02	285,5	24,23	625,8	18,95	Sep 2013	325,5	13,73	209,7	17,62	535,2	15,03
Mar 2006	346,0	17,85	302,7	27,64	648,7	19,15	Mar 2014	333,0	13,81	211,8	17,36	544,9	15,00
Mar 2007	335,3	15,63	298,2	25,03	633,5	18,99	Sep 2014	324,4	13,36	208,2	16,88	532,6	14,55
Mar 2008	324,2	14,99	292,1	24,32	616,3	18,32	Mar 2015	329,7	13,43	220,6	17,85	550,2	14,91
Mar 2009	311,5	14,25	274,3	22,60	585,8	17,23	Sep 2015	292,6	11,93	192,9	15,62	485,6	13,16
Mar 2010	308,4	13,98	268,9	21,95	577,3	16,83	Mar 2016	297,7	11,79	197,2	16,63	494,9	13,34

Cat: HC = Jumlah penduduk miskin (000 jiwa); HCl = Persentase penduduk miskin (persen)

Berdasarkan *series data* selama periode 2007-2016, terdapat kecenderungan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY. Penurunan ini menjadi sinyal yang positif bagi pengentasan kemiskinan. Namun demikian, nilai kedua indeks tercatat meningkat beberapa kali pada bulan Maret 2009, Maret 2012 dan Maret 2015. Penyebab kenaikan kedua indeks adalah pertumbuhan garis kemiskinan yang lebih besar dari pertumbuhan pengeluaran kelompok penduduk miskin.

Secara umum, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah perdesaan dan perkotaan juga terlihat semakin menurun dengan pola yang searah. Nilai indeks di daerah perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Fenomena tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah perdesaan menjadi gambaran kemiskinan di perdesaan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan daerah perkotaan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan DIY pada bulan Maret 2016 masing-masing tercatat sebesar 2,3 dan 0,6. Nilai ini sedikit menurun dibandingkan periode bulan yang sama di tahun 2015. Artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin

semakin menyempit.

### Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota DIY

Distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota menunjukkan pola yang tidak merata. Ketidakmerataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin maupun persentasen antar wilayah yang cukup bervariasi. Berdasarkan jumlah (HC), sebaran penduduk miskin pada tahun 2015 sebagian besar terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul dengan jumlah masing-masing 155,0 ribu jiwa dan 160,2 ribu jiwa. Sementara, populasi penduduk miskin terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 36,0 ribu jiwa. Berdasarkan persentase ( $P_o$ ), Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi masing-masing sebesar 20,7 persen dan 20,4 persen. Sementara, Kota Yogyakarta dan Sleman merupakan daerah yang memiliki persentase penduduk miskin terendah (8,8 persen).

Indeks kedalaman ( $P_1$ ) dan keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) di Gunungkidul dan Kulon Progo juga terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DIY.

Secara umum, perbedaan level indikator kemiskinan menggambarkan

**Tabel 5.2.**  
Perkembangan Indeks Kedalaman ( $P_1$ ) dan Keparahana Kemiskinan ( $P_2$ ) DIY, 2007-2016

Tahun	Wilayah	Mar 2007	Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Mar 2011	Sep 2011	Mar 2012	Sep 2012	Mar 2013	Sep 2013	Mar 2014	Sep 2014	Mar 2015	Sep 2015	Mar 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )	Perkotaan	3,08	2,72	2,84	2,27	1,93	1,93	3,56	2,29	2,08	2,18	2,22	2,03	2,55	2,19	1,78
	Perdesaan	5,08	4,49	4,74	3,89	3,67	3,54	3,29	4,07	3,02	2,03	2,11	2,98	3,70	2,57	3,41
	K+D	3,80	3,35	3,52	2,85	2,51	2,48	3,47	2,89	2,40	2,13	2,19	2,35	2,93	2,32	2,30
Indeks Keparahana Kemiskinan ( $P_2$ )	Perkotaan	0,88	0,71	0,81	0,56	0,50	0,48	1,32	0,58	0,50	0,52	0,53	0,52	0,71	0,60	0,38
	Perdesaan	1,55	1,29	1,46	1,02	0,93	0,81	0,79	1,09	0,63	0,34	0,40	0,79	1,09	0,68	1,05
	K+D	1,12	0,92	1,04	0,73	0,65	0,59	1,14	0,75	0,55	0,46	0,48	0,61	0,83	0,63	0,59

Sumber: BPS

**Tabel 5.3.**

Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2015

Kabupaten/ Kota	2014					2015				
	GK (Rp 000)	HC (000 Jiwa)	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	GK (Rp 000)	HC (000 Jiwa)	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	265.575	84,67	20,64	3,22	0,69	273.436	88,13	21,40	4,16	1,24
Bantul	301.986	153,49	15,89	2,44	0,59	312.514	160,15	16,33	3,16	0,89
Gunungkidul	243.847	148,39	20,83	3,74	1,03	250.630	155,00	21,73	4,55	1,33
Sleman	306.961	110,44	9,50	1,15	0,22	318.312	110,96	9,46	1,46	0,37
Yogyakarta	366.520	35,60	8,67	1,14	0,26	383.966	35,98	8,75	1,06	0,23
DIY	321.056	532,59	14,55	2,35	0,61	335.886	550,23	14,91	2,93	0,83

Sumber: BPS

kesejahteraan penduduk antar wilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan; infrastruktur dan pusat perekonomian; dan infrastruktur transportasi dan komunikasi; struktur perekonomian; kemudahan dalam mengakses sarana yang tersedia antar wilayah menjadi penjelas perbedaan kualitas kesejahteraan penduduk yang cukup mencolok. Perkembangan kemiskinan di semua kabupaten/kota selama beberapa tahun terakhir secara umum menunjukkan pola yang semakin menurun secara lambat, meskipun terjadi sedikit kenaikan di tahun 2015.

### Ketimpangan Pendapatan DIY

Kebijakan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata melalui peningkatan pendapatan per kapita. Namun, kebijakan tersebut juga membawa persoalan berupa peningkatan ketidakmerataan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena kepemilikan aset dan keterampilan/keahlian (*skill*) antar penduduk tidak tersebar secara merata, sehingga level pendapatan yang diterima juga sangat bervariasi. Ada banyak indikator yang menggambarkan derajat

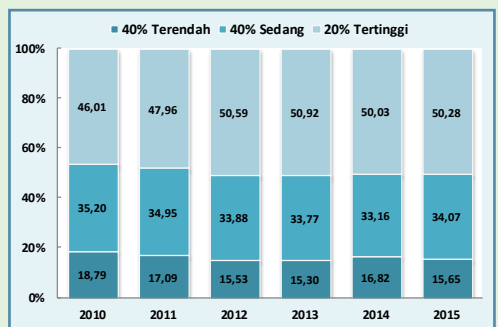
ketimpangan pendapatan antar individu atau penduduk (distribusi ukuran). Indikator yang sering digunakan adalah ukuran Bank Dunia dan Koefisien Gini.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret tahun 2005-2015, distribusi pendapatan yang diproksi dengan pengeluaran per kapita penduduk menunjukkan pola yang semakin tidak merata atau semakin timpang. Pada tahun 2015, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menerima 15,6 persen dari total pendapatan penduduk. Angka ini tercatat lebih rendah dari proporsi tahun 2010 yang mencapai 18,8 persen dan cenderung menurun dalam enam tahun terakhir. Sementara, 20 persen penduduk golongan pendapatan tertinggi memperoleh proporsi pendapatan sebesar 50,3 persen dari total pendapatan penduduk. Proporsi kelompok ini cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jika diukur menggunakan indikator rasio Kuznets, maka pendapatan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi besarnya lebih dari 3 kali lipat pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Angka ini menggambarkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk yang cukup lebar.

Adanya ketimpangan yang semakin

Gambar 5.2.

Distribusi Pengeluaran Penduduk menurut Golongan Pengeluaran, 2010-2015 (Persen)



Sumber: BPS

Tabel 5.4.

Pengeluaran Perkapita, Distribusi Pengeluaran, dan Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015

Kabupaten/ Kota	Konsumsi Perkapita (Rp)	Share Pengeluaran				Indeks Gini
		40 %	40 %	20 %	Jml	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	670.192	19,10	35,34	45,56	100	0,3671
Bantul	855.399	17,72	37,58	44,70	100	0,3761
Gunungkidul	541.114	21,20	37,78	41,01	100	0,3188
Sleman	1.177.082	14,93	33,93	51,14	100	0,4458
Yogyakarta	1.325.612	13,99	36,43	49,59	100	0,4463
DIY	928.602	15,65	34,07	50,28	100	0,4329

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2015, BPS

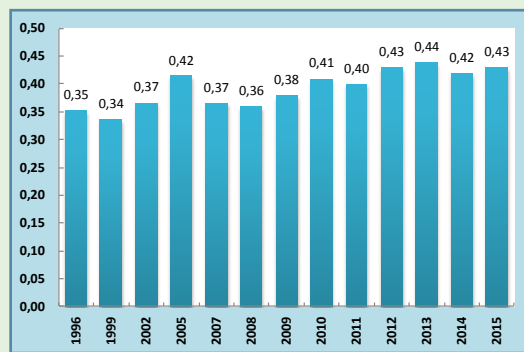
melebar diperjelas oleh nilai koefisien Gini dalam beberapa tahun yang semakin meningkat. Pada bulan Maret 2015, level indeks Gini DIY tercatat sebesar 0,43. Dibandingkan dengan tahun 1996 (0,35), nilai koefisien Gini 2015 terlihat semakin naik, meskipun secara kriteria angka ini masih berada dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang. Peningkatan indeks Gini dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan kondisi distribusi pendapatan antar penduduk yang berjalan semakin tidak merata.

Perbandingan ketimpangan pendapatan personal antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dan Sleman menjadi dua daerah yang memiliki level ketimpangan pendapatan tertinggi. Secara kesejahteraan, kedua daerah tersebut memiliki tingkat

kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga kabupaten yang lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang masing-masing mencapai Rp 1,3 juta dan Rp 1,2 juta sebulan. Meskipun secara rata-rata pengeluaran/pendapatannya tinggi, proporsi pengeluaran/pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk golongan berpendapatan rendah berada di bawah 15 persen. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul merepresentasikan daerah dengan kesejahteraan terendah tetapi tingkat ketimpangan pendapatannya juga rendah. Hal ini ditunjukkan oleh level pengeluaran perkapita yang relatif rendah, namun 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima porsi pendapatan di atas

Gambar 5.3.

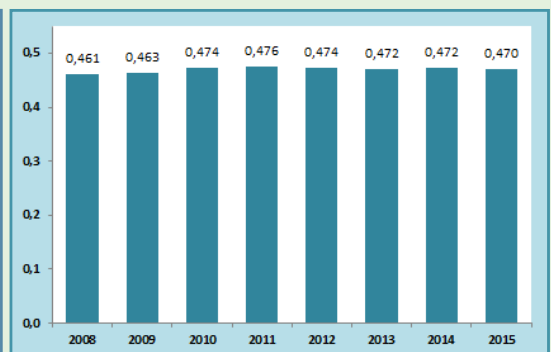
Perkembangan Indeks Gini DIY, 1996-2015



Sumber: BPS

Gambar 5.4.

Perkembangan Indeks Williamson DIY, 2008-2015



Sumber: BPS

20 persen atau paling tinggi diantara lima kabupaten/kota di DIY.

Selain isu ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin tinggi, isu ketimpangan pendapatan antar wilayah atau ketimpangan regional juga menjadi persoalan cukup krusial di DIY. Salah satu pendekatan metode untuk mengukur ketimpangan regional adalah indeks Williamson. Perkembangan indeks Williamson DIY selama periode 2008-2015 menunjukkan pola yang semakin meningkat dari 0,46 di tahun 2000 menjadi 0,47 di tahun 2015. Fenomena ini menggambarkan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar wilayah yang semakin tidak merata. Salah satu pemicunya adalah terpusatnya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan terutama di Kota Yogyakarta dan daerah yang menjadi penyangganya yakni Sleman dan Bantul. Sementara, perkembangan perekonomian kawasan perdesaan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yang mengandalkan peran sektor pertanian berjalan jauh lebih lambat. Persoalan kualitas infrastruktur dan modal manusia antar wilayah yang tidak merata juga menjadi penyebab lain dari tingginya ketimpangan pendapatan regional di DIY.



# Bab 7

## PENUTUP



